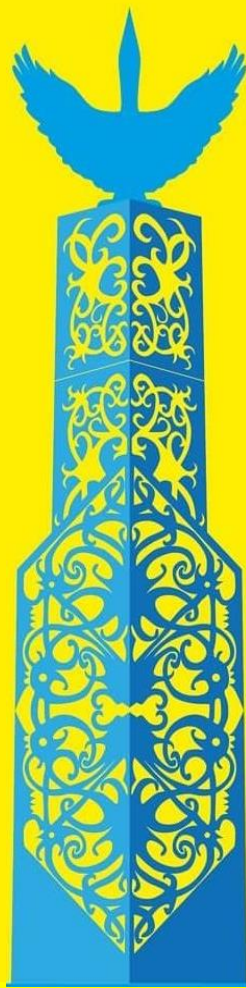


# PROFIL

## PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2023



PINDAI :



6501



6502



6503



6504



6571

## KATA PENGANTAR



Data kependudukan adalah variabel penting dalam menentukan arah pembangunan dan penentuan kebijakan pemerintah, karena data kependudukan adalah gambaran yang akurat dan akuntabel mengenai kondisi riil masyarakat pada suatu wilayah. Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan mengamanatkan agar Gubernur (Kepala Daerah) menyusun Profil Perkembangan Kependudukan berskala provinsi. Untuk itu, Disdukcapil Provinsi Kalimantan Utara menerbitkan Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 yang merupakan gambaran kondisi dan perkembangan kependudukan Kalimantan Utara sampai bulan Desember Tahun 2022 .

Data kependudukan dalam buku ini adalah hasil pelayanan yang dilakukan dinas kependudukan dan pencatatan sipil di 4 (empat) kabupaten dan 1 (satu) kota di Provinsi Kalimantan Utara dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), yang kemudian dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dan kemudian diolah oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara bersama tim. Data dan informasi kependudukan di dalam buku ini tidak hanya berupa angka-angka kuantitatif, namun juga mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, agama, serta lingkungan, sehingga dalam penyusunan buku profil perkembangan kependudukan ini, kami bekerja sama dengan pihak-pihak terkait. Buku ini akan disajikan satu tahun sekali dengan menampilkan peta, tabel, grafik dan diagram sehingga dapat memperkirakan pertumbuhan penduduk tiap tahun secara berkelanjutan dengan harapan dapat digunakan sebagai bahan dalam penyusunan atau rancangan program maupun kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di Kalimantan Utara.

Semoga Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 ini dapat memberikan informasi terkait perkembangan kependudukan yang dapat dimanfaatkan oleh lembaga Pemerintah maupun swasta.

Tanjung Selor,      Juli 2023  
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Provinsi Kalimantan Utara,

**Drs. H. SANUSI, M.Si**  
Pembina Utama Madya, IV/d  
NIP. 197201201993011001

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas Taufiq dan Hidayah-Nya, Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 telah menyusun Buku ini.

Buku ini disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan.

Dengan tersusunnya Buku Profil Perkembangan Kependudukan Tingkat Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 ini, dapat dijadikan sebagai referensi atau rujukan dalam penyusunan program pembangunan sesuai dengan visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara : **Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera.**

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung dan terlibat langsung dalam tim untuk melaksanakan penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023.

Tanjung Selor, Juli 2023  
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

**Drs. H. ZAINAL A. PALIWANG, S.H., M.Hum**

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas Taufiq dan Hidayah-Nya, Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 telah menyusun Buku ini.

Buku ini disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan.

Dengan tersusunnya Buku Profil Perkembangan Kependudukan Tingkat Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 ini, dapat dijadikan sebagai referensi atau rujukan dalam penyusunan program pembangunan sesuai dengan visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara : **Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera.**

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung dan terlibat langsung dalam tim untuk melaksanakan penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023.

Tanjung Selor, Juli 2023  
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

**Drs. H. ZAINAL A. PALIWANG, S.H., M.Hum**

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Dr. H. Suriansyah, M.AP.	Sekretaris Daerah Prov. Kaltara	
2	Dt. Iqro Ramadhan, S.Sos,M.Si.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Prov. Kaltara	
3	Drs. H. Sanusi, M.Si.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kaltara	
4	Agus Dwi Santosa, S.E.	Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data Disdukcapil Prov. Kaltara	

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Peraturan Perundangan .....	2
C. Tujuan .....	4
D. Ruang Lingkup .....	4
E. Pengertian Umum / Daftar Istilah yang Digunakan.....	5
<b>II. GAMBARAN UMUM POTENSI DAERAH .....</b>	<b>12</b>
A. Letak Geografis .....	12
B. Kondisi Topografi .....	14
C. Kondisi Iklim .....	16
D. Sumber Daya Air .....	17
E. Penggunaan Lahan .....	19
F. Potensi Pengembangan Ekonomi Sektoral .....	23
1. Sektor Pertanian Tanaman Pangan .....	23
2. Sektor Holtikultura .....	23
3. Sektor Peternakan.....	23
4. Sektor Perkebunan.....	23
5. Sektor Kehutanan.....	24
6. Sektor Perikanan.....	25
7. Sektor Industri .....	26
8. Sektor Pertambangan dan Energi .....	26
9. Sektor Pariwisata .....	26
G. PDRB Menurut Lapangan Usaha .....	28
1. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022 ( <i>c to c</i> ).....	29
2. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV Tahun 2022 terhadap Triwulan IV Tahun 2021 ( <i>y to y</i> ) .....	30
3. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV Tahun 2022 terhadap Triwulan III Tahun 2022 ( <i>q to q</i> ) .....	31
H. PDRB Menurut Pengeluaran .....	35
1. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022 ( <i>c to c</i> ).....	35
2. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-Tahun 2022 Terhadap Triwulan IV-Tahun 2021 ( <i>y-on-y</i> ) ....	36
3. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-Tahun 2022 Terhadap Triwulan III-Tahun 2022 ( <i>q-to-q</i> ) .....	37
I. Pertumbuhan PDRB Triwulan IV-2022 Menurut Provinsi Se- Kalimantan dan Wilayah Lainnya.....	39
J. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara, Maret – September 2022 .....	40
K. Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Utara, Agustus 2022 .....	42
1. Penduduk Usia Kerja .....	42
2. Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja.....	43
3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) .....	44
4. Penduduk yang Bekerja.....	46

5. Dampak Pandemi Covid-19 pada Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Utara .....	48
<b>III. KUANTITAS PENDUDUK.....</b>	<b>51</b>
A. Persebaran (Distribusi) Penduduk.....	51
1. Jumlah dan Persebaran Penduduk .....	51
2. Penduduk Di Wilayah Perbatasan.....	55
3. Kepadatan Penduduk ( <i>Population Density Ratio</i> ) .....	56
4. Laju Pertumbuhan Penduduk.....	58
B. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Demografi.....	61
1. Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin. ....	61
2. Rasio Jenis Kelamin ( <i>Sex Ratio</i> ).....	63
3. Piramida Penduduk.....	65
4. Rasio Ketergantungan ( <i>Dependency Ratio</i> ).....	68
5. Jumlah Penduduk Menurut Status Kawin.....	70
C. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Sosial .....	72
1. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Terakhir .....	72
2. Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan .....	74
3. Jumlah Rata-Rata Anggota Keluarga.....	77
4. Status Hubungan dengan Kepala Keluarga .....	81
5. Golongan Darah.....	83
<b>IV. KUALITAS PENDUDUK .....</b>	<b>85</b>
A. Kesehatan .....	85
1. ASFR ( <i>Age Specific Fertility Rate</i> ) .....	86
2. Rasio Anak dan Perempuan ( <i>Child Women Ratio/CWR</i> ).....	87
3. Paska Pandemi Covid 19.....	89
B. Pendidikan.....	90
C. Perekonomian .....	93
1. Proporsi Jenis Pekerjaan .....	93
2. Angka Pengangguran (Tingkat Pengangguran) .....	95
3. Tenaga Kerja Orang Asing.....	97
D. Sosial.....	98
1. Angka Penyandang Disabilitas.....	98
<b>V. KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN .....</b>	<b>100</b>
A. Kartu Keluarga .....	100
B. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI).....	101
C. Identitas Kependudukan Digital (IKD).....	103
D. Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA).....	105
E. Kepemilikan Akta.....	106
1. Kepemilikan Akta Kelahiran.....	106
2. Kepemilikan Akta Perkawinan.....	108
3. Kepemilikan Akta Perceraian .....	110
4. Kepemilikan Akta Kematian.....	111
<b>VI. PENUTUP .....</b>	<b>114</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>115</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>116</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Keadaan Geografi Provinsi Kalimantan Utara.....	12
Tabel 2.2 Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Utara .....	13
Tabel 2.3 Kelas Ketinggian dari Permukaan Laut Provinsi Kalimantan Utara.....	15
Tabel 2.4 Kelas Kemiringan Lereng di Provinsi Kalimantan Utara (Ha).....	15
Tabel 2.5 Luas Wilayah Menurut Jenis Penggunaan Tanah di Provinsi Kalimantan Utara.....	19
Tabel 2.6 Tutupan Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 .....	19
Tabel 2.7 Pola Ruang Provinsi Kalimantan Utara .....	21
Tabel 2.8 Luas Kawasan Hutan Kalimantan Utara Hingga Tahun 2021 (Ha).....	25
Tabel 2.9 Jumlah Objek Wisata Kalimantan Utara .....	27
Tabel 2.10 Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) .....	32
Tabel 2.11 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) .....	33
Tabel 2.12 Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen).....	34
Tabel 2.13 Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran (persen) .....	38
Tabel 2.14 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (miliar rupiah)...	38
Tabel 2.15 Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran (persen).....	39
Tabel 2.16 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kalimantan Utara Menurut Daerah, Maret 2022 – September 2022 .....	41
Tabel 2.17 Perkembangan Penduduk Miskin Menurut Kabupaten Kota, Tahun 2019 – 2022 (Persen) .....	41
Tabel 2.18 Persentase Penduduk Kalimantan Utara Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Klasifikasi Daerah, Agustus 2021 dan 2022 .....	42
Tabel 2.19 Persentase Penduduk Usia Kerja Menurut Kegiatan dan Jenis Kelamin di Kalimantan Utara, Agustus 2022.....	43
Tabel 2.20 Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin, Klasifikasi Daerah dan TPAK di Kalimantan Utara, Agustus 2022 .....	44
Tabel 2.21 Angkatan Kerja, Pengangguran Terbuka dan TPT Kalimantan Utara Menurut Jenis Kelamin dan Klasifikasi Daerah, Agustus 2022 .....	45
Tabel 2.22 Jumlah Pengangguran Terbuka dan TPT Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, Agustus 2022 .....	45
Tabel 2.23 Perkembangan TPT Menurut Kabupaten Kota Tahun 2019 - 2022 .....	46
Tabel 2.24 Dampak Covid-19 terhadap Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin (jiwa), Agustus 2022 ....	49
Tabel 2.25 Dampak Covid-19 terhadap Penduduk Usia Kerja Menurut Wilayah (Jiwa), Agustus 2022.....	49

Tabel 3.1	Jumlah Penduduk di Kabupaten / Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022.....	51
Tabel 3.2	Jumlah Penduduk Per Kecamatan Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022.....	53
Tabel 3.3	Rasio Penduduk Perbatasan di-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022.....	55
Tabel 3.4	Rasio Kepadatan Penduduk di Kabupaten / Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022.....	57
Tabel 3.5	Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten / Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2022.....	59
Tabel 3.6	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022.....	62
Tabel 3.7	Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022.....	64
Tabel 3.8	Jumlah Penduduk Usia Produktif Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022.....	68
Tabel 3.9	Rasio Ketergantungan Penduduk Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022.....	70
Tabel 3.10	Status Perkawinan Penduduk Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022.....	70
Tabel 3.11	Status Perkawinan Per Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022.....	71
Tabel 3.12	Tingkat Pendidikan Terakhir Penduduk Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022.....	73
Tabel 3.13	Tingkat Pendidikan Terakhir Penduduk Per Kabupaten/Kota Tahun 2022.....	73
Tabel 3.14	Jumlah Penduduk Menurut Agama di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022.....	75
Tabel 3.15	Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022.....	76
Tabel 3.16	Jumlah Rata-Rata Anggota Keluarga Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022.....	80
Tabel 3.17	Jumlah Penduduk Menurut Status Hubungan dengan Kepala Keluarga Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022.....	82
Tabel 3.18	Jumlah Penduduk Menurut Status Hubungan dengan Kepala Keluarga di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022.....	83
Tabel 3.19	Jumlah Penduduk Menurut Golongan Darah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara 2022.....	84
Tabel 4.1	Angka Kelahiran Menurut Umur di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022.....	86
Tabel 4.2	Rasio Anak dan Perempuan di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022.....	88
Tabel 4.3	Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022.....	92
Tabel 4.4	Rekapitulasi Data Kependudukan Per Jenis Pekerjaan dan Jenis Kelamin Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022.....	93
Tabel 4.5	Angka Pengangguran di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022.....	95
Tabel 4.6	Data Tenaga Kerja Asing Penempatan Provinsi Kalimantan Utara Per 1 Oktober s/d 31 Desember 2022.....	97
Tabel 4.7	Data Agregat Disabilitas di Kalimantan Utara 2022.....	99
Tabel 4.8	Jumlah Penyandang Disabilitas di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022.....	99
Tabel 5.1	Jumlah Kartu Keluarga di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022.....	100
Tabel 5.2	Jumlah Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022.....	101



Tabel 5.3	Jumlah Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Se-Provinsi Kalimantan Utara. ....	103
Tabel 5.4	Jumlah Kartu Identitas Anak di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara 2022. ....	104
Tabel 5.5	Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022	105
Tabel 5.6	Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Umur 0-17 Tahun di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022. ....	106
Tabel 5.7	Jumlah Kepemilikan Akta Perkawinan di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 .....	108
Tabel 5.8	Jumlah Kepemilikan Akta Perceraian di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 .....	109
Tabel 5.9	Jumlah Kepemilikan Akta Kematian di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022	111

## DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 2.1	Diagram Luas Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara .....	13
Gambar 2.2	Peta Cakupan Wilayah Provinsi Kalimantan Utara.....	14
Gambar 2.3	Persentase Luasan Tutupan Lahan Provinsi Kalimantan Utara (Ha) .....	20
Gambar 2.4	Peta Tutupan Lahan di Provinsi Kalimantan Utara .....	21
Gambar 2.5	Peta Pola Ruang dalam RTRW Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037 .....	22
Gambar 2.6	Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Utara .....	25
Gambar 2.7	Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha ( <i>c-to-c</i> ) (persen).....	30
Gambar 2.8	Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha ( <i>y-on-y</i> ) (persen).....	31
Gambar 2.9	Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha ( <i>q-to-q</i> ) (persen) .....	31
Gambar 2.10	Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran ( <i>c-to-c</i> ) (persen) .....	35
Gambar 2.11	Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran ( <i>y-on-y</i> ) (persen) .....	36
Gambar 2.12	Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen ( <i>q-to-q</i> ) (persen) .....	37
Gambar 2.13	Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Menurut Pulau, Triwulan IV-2022 (persen).....	39
Gambar 2.14	Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Pulau Kalimantan Triwulan IV-2022 (persen).....	40
Gambar 2.15	Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kegiatan dan Klasifikasi Daerah di Kalimantan Utara, Agustus 2022 (Ribu Jiwa) .....	43
Gambar 2.16	Persentase Penduduk Usia Kerja (15 Tahun Ke Atas) yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kalimantan Utara, Agustus 2022.....	47
Gambar 2.17	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Kalimantan Utara, Agustus 2022.....	48
Gambar 2.18	Dampak Covid-19 pada Penduduk Usia Menurut Kelompok Umur (Jiwa), Agustus 2022.....	50
Gambar 3.1	Grafik Jumlah Penduduk di Kabupaten / Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022.....	52
Gambar 3.2	Grafik Rasio Kepadatan Penduduk di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 .....	57
Gambar 3.3	Grafik Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2022 .....	60
Gambar 3.4	Grafik Rasio Jenis Kelamin Provinsi Kalimantan Utara per Kabupaten/Kota Tahun 2022 .....	65
Gambar 3.5	Piramida Penduduk Menurut Kelompok Umur Kalimantan Utara Tahun 2022.....	66
Gambar 3.6	Diagram Status Perkawinan Penduduk Kalimantan Utara Tahun 2022 .....	71
Gambar 3.7	Diagram Persentase Penduduk Menurut Agama Kalimantan Utara Tahun 2022.....	76
Gambar 3.8	Grafik Jumlah Keluarga Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 .....	81

Gambar 3.9	Grafik Jumlah Penduduk Menurut Golongan Darah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 .....	84
Gambar 4.1	Grafik Rasio Angka Kelahiran Menurut Umur (ASFR) Kalimantan Utara Per Kabupaten/Kota Tahun 2022 .....	87
Gambar 4.2	Grafik Rasio Anak dan Perempuan (CWR) Kalimantan Utara Per Kabupaten/Kota .....	88
Gambar 4.3	Infografis Data Covid-19 Provinsi Kalimantan Utara 31 Desember 2022 update 20.00 WITA .....	90
Gambar 4.4	Grafik Angka Partisipasi Kasar & Angka Partisipasi Murni Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022. ....	92
Gambar 4.5	Grafik Perkembangan Angka Partisipasi Kasar & Angka Partisipasi Murni Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014-2021 .....	92
Gambar 4.6	Grafik Rekapitulasi Data Kependudukan Per Jenis Pekerjaan & Jenis Kelamin Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022.....	94
Gambar 5.1	Grafik Kartu Keluarga di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022.....	100
Gambar 5.2	Grafik Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 .....	102
Gambar 5.3	Grafik Jumlah Kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 .....	104
Gambar 5.4.	Grafik Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022	106
Gambar 5.5	Grafik Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Umur 0-17 Per Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 .....	107
Gambar 5.6	Grafik Kepemilikan Akta Perkawinan di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 .....	109
Gambar 5.7	Grafik Kepemilikan Akta Perceraian di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 .....	110
Gambar 5.8	Grafik Kepemilikan Akta Kematian di Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022. ....	112



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan harus dilaksanakan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Buku Profil Perkembangan Kependudukan ini adalah salah satu respon terhadap pentingnya ketersediaan informasi kependudukan secara transparan serta untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program-program pemerintah. Data kependudukan adalah sumber penting sebagai rujukan dalam perencanaan pembangunan. Ini tak lepas dari perubahan paradigma pembangunan dari hanya pembangunan infrastruktur fisik menjadi *Humanizing-Development*, pembangunan yang memanusiakan manusia. Dalam paradigma ini, penduduk tidak lagi ditempatkan sebagai objek, namun menjadi subjek dari pembangunan tersebut. Atas dasar itulah tersedianya data kependudukan menjadi sangat penting, karena didalamnya merekam dinamika perkembangan penduduk di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Data kependudukan tidak hanya bersifat kuantitatif, namun juga berusaha menjelaskan dinamika perkembangan yang bersifat kualitatif.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengamanatkan agar pembangunan di bidang kependudukan juga dilakukan melalui pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang bertujuan menyediakan data dan informasi kependudukan skala nasional, provinsi dan kota/kabupaten, dan dapat dijadikan acuan dasar bagi sektor atau lembaga-lembaga lain (pemerintah maupun swasta) dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan serta untuk memenuhi kebutuhan informasi maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022.

Penyusunan Buku Profil Perkembangan Penduduk Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 ini adalah usaha untuk menyediakan data kependudukan yang valid, yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan tersimpan didalam basis data kependudukan, serta dapat dimanfaatkan sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan-kebijakan pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara maupun pemerintah pusat. Variabel data yang disajikan disini adalah hasil registrasi kependudukan di tiap-tiap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Variabel-variabel tersebut meliputi kuantitas penduduk, kualitas penduduk, mobilitas penduduk, dan kepemilikan dokumen-dokumen kependudukan.



## **B. Peraturan Perundangan**

1. Undang–undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 112 tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);



5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 177);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 695);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470/837/SJ Tahun 2018 tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan.
14. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.57/M.PPN/HK/06/2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati

### **C. Tujuan**



Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 ini disusun dengan menggunakan data yang dihasilkan dari Data Konsolidasi Bersih (DKB) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan sumber data lainnya, dengan tujuan :

1. Memberikan gambaran umum mengenai kondisi dan potensi kependudukan wilayah Provinsi Kalimantan Utara;
2. Membantu para pengambil kebijakan dalam pengambilan keputusan yang tepat dalam proses pembangunan;
3. Menyediakan data dan informasi yang akurat bagi pemerintah provinsi dan masyarakat luas yang berkelanjutan untuk merumuskan dan menyusun kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan dan evaluasi kebijakan serta dapat digunakan untuk menyusun program kegiatan setiap OPD / Lembaga;
4. Mempermudah masyarakat luas, baik dunia pendidikan, kesehatan dan lainnya untuk memperoleh data dan informasi kependudukan Provinsi Kalimantan Utara secara umum.

### **D. Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup penyusunan profil perkembangan kependudukan ini mencakup 5 (lima) hal pokok yaitu antara lain :

- 1) Menyajikan perkembangan kependudukan secara kuantitatif sehingga tampak jelas apa yang sudah berlangsung;
- 2) Mengidentifikasi kelompok atau segmen kependudukan yang membutuhkan perhatian khusus dan upaya-upaya yang diperlukan sehingga mendapat pelayanan tepat sasaran;
- 3) Dari point 1) dan 2) teridentifikasi potensi penduduk yang dapat dijadikan aset pembangunan daerah dan nasional;
- 4) Mengkoordinasikan, melakukan evaluasi dengan instansi terkait untuk memperoleh kesepakatan dan kesepahaman dalam penyusunan dan pemanfaatannya;
- 5) Mendorong percepatan terwujudnya satu data kependudukan untuk analisa pembangunan daerah.



Buku Profil Perkembangan Penduduk Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 ini secara garis besar menyajikan data sebagai berikut:

- A. Persebaran (Distribusi) Penduduk
- B. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Demografi
- C. Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
- D. Kualitas Penduduk : Kesehatan, Pendidikan, Perekonomian, Angka Pengangguran
- E. Kepemilikan Dokumen Kependudukan
  1. Kepemilikan Kartu Keluarga
  2. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk
  3. Kepemilikan Akta : Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, dan Akta Perceraian

#### **E. Pengertian Umum / Daftar Istilah Kependudukan**

1. **Penduduk** adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang yang bertempat tinggal di Indonesia;
2. **Kependudukan** adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat;
3. **Administrasi Kependudukan** adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hal lainnya untuk pelayanan publik dan pembangunan di berbagai sektor;
4. **Data Kependudukan** adalah data perorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
5. **Perkembangan Kependudukan** adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan perubahan keadaan penduduk yang meliputi kuantitas, kualitas dan mobilitas yang mempunyai pengaruh terhadap pembangunan dan lingkungan hidup;
6. **Kuantitas Penduduk** adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati dan pindah tempat tinggal;





7. **Kualitas Penduduk** adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik serta ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang berbudaya, berkepribadian dan bermartabat;
8. **Mobilitas Penduduk** adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas administrasi;
9. **Profil Perkembangan Kependudukan** adalah kumpulan data dan informasi tentang perkembangan kependudukan dalam bentuk tertulis, yang mencakup segala kegiatan yang berhubungan dengan perubahan keadaan penduduk yang meliputi kuantitas, kualitas dan mobilitas yang mempunyai pengaruh terhadap pembangunan dan lingkungan hidup;
10. **Persebaran Penduduk** adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan;
11. **Peristiwa Kependudukan** adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan;
12. **Peristiwa Penting** adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;
13. **Kematian atau Mortalitas** menurut WHO adalah suatu peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup;
14. **Rasio Jenis Kelamin** adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan jenis kelamin antara banyaknya penduduk laki-laki dan penduduk perempuan disuatu daerah pada waktu tertentu;
15. **Mobilitas Penduduk Permanen (migrasi)** adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif (migrasi internal) atau batas politik/negara (migrasi internasional);
16. **Penduduk Musiman** merupakan salah satu jenis mobilitas penduduk non permanen yang bekerja tidak pada daerah domisilinya dan menetap dalam kurun waktu lebih dari satu hari tetapi kurang dari satu tahun dan dilakukan secara berulang;
17. **Mobilitas Penduduk Pulang-Balik atau Pulang-Pergi (commuting)** adalah gerak penduduk dari daerah asal ke daerah tujuan dalam batas waktu tertentu dan kembali ke daerah asal pada hari yang sama;



18. **Angka Migrasi Masuk** adalah banyaknya migrasi masuk disetiap seribu penduduk dalam satu tahun;
19. **Angka Migrasi Keluar** adalah banyaknya migrasi keluar di setiap seribu penduduk dalam satu tahun;
20. **Angka Migrasi Netto** adalah selisih banyaknya migrasi masuk dan keluar disetiap seribu penduduk dalam satu tahun;
21. **Angka Migrasi Bruto** adalah jumlah migrasi masuk (datang) dan jumlah migrasi keluar (pindah) disetiap seribu penduduk dalam satu tahun;
22. **Migrasi Kembali (return migration)** adalah banyaknya penduduk yang pada waktu diadakan pendataan bertempat tinggal di daerah yang sama dengan tempat lahir dan pernah bertempat tinggal di daerah yang berbeda;
23. **Migrasi Semasa Hidup (life time migration)** adalah bentuk migrasi dimana pada waktu diadakan pendataan tempat tinggal sekarang berbeda dengan tempat kelahirannya;
24. **Migrasi Risen (recent migration)** adalah bentuk migrasi melewati batas wilayah administrasi (desa/kecamatan/kabupaten/kota/provinsi) dimana pada waktu diadakan pendataan bertempat tinggal di daerah yang berbeda dengan tempat tinggal lima tahun yang lalu;
25. **Transmigrasi** adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi;
26. **Urbanisasi** adalah suatu proses bertambahnya konsentrasi penduduk di perkotaan dan atau proses perubahan suatu daerah perdesaan menjadi perkotaan, baik secara fisik maupun ukuran-ukuran spasial dan/atau bertambahnya fasilitas perkotaan, serta lembaga-lembaga sosial, maupun perilaku masyarakatnya;
27. **Penduduk Usia Kerja** adalah penduduk yang berusia 15 tahun sampai dengan 64 tahun;
28. **Penduduk yang Termasuk Angkatan Kerja** adalah penduduk usia kerja (15-64 tahun) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha;
29. **Penduduk yang Termasuk Bukan Angkatan Kerja** adalah penduduk usia kerja (15-64 tahun) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, dan pensiun;




30. **Bekerja** adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh penduduk dan disampaikan penduduk sebagai pekerjaannya pada saat melaporkan biodatanya kepada petugas registrasi penduduk di kelurahan/desa/dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
31. **Angka Partisipasi Angkatan Kerja** adalah proporsi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja;
32. **Mencari Pekerjaan atau Pengangguran Terbuka** adalah kegiatan seseorang yang tidak bekerja dan pada saat survei orang tersebut sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha;
33. **Sekolah** adalah kegiatan seseorang untuk bersekolah di sekolah formal, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tertinggi, termasuk pula kegiatan dari mereka yang sedang libur sekolah;
34. **Mengurus Rumah Tangga** adalah kegiatan seseorang yang mengurus rumah tangga tanpa mendapatkan upah, misalnya : ibu-ibu rumah tangga dan anaknya yang membantu rumah tangga; sebaliknya pembantu rumah tangga yang mendapat upah walaupun pekerjaannya mengurus rumah tangga dianggap bekerja;
35. **Kegiatan lainnya** adalah mereka yang melakukan suatu pekerjaan diluar jenis pekerjaannya yang telah ditetapkan;
36. **Pendidikan tertinggi yang Damatkan** adalah tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu tingkatan sekolah dengan mendapatkan tanda tamat (ijazah);
37. **Jenis Pekerjaan** adalah macam pekerjaan yang sedang dilakukan oleh penduduk;
38. **Status Pekerjaan** adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan;
39. **Pengangguran** adalah orang yang termasuk angkatan kerja, namun pada saat pendataan/survey atau sensus tidak bekerja dan sedang mencari kerja;
40. **Angka Pengangguran** adalah proporsi jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja;
41. **Bukan Angkatan Kerja** adalah penduduk usia 15 tahun kebawah dan penduduk berusia 64 tahun keatas;
42. **Lahir Hidup** adalah
  - a. suatu kelahiran bayi tanpa memperhitungkan lamanya didalam kandungan, dimana si bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan, misalnya ada nafas, ada denyut jantung atau denyut tali pusat atau gerakan otot;



- b. banyaknya kelahiran hidup dari sekelompok atau beberapa kelompok wanita selama masa reproduksinya;
43. **Lahir mati** adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu tanpa menunjukkan tanda -tanda kehidupan pada saat dilahirkan;
44. **Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)** adalah rata - rata banyaknya anak yang akan dimiliki seseorang wanita pada masa reproduksinya jika ia mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung;
45. **Kematian atau Mortalitas** menurut WHO adalah suatu peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup;
46. **Angka Kematian Bayi Baru Lahir** adalah banyaknya kematian baru lahir, usia kurang dari satu bulan (0-28 hari) pada suatu periode per 1.000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama;
47. **Angka Kematian Bayi Lepas Baru Lahir** adalah banyaknya kematian bayi lepas baru lahir (usia 1-11 bulan) pada suatu periode per 1.000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama;
48. **Angka Kematian Bayi / IMR** adalah banyaknya kematian bayi usia kurang dari satu tahun (9 -11 bulan) pada suatu periode per 1.000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama;
49. **Angka Kematian Ibu / MMR** adalah banyaknya kematian ibu pada waktu hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan per 100.000 kelahiran hidup, tanpa memandang lama dan tempat kelahiran yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya;
50. **Angka Kematian Kasar** adalah banyaknya kematian yang terjadi pada suatu tahun tertentu untuk setiap 1000 penduduk;
51. **Pengeluaran untuk makanan** adalah proporsi pengeluaran yang dipergunakan untuk mengkonsumsi makanan dibandingkan dengan total pengeluaran (makanan dan bukan makanan);
52. **Penduduk Melek Huruf** adalah penduduk yang berusia 15 tahun keatas yang telah bebas dari tiga buta, yaitu buta aksara, latin, dan angka;
53. **Buta Huruf** adalah penduduk yang berusia 15 tahun keatas yang belum bebas dari tiga buta, yaitu buta aksara, latin dan angka;



54. **Angka Partisipasi Total** adalah proporsi penduduk bersekolah menurut golongan umur sekolah yaitu umur 7-12,13-15,16-18, dan 19-24 tahun;
55. **Angka Partisipasi Murni/APM** adalah persentase jumlah peserta didik SD/Sederajat usia 7 -12 tahun, jumlah peserta didik SLTP/Sederajat usia 13-15 tahun, jumlah peserta didik SLTA/Sederajat usia 16 -18 tahun dan jumlah peserta didik PTN/PTS/Sederajat usia 19-24 tahun dibagi jumlah penduduk kelompok usia dari masing-masing jenjang pendidikan;
56. **Angka Partisipasi Kasar/APK** adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu;
57. **Angka Pertumbuhan Penduduk** adalah besaran persentase perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk pada waktu sebelumnya;
58. **Proporsi Penduduk** adalah jumlah dan informasi penduduk menurut pengelompokan tertentu, seperti umur dan jenis kelamin;
59. **Rasio Jenis Kelamin** adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dan banyaknya jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan;
60. **Piramida Penduduk** adalah gambar yang menunjukkan komposisi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin yang disajikan secara grafik berbentuk piramida;
61. **Rasio Ketergantungan atau Rasio Beban Tanggungan (Dependency Ratio)** adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia dibawah 15 tahun dan penduduk usia 65 tahun atau lebih) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15 -64 tahun). Rasio ketergantungan menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk produktif terhadap penduduk tidak produktif;
62. **Rasio Kepadatan Penduduk** adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk terhadap luas wilayah atau beberapa banyaknya penduduk per kilometer persegi pada periode tahun tertentu;

63. **Angka Perkawinan Kasar** adalah angka yang menunjukkan persentase penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun pada suatu tahun tertentu; 
64. **Angka Perkawinan Umum** adalah yang menunjukkan proporsi penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas pada suatu tahun tertentu;
65. **Angka Perceraian Kasar** adalah yang menunjukkan jumlah perceraian per 1000 penduduk terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun untuk suatu tahun tertentu;
66. **Angka Perceraian Umum** adalah angka yang menunjukkan jumlah penduduk yang berstatus cerai hidup terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun keatas (penduduk yang terkena resiko perceraian) pada suatu tahun tertentu.



## BAB II GAMBARAN UMUM POTENSI DAERAH

### A. Letak Geografis

Provinsi Kalimantan Utara memiliki luas  $\pm 75.467,70$  km<sup>2</sup>, terdiri atas 87% darat dan 13% dari perairan laut, serta memiliki panjang garis perbatasan 1.038 km yang berbatasan dengan Negeri Serawak dan Negeri Sabah Negara Malaysia. Secara geo-politik letak tersebut menempatkan posisi pertahanan dan keamanan negara yang sangat strategis terus diupayakan oleh pemerintah sebagai implementasi beradan terdepan NKRI. Provinsi ini juga terletak pada posisi antara 114° 35' 22" – 118° 03' 00" Bujur Timur dan antara 1° 21' 36" - 4° 24' 55" Lintang Utara, dan merupakan provinsi ke-34 dari 38 provinsi, serta berada di jalur pelayaran internasional (*Alur Laut Kepulauan Indonesia/Archipelagic Sea Lanes Passage*) II yang merupakan pintu keluar/*outlet* ke Asia Pasifik.<sup>1</sup> Provinsi Kalimantan Utara berbatasan dengan :

Sebelah Utara	: Negara Sabah (Malaysia)
Sebelah Timur	: Laut Sulawesi
Sebelah Selatan	: Provinsi Kalimantan Timur (Kab. Kutai Barat, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Berau)
Sebelah Barat	: Negara Sarawak (Malaysia)

**Tabel 2.1: Keadaan Geografi Provinsi Kalimantan Utara**

Kode Wilayah	Kabupaten / Kota	Ibu Kota	Luas Total Area (Km <sup>2</sup> )	Persentase terhadap Luas Provinsi (%)
6501	Bulungan	Tanjung Selor	13.925,72	18,45
6502	Malinau	Malinau	42.620,70	56,48
6503	Nunukan	Nunukan	13.841,90	18,34
6504	Tana Tidung	Tideng Pale	4.828,58	6,40
6571	Tarakan	Tarakan	250,80	0,33
<b>6500</b>	<b>Kalimantan Utara</b>	<b>Tanjung Selor</b>	<b>75.467,70</b>	<b>100</b>

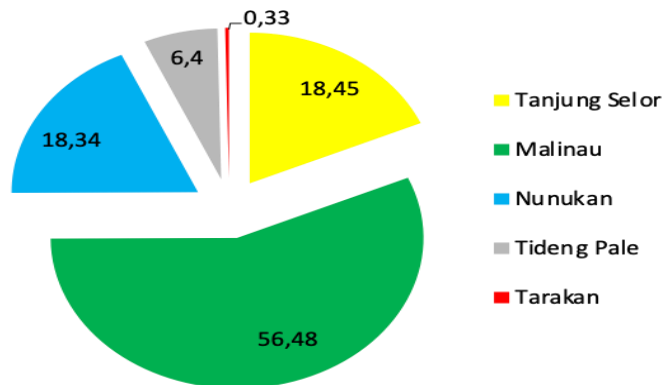
Sumber: Kaltara Dalam Angka 2020

Malinau adalah kabupaten dengan wilayah terluas di Provinsi Kalimantan Utara (56%). Sedangkan wilayah terkecil adalah Kota Tarakan (0,33%). Kondisi geografis Provinsi Kalimantan Utara berupa pegunungan dan kepulauan. Pulau-pulau kecil di Provinsi Kalimantan Utara terletak di Kabupaten Nunukan, Bulungan, Tana Tidung dan Kota Tarakan. Jumlah pulau-pulau kecil di Provinsi Kalimantan Utara adalah 161 pulau dengan luas total mencapai 3.597 Km<sup>2</sup>. Pulau-pulau terbesar yang dimiliki Kalimantan

<sup>1</sup> Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang pembentukan Provinsi Kalimantan Utara

Utara yaitu : Pulau Tarakan (249 Km<sup>2</sup>), Pulau Sebatik (245 Km<sup>2</sup>), Pulau Nunukan (233 Km<sup>2</sup>), Pulau Tanah Merah (352 Km<sup>2</sup>). Panjang garis pantai provinsi ini adalah 3.955 Km, 908 Km (23%) merupakan garis pantai daratan, dan 3.047 Km (77%) merupakan garis pantai kepulauan.

**Gambar 2.1 Diagram Luas Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara**



Sumber: Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 2011

Secara administratif, Provinsi Kalimantan Utara dibagi menjadi 4 kabupaten (Malinau, Bulungan, Tanatidung, Nunukan) dan 1 kota (Tarakan) dengan Tanjung Selor sebagai ibukota provinsi.<sup>2</sup> Wilayah administrasi merupakan wilayah yang batasnya ditentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan atau politik, seperti provinsi, kabupaten, kecamatan, desa atau kelurahan sebagaimana detailnya disajikan pada tabel 2.2.

**Tabel 2.2: Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Utara**

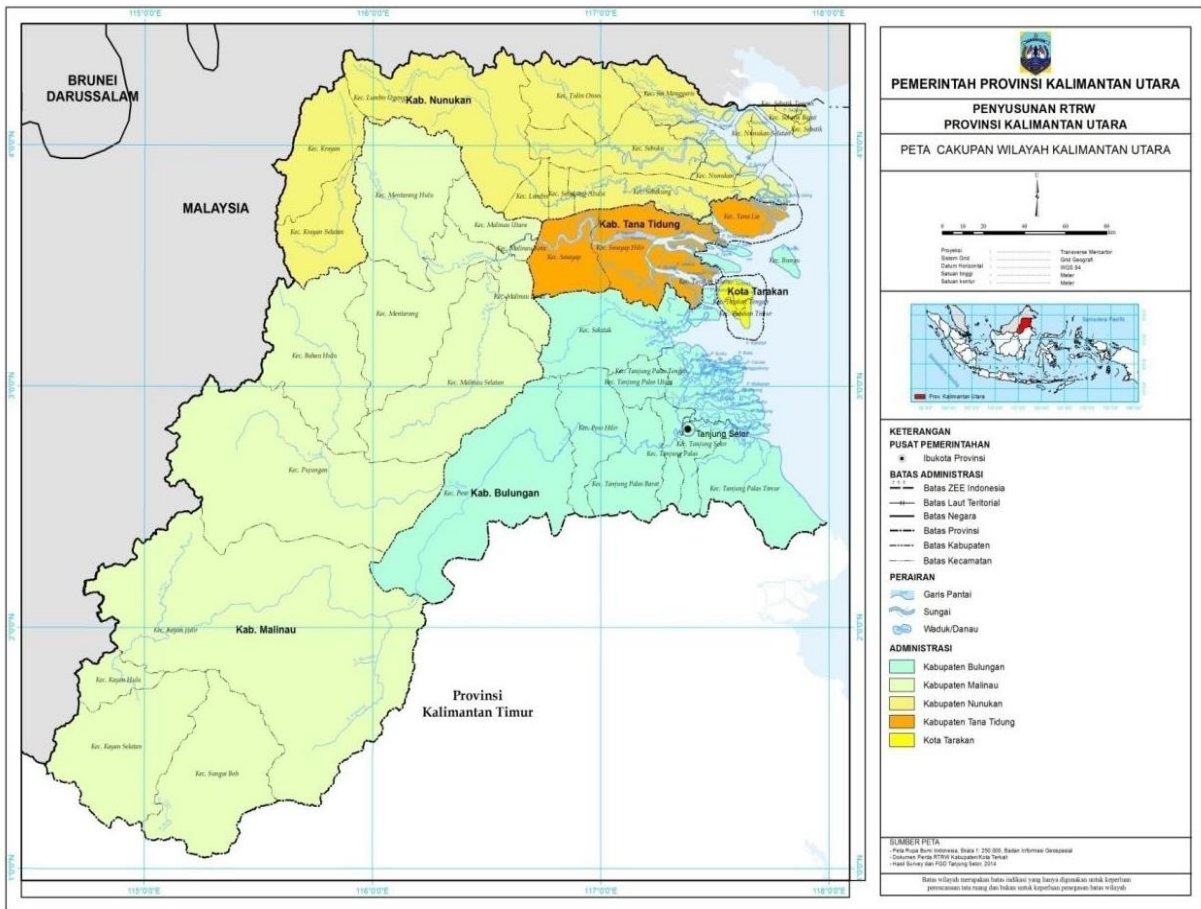
Kode Wilayah	Kabupaten / Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
6501	Bulungan	10	74	7
6502	Malinau	15	109	-
6503	Nunukan	21	232	8
6504	Tana Tidung	5	32	-
6571	Tarakan	4	0	20
<b>6500</b>	<b>Kalimantan Utara</b>	<b>55</b>	<b>447</b>	<b>35</b>

Sumber: Kepmendagri Nomor-146.1-4717 Tahun 2020  
Tentang Penetapan Nama Kode dan Jumlah Desa Seluruh Indonesia

<sup>2</sup> Tanjungseler saat ini masih berupa kecamatan di dalam wilayah Kabupaten Bulungan. Di maa depan, Tanjungseler akan diproyeksikan menjadi kota administratif mandiri.



Gambar 2.2 Peta Cakupan Wilayah Provinsi Kalimantan Utara



Sumber: RTRW Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037

## B. Kondisi Topografi

Topografi adalah perbedaan tinggi atau bentuk wilayah suatu daerah, termasuk didalamnya perbedaan kemiringan lereng, panjang lereng, bentuk lereng, dan posisi lereng.<sup>3</sup> Topografi juga merupakan istilah luas yang digunakan untuk menggambarkan studi terperinci tentang permukaan bumi, termasuk perubahan pada permukaan seperti pegunungan dan lembah serta fitur lainnya seperti sungai dan jalan. Kondisi topografi adalah elemen dasar suatu wilayah untuk mengetahui karakter fisik suatu daerah. Karakteristik fisik akan mempengaruhi pola dan jenis pembangunan yang akan diterapkan di wilayah tersebut. Kemiringan lereng dan ketinggian dari permukaan air laut merupakan indikator untuk mengetahui kondisi topografi di suatu daerah. Berikut ini adalah kondisi luas wilayah menurut kelas ketinggian dari permukaan laut dan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara

<sup>3</sup> Topografi dalam proses pembentukan tanah mempengaruhi: 1) jumlah air hujan yang meresap atau ditahan oleh tanah; 2) dalamnya air tanah; 3) besarnya erosi; 4) arah gerakan air berikut bahan terlarut di dalamnya dari satu tempat ke tempat lain. Daud S. Saribun, *Pengaruh Jenis Penggunaan Lahan dan Kelas Lereng Terhadap Bobot Isi, Porositas Total, dan Kadar Air Tanah Pada Sub-Das Cikabpudung Hulu*, Laporan Penelitian, Universitas Padjajaran, 2007



Tabel 2.3: Kelas Ketinggian dari Permukaan Laut Provinsi Kalimantan Utara

Kode Wilayah	Kabupaten / Kota	Kelas Ketinggian					
		0-7 m	7-25 m	25-100 m	100-500 m	500-1000 m	>1000m
6501	Bulungan	213.561	249.257	220.119	531.364	193.172	273.749
6502	Malinau	11.687	77.937	532.349	831.204	2.258.433	151.317
6503	Nunukan	174.434	138.156	199.312	115.112	284.981	269.467
6504	Tana Tidung	11.034	246.733	51.029	22	302	-
6571	Tarakan	6.920	18.160	-	-	-	-
<b>6500</b>	<b>Kalimantan Utara</b>	<b>417.636</b>	<b>730.243</b>	<b>1.002.809</b>	<b>1.477.702</b>	<b>2.736.888</b>	<b>694.533</b>

Sumber: Kaltara Dalam Angka 2020

Hampir setengah dari total luas wilayah Kalimantan Utara memiliki kelas ketinggian antara 500-1.000 meter di atas permukaan laut (38,77 persen), hanya sekitar 5,92 persen yang memiliki kelas ketinggian 0-7 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah Kabupaten Bulungan berada pada ketinggian 100-500 meter di atas permukaan laut (31,61 persen). Kabupaten Malinau dan Nunukan didominasi oleh wilayah yang berada di kelas ketinggian 500-1.000 meter di atas permukaan laut, yaitu masing-masing 58,46 persen dan 24,12 persen. Kabupaten Tana Tidung didominasi oleh wilayah dengan ketinggian 7- 25 meter di atas permukaan laut dan hanya sebagian kecil yang memiliki ketinggian 100-500 meter di atas permukaan laut (0,01 persen). Sementara itu, Kota Tarakan didominasi oleh kelas ketinggian 7-25 meter di atas permukaan laut (72,41 persen), sementara sisanya (27,59 persen) berada pada ketinggian 0-7 meter di atas permukaan laut.

Tabel 2.4: Kelas Kemiringan Lereng di Provinsi Kalimantan Utara (Ha)

Kode Wilayah	Kabupaten / Kota	Kelas Lereng/Kemiringan				Jumlah (Ha)
		0-2% (Datar)	2-15% (Sangat Landai - Landai / Bergelombang)	15-40% (Agak Curam-Curam)	>40% (Sangat Curam-Terjal)	
6501	Bulungan	319.440	185.018	216.359	590.017	1.310.834
6502	Malinau	13.500	72.500	147.177	3.745.417	3.978.594
6503	Nunukan	287.739	6.039	81.639	990.129	1.365.546
6504	Tana Tidung	134.202	159.013	15.573	22.052	330.840
6571	Tarakan	6.154	1.984	17.044	0	25.182
<b>6500</b>	<b>Kalimantan Utara</b>	<b>761.035</b>	<b>424.554</b>	<b>477.792</b>	<b>5.347.615</b>	<b>7.010.996</b>



Persentase (%)	10,85	6,06	6,81	76,27	100
----------------	-------	------	------	-------	-----

Sumber: Kaltara Dalam Angka 2020

Suatu permukaan tanah yang miring dengan sudut tertentu terhadap bidang horizontal disebut sebagai lereng. Lereng ini dapat terjadi secara alamiah atau buatan.<sup>4</sup> Kemiringan lereng menunjukkan besarnya sudut lereng dalam persen atau derajat. Dua titik yang berjarak horizontal 100 meter yang mempunyai selisih tinggi 10 meter membentuk lereng 10 persen. Kecuraman lereng 100 persen setara dengan kecuraman 45 derajat. Sebagian besar wilayah di Provinsi Kalimantan Utara didominasi oleh wilayah dengan kemiringan lereng >40%, dengan persentase mencapai 76,27% dari luas wilayah provinsi ini (5.347.615 Ha). Kondisi topografi Kabupaten Malinau, Nunukan, dan Bulungan didominasi oleh kemiringan lereng di atas 40%, khususnya wilayah bagian tengah dan barat yang sebagian besar merupakan hulu sungai. Kabupaten Tana Tidung didominasi oleh kemiringan lereng 0-2% dan 2-15%. Sedangkan Kota Tarakan didominasi oleh wilayah yang agak curam 15-40%. Pegunungan atau perbukitan yang tersebar di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu sebagai berikut :

- Kabupaten Bulungan, yaitu Gunung/Bukit Brun, Ubut Lebung, Sombang, Bekayan, Sondong, Gunung Putih, Mara, Sekatak, Kelu, Kundas, Setarat, Takin, Silid, Rian, Aung, Jatu;
- Kabupaten Malinau, yaitu gunung/bukit Laga Tumu, Murjake, Bukit Kalung, Bukit Rapat, Bulu, Kujan, Kelembit, Bukit Lalau, Bakayan, dan Klawit; dan
- Kabupaten Nunukan, yaitu Gunung/Bukit Krayan, Tidaliputu, Pawan, Bukit Titeh, Tudadaun, Depuan, Pangodam, Budukusia, Tungkam, Lelangit, Ruanting, Batu Maja, Pempuanang, Mansel, Ambalia, Muluk, Batu Bengalun, Klawit (Kalimantan Utara Dalam Angka Tahun 2015).
- Sementara wilayah pantai, rawa pasang surut, daratan aluvial, jalur endapan, dan sungai berada di kawasan pesisir timur, sedangkan wilayah dataran dan lembah aluvial umumnya mengikuti arah aliran sungai.

Kenapa pembahasan kemiringan lereng ini penting? Karena dalam proses pembangunan, tidak menutup kemungkinan adanya penggunaan lahan dengan kemiringan tertentu. Pembangunan di atas tanah lereng memiliki resiko tinggi terhadap bahaya longsor. Faktor yang harus diperhatikan dalam menghindari kelongsoran adalah kemiringan lereng itu sendiri.<sup>5</sup> Selain itu, pemilihan bentuk dan dimensi pondasi juga merupakan faktor yang perlu diperhatikan guna memperoleh daya dukung yang diinginkan.

<sup>4</sup> Lereng yang terbentuk secara alamiah misalnya lereng bukit dan tebing sungai, sedangkan lereng buatan manusia antara lain yaitu galian dan timbunan untuk membuat jalan raya dan jalan kereta api, bendungan, tanggul sungai dan kanal serta tambang terbuka (Deden Rusdian Maulana, *Mekanika Tanah II*, makalah, Universitas Muhammadiyah Tangerang, 2014)

<sup>5</sup> Longsor adalah pergerakan material tanah seperti tanah, air dan batuan yang kemudian menuruni lereng yang terjadi apabila faktor pendorong lebih besar dibandingkan dengan faktor penahannya. Faktor penahan merupakan faktor yang ada di dalam material tanah itu sendiri (kekuatan tanah dan struktur batuan yang ada di dalamnya), sedangkan faktor pendorong adalah faktor yang memicu terjadinya material di dalam tanah bergerak sehingga menyebabkan tanah longsor. Tanah longsor ini akan sangat mudah terjadi apabila faktor pendorong di

### C. Kondisi Iklim

Iklim adalah keadaan cuaca suatu wilayah dalam jangka waktu yang panjang, biasanya 11-30 tahun. Indonesia secara keseluruhan dikelilingi oleh Samudra dan Lautan, sehingga memiliki iklim tropis basah. Secara umum, kondisi iklim Provinsi Kalimantan Utara hampir sama dengan wilayah lain di Indonesia yaitu beriklim tropis,<sup>6</sup> dengan ciri-ciri: (1) Setiap tahunnya suhu udara akan cukup tinggi, karena memperoleh sinar matahari yang cenderung vertikal; (2) Suhu udara rata-rata tidak kurang dari 18 derajat celcius bahkan sampai 27 derajat celcius. Saat mengalami musim hujan dan musim kemarau pun tidak memiliki perbedaan berarti. (3) Dalam setiap pergantian hari adalah 24 jam dimana siang dan malam hari masing-masing memiliki waktu selama 12 jam; (4) Wilayah iklim tropis basah membuat suatu wilayah ditumbuhi banyak tanaman hijau yang lebat. Wilayah ini mampu mempengaruhi perubahan iklim yang sangat signifikan.<sup>7</sup>

Kondisi iklim suatu wilayah berpengaruh pada aspek sosial, ekonomi, dan kultural masyarakat setempat, sehingga corak kehidupan tiap wilayah juga pasti akan berbeda. Di bidang agraris (pertanian dan perkebunan), iklim punya pengaruh yang sangat besar. Banyak petani dan pekebun di Kalimantan Utara yang mengandalkan iklim dalam bercocok tanam, misalnya tanaman yang cocok ditanam oleh petani/pekebun di musim hujan adalah padi, sawi, kubis, caisim, bayam, kangkung, terong, kacang panjang, timun, semangka, melon. Mereka biasanya juga memperhitungkan bulan jatuhnya panen agar tepat waktu. Tanaman yang cocok ditanam saat musim kemarau adalah jagung, ubi, ketela, tomat, kentang, kacang tanah, kacang hijau, labu. Jenis tanaman umbi-umbian justru menghasilkan kualitas umbi yang baik apabila dipanen saat musim kemarau. Sedangkan tanaman yang cocok ditanam di musim pancaroba (peralihan) diantaranya adalah padi, cabai, tomat, terong, timun, semangka, melon, umbi-umbian, dan sayur-sayuran.

Kondisi iklim Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2022 memiliki rata-rata suhu udara yaitu 26,53°C turun 0,87°C dibandingkan rata-rata tahun 2021. Rata-rata jumlah hari hujan per bulan di Provinsi Kalimantan Utara yaitu 19,52 hari per bulan. Naik 1,38 hari jika dibandingkan tahun 2021.<sup>8</sup>

---

lereng tanah lebih besar dibandingkan dengan faktor penahan yang ada. <https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/geomorfologi/jenis-jenis-longsor>, diakses pada 5 Maret 2022 pukul 15.36 WITA

<sup>6</sup> Letak provinsi ini berada di utara lintang 0°. Suhu udara maksimal dengan 34,40°C dan minimal yaitu 21,00°C. Kondisi rata-rata kelembapan udara mencapai angka 78% serta memiliki tekanan udara rata-rata 920,2 mb. Untuk keadaan kecepatan angin terdapat dalam *range* yang tidak fluktuatif, yaitu 3-5 knot dari tahun 2013-2017. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret dengan 412 mm, paling rendah terjadi dengan 181 mm. Rata-rata penyinaran matahari cukup fluktuatif dengan rata-rata terjadi 37% penyinaran. *Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Kalimantan Utara 2020*, Disdukcapil Kalimantan Utara tahun 2021

<sup>7</sup> <https://www.geologinesia.com/2018/05/mengenal-ciri-ciri-iklim-tropis.html>, diakses pada 6 Maret 2022 pukul 11.33 WITA

<sup>8</sup> Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kabupaten Bulungan, Nunukan, dan Kota Tarakan Data melalui [kaltara.bps.go.id/indicator/151/61/1/rata-rata-suhu-udara-menurut-bulan-dan-stasiun.html](http://kaltara.bps.go.id/indicator/151/61/1/rata-rata-suhu-udara-menurut-bulan-dan-stasiun.html)



#### D. Sumber Daya Air

Sesuai UU No.7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi meliputi :

- a. Menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
- b. Menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
- c. Menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
- d. Menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
- e. Melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
- f. Mengatur, menetapkan, dan memberi izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
- g. Mengatur, menetapkan, dan memberi rekomendasi teknis atas penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota;
- h. Membentuk dewan sumber daya air atau dengan nama lain di tingkat provinsi dan/atau pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
- i. Memfasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya air;
- j. Membantu kabupaten/kota pada wilayahnya dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat atas air;
- k. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota; dan
- l. Memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada pemerintah kabupaten/kota

Kalimantan Utara memiliki potensi sumber daya air yang sangat besar berupa air permukaan (aliran sungai, danau, rawa), air tanah, dan curah hujan yang tinggi. Potensi besar tersebut banyak dimanfaatkan untuk menunjang kehidupan masyarakat di provinsi ini. Daerah pegunungan yang terletak di bagian barat Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanatidung, dan Kabupaten Nunukan menjadi kawasan resapan air. Sedangkan kawasan tangkapan air terletak di bagian timur yang berupa dataran aluvial dan dataran fluvial.



Sungai adalah jalur transportasi dan sumber mata pencarian penting di Kalimantan Utara. Berdasarkan hasil inventarisasi jumlah sungai dalam dokumen SLHD tiap Kabupaten/Kota, Kalimantan Utara memiliki 123 sungai. Sungai Kayan menjadi yang terpanjang dengan panjang 576 Km. Sungai-sungai yang ada di wilayah ini antara lain adalah Sungai Kayan, Sungai Sesayap, Sungai Pimping, Sungai Bandan, Sungai Sekatak, Sungai Jelarai, Sungai Linuang Kayan, Sungai Betayau, Sungai Sembakung, Sungai Mandul, Sungai Semandak, Sungai Mintut, Sungai Manguli.

Kalimantan Utara hanya memiliki 1 danau yaitu Danau Kelaputan Mangkupadi yang terletak di Kabupaten Bulungan seluas 6 ha. Tercatat bahwa pada 2014, Kalimantan Utara memiliki 24 buah waduk dan 10 embung, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya terdapat 9 buah waduk dan 11 embung. Sedangkan situ (danau wisata) tidak terdapat di wilayah Kalimantan Utara. Waduk yang terluas dan volume paling besar di Provinsi Kalimantan Utara yaitu Waduk Irigasi Binusan di Kabupaten Nunukan dengan luas 3,6 ha dan volume 3000 m<sup>3</sup>. Sementara itu, Embung Air Baku Bolong di Kabupaten Nunukan menjadi embung terluas dan memiliki volume terbesar di provinsi ini. Luas embung tersebut yaitu 13,44 ha dengan volume 294.500 m<sup>3</sup>.

#### E. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Provinsi Kalimantan Utara didominasi oleh hutan, dengan luas mencapai 6.440.254 Ha atau sekitar 90,06% dari luas total wilayah. Luas pertanian tersebar sekitar 1,55% atau 110.751 Ha dari total luas wilayah. Penggunaan lahan hutan negara mendominasi di seluruh kabupaten, namun terbanyak terdapat di Kabupaten Malinau. Kondisi geografis provinsi ini yang didominasi oleh pegunungan dan perbukitan dengan kemiringan lereng yang curam, sebagian besar dimanfaatkan sebagai hutan lindung.<sup>9</sup> Penggunaan lahan permukiman hanya 19.090 Ha atau 0,27% dari total luas wilayah provinsi ini, dengan sebaran lahan permukiman paling tinggi berada di Kabupaten Nunukan.

**Tabel 2.5 Luas Wilayah Menurut Jenis Penggunaan Tanah di Provinsi Kalimantan Utara**

Kode Wilayah	Kabupaten / Kota	Jenis Penggunaan Tanah				
		Permukiman	Hutan	Pertanian	Pertambangan	Lainnya
6501	Bulungan	4.925	1.086.969	12.040	-	237.497
6502	Malinau	2.687	3.927.395	2.301	1.550	42.808
6503	Nunukan	6.609	1.167.764	87.254	-	166.952
6504	Tana Tidung	1.867	250.506	3.786	1.415	77.563
6571	Tarakan	3.002	7.620	5.370	5.914	47.363

<sup>9</sup> RPJMD Perubahan Kalimantan Utara 2016-2021



6500	Kalimantan Utara	19.090	6.440.254	110.751	8.879	572.183
Persentase (%)		0,27	90,06	1,55	0,12	8

Sumber: Kaltara Dalam Angka 2020

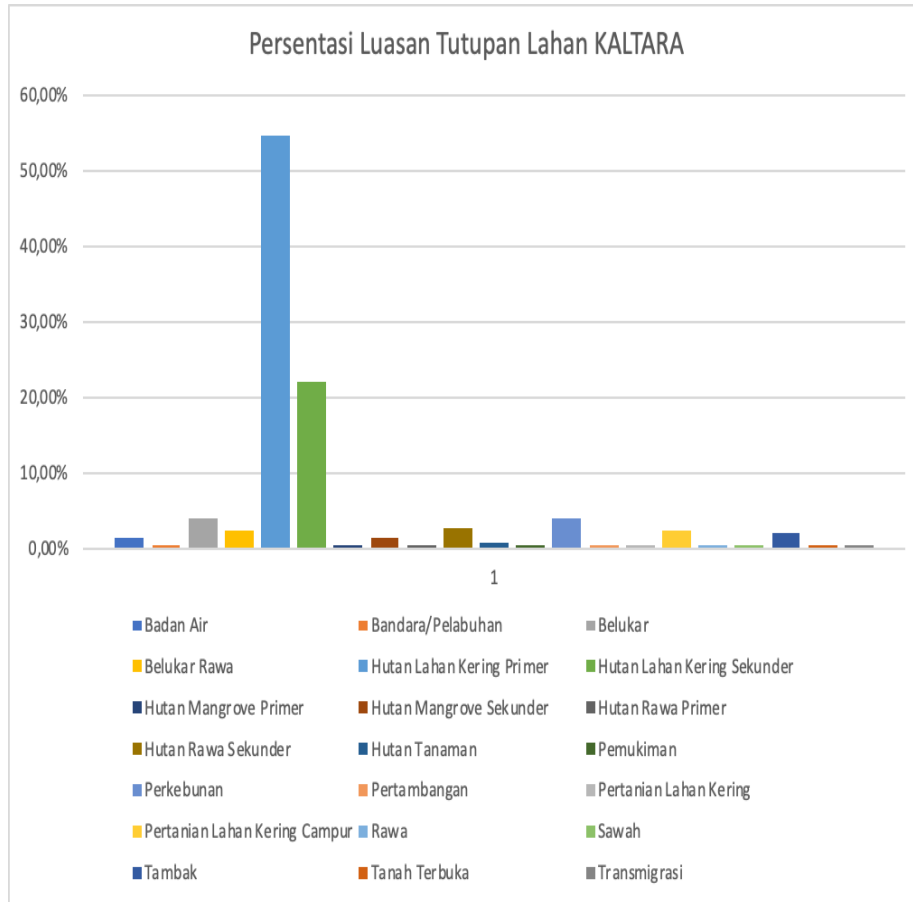
Tutupan hutan dan lahan di Kalimantan Utara tertuang dalam tabel 2.6

**Tabel 2.6: Tutupan Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019**

No	Jenis Tutupan Lahan	Luas (Ha)	Persentase
1	Badan Air	97057,22	1,39%
2	Bandara/Pelabuhan	284,0297	0,00%
3	Belukar	275571,8	3,96%
4	Belukar Rawa	156378,5	2,25%
5	Hutan Lahan Kering	3804171	54,65%
6	Hutan Lahan Kering	1539013	22,11%
7	Hutan Mangrove	26534,86	0,38%
No	Jenis Tutupan Lahan	Luas (Ha)	Persentase
8	Hutan Mangrove	97411,65	1,40%
9	Hutan Rawa Primer	6584,558	0,09%
10	Hutan Rawa Sekunder	181809,5	2,61%
11	Hutan Tanaman	59432,24	0,85%
12	Pemukiman	22834,34	0,33%
13	Perkebunan	286295,8	4,11%
14	Pertambangan	11135,65	0,16%
15	Pertanian Lahan	34188,81	0,49%
16	Pertanian Lahan	168413,5	2,42%
17	Rawa	1001,915	0,01%
18	Sawah	4073,779	0,06%
19	Tambak	151537,1	2,18%
20	Tanah Terbuka	31732,39	0,46%
21	Transmigrasi	4977,061	0,07%
<b>TOTAL</b>		<b>69.604,39</b>	<b>100%</b>

Sumber: Kaltara Dalam Angka 2020

Gambar 2.3 Persentase Luasan Tutupan Lahan Provinsi Kalimantan Utara (Ha)

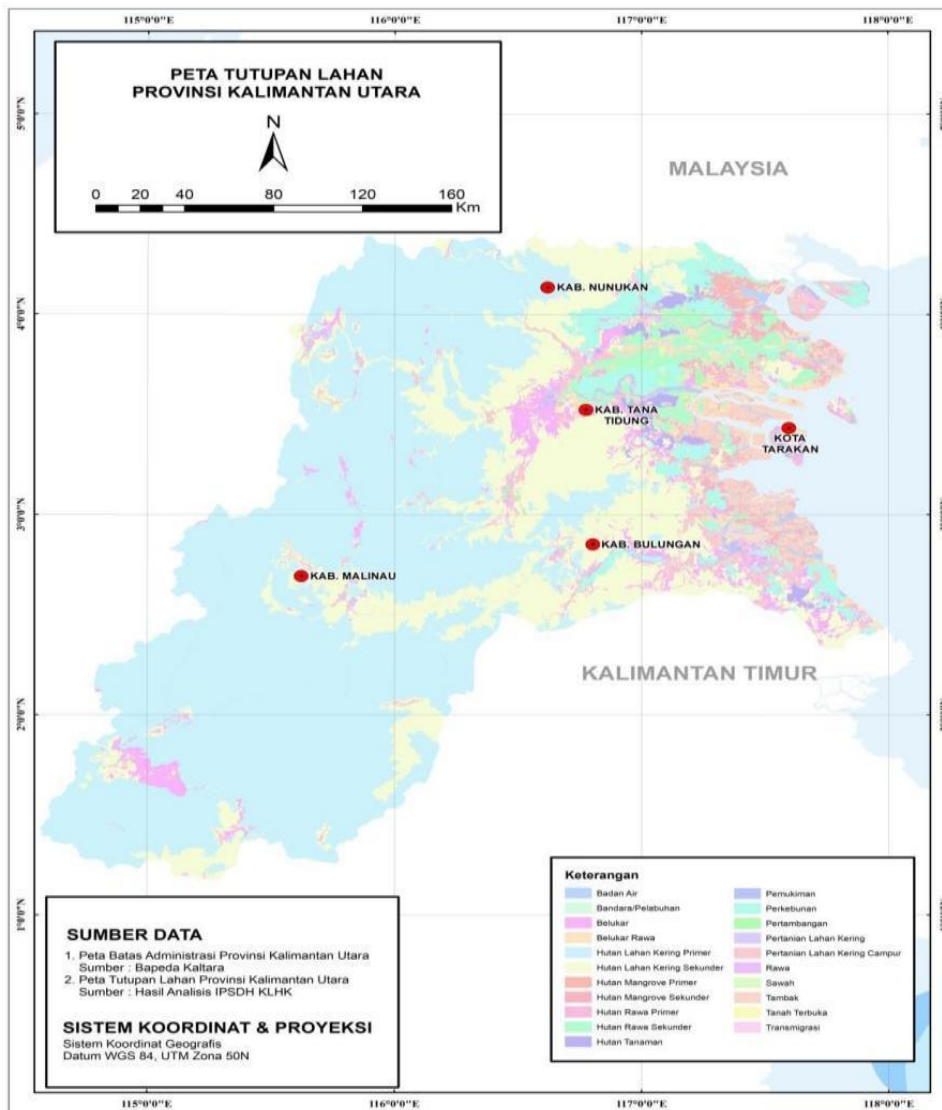


(Sumber: Ranwal RPJMD Kaltara 2021-2026)





Gambar 2.4 Peta Tutupan Lahan di Provinsi Kalimantan Utara



(Sumber: Ranwal RPJMD Kaltara 2021-2026)

Provinsi Kalimantan Utara telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2017-2037.

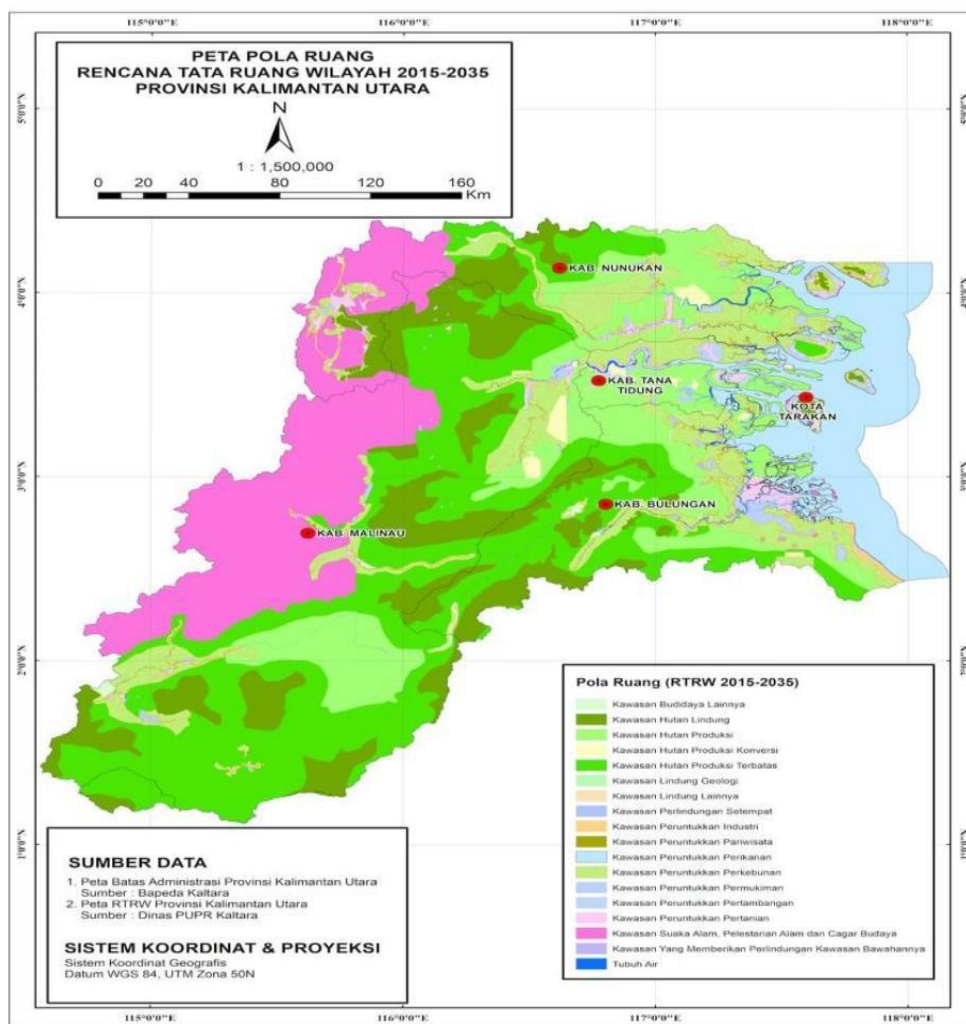
Tabel 2.7 : Pola Ruang Provinsi Kalimantan Utara

Kawasan	Luas (Ha)
Kawasan Budidaya Lainnya	21.638,42905
Kawasan Hutan Lindung	1.057.468,203
Kawasan Hutan Produksi	1.094.694,641
Kawasan Hutan Produksi Konversi	58.312,1584
Kawasan Hutan Produksi Terbatas	2.164.338,108
Kawasan Lindung Geologi	1.502,958097
Kawasan Lindung Lainnya	3.044,966489
Kawasan Perlindungan Setempat	792,4014031
Kawasan Peruntukkan Industri	13.113,03197
Kawasan Peruntukkan Pariwisata	1.904,029884

Kawasan	Luas (Ha)
Kawasan Peruntukkan Perikanan	822.238,1083
Kawasan Peruntukkan Perkebunan	967.969,7119
Kawasan Peruntukkan Permukiman	109.251,8084
Kawasan Peruntukkan Pertambangan	24.484,17212
Kawasan Peruntukkan Pertanian	97.997,18185
Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan	1.276.329,864
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan	4.311,188483
Tubuh Air	47.867,7763
<b>Total Luas</b>	<b>7.767.258,739</b>

Sumber: Kaltara Dalam Angka 2020

Gambar 2.5 Peta Pola Ruang dalam RTRW Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037



Sumber: Ranwal RPJMD Kaltara 2021-2026

Berdasarkan Peta Pola Ruang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara, wilayah pemanfaatan lahan yang paling luas adalah Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dengan luas 2.164.338,10 ha (27,86%) dan Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya dengan luas 1.276.329,86 ha (16,43%).



## F. Potensi Pengembangan Ekonomi Sektoral

### 1. Sektor Pertanian Tanaman Pangan

- a. Komoditas utama tanaman pangan Provinsi Kalimantan Utara adalah padi, jagung, dan ubi kayu. Potensi terbesar penghasil ketiga komoditas tersebut adalah Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Nunukan.
- b. Provinsi Kalimantan Utara memiliki lahan pertanian yang potensial yaitu dengan luas pada tahun 2022 sebesar 30.443 Ha (lahan sawah) dan 75.075 Ha (lahan kering)
- c. Jumlah produksi tanaman padi terbesar pada tahun 2022 terdapat di Kab. Bulungan dengan jumlah produksi 34.863 Ton dari total keseluruhan Provinsi Kalimantan Utara sebesar 73.375 Ton.
- d. Sedangkan Jumlah produksi tanaman ubi pada tahun 2022 terbesar di Kab. Nunukan dengan jumlah produksi 27.005 Ton dari total Provinsi Kalimantan Utara secara keseluruhan sebanyak 37.422 Ton.

### 2. Sektor Holtikultura

- a. Jenis tanaman sayur semusim unggulan di Provinsi Kalimantan Utara adalah cabe rawit, petai, ketimun. Dari data produksi komoditas sayur-sayuran yang memiliki keunggulan kompetitif adalah ketimun dengan produksi tanaman pada tahun 2018 sebesar 4.796 ton dan luas panen sebesar 299 Ha.
- b. Jenis tanaman buah-buahan semusim unggulan di Provinsi Kalimantan Utara adalah buah jeruk, durian/lai, papaya, dan pisang. Dari data produksi komoditas buah yang memiliki keunggulan kompetitif adalah buah pisang dengan produksi tanaman pada tahun 2018 sebesar 26.465 ton dengan jumlah tanaman sebesar 390.715 pohon.

### 3. Sektor Peternakan

- a. Komoditas utama sektor peternakan adalah sapi, kerbau, kambing, babi, ayam, dan itik.
- b. Jumlah populasi hewan ternak unggas Provinsi Kalimantan Utara tahun 2018 sebesar 5.889.154 ekor. Jumlah populasi komoditas terbesar yaitu ayam ras pedaging dan ayam kampung mencapai 99% dari total populasi hewan ternak unggas. Diikuti jumlah hasil populasi ternak itik sebesar 0,45 % dan unggas lainnya sebesar 0,55 %.
- c. Untuk hewan ternak lainnya, pada tahun 2018 populasi babi merupakan yang terbanyak yaitu 30.005 ekor, disusul sapi sebanyak 21.969 ekor, kambing 12.862 ekor dan kerbau sebanyak 3.783 ekor.

### 4. Sektor Perkebunan

- a. Jenis tanaman perkebunan yang dikembangkan di Provinsi Kalimantan Utara antara lain karet, kelapa, kopi, lada, aren, kakao, kelapa sawit, dan lain-lain. Namun yang menjadi komoditas



- unggulan hanya 4 jenis yaitu kakao dan kelapa (Prioritas I), serta kopi dan kelapa sawit (Prioritas II).
- b. Perkebunan kakao terdapat di semua kabupaten kecuali Kota Tarakan. Pada tahun 2018, luas perkebunan kakao seluas 2.702 ha. Dengan hasil produksi 1.201 Ton, terbesar terdapat di Kabupaten Nunukan mencapai 1.009 Ton.
  - c. Pada perkebunan kelapa, pada tahun 2018 luas perkebunan 1.255 ha. Dengan hasil produksi 506 Ton, dan daerah penghasil terbesar terdapat di Kabupaten Nunukan mencapai 307 Ton.
  - d. Perkebunan kopi pada tahun 2018 seluas 1.490 ha. Dengan hasil produksi 173 Ton. Daerah penghasil terbesar terdapat di Kabupaten Malinau sebanyak 140 Ton.
  - e. Perkebunan kelapa sawit terdapat di semua kabupaten kecuali Kota Tarakan. Pada tahun 2018, luas perkebunan kelapa sawit seluas 35.690 ha. Dengan Hasil produksi 79.485 Ton, terbesar terdapat di Kabupaten Nunukan mencapai 74.854 Ton.

## 5. Sektor Kehutanan

Kalimantan utara memiliki Kawasan hutan yang sangat luas. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.718/Menhut/II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Utara sekitar 5.629.110 ha atau 74,59 persen dari luas daratan Provinsi Kalimantan Utara ± 75.467,70 km<sup>2</sup>. Luasnya kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Utara merupakan potensi yang sangat besar bagi pemerintah Kalimantan Utara dalam pengelolaan hutan.

Dalam Pasal 46 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari.

Hutan negara ditetapkan pemerintah melalui UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan berdasarkan tiga fungsi pokok tersebut sebagai Hutan Lindung (HL), Hutan Konservasi (HK) yang terbagi atas Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Hutan Produksi yang terbagi atas Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan Hutan Produksi Konversi (HPK).

Pemerintah menetapkan HL, HK, HP, dan HPT sebagai hutan tetap yang hanya dapat dipergunakan untuk kegiatan kehutanan atau lewat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

HPK dan Area Penggunaan Lain (APL) dapat dicadangkan untuk kegiatan pemanfaatan lain, misalnya pertanian dan perkebunan yang kewenangan pelepasan kawasan ada di menteri untuk HPK dan bupati untuk APL. Hal tersebut terkait dengan rencana pengelolaan kawasan perbatasan, pengelolaan kawasan lindung, dan pengelolaan kawasan budidaya yang termasuk ke dalam ruang lingkup program-program kegiatan Heart of Borneo (HoB) atau Kawasan Jantung Borneo.

Tabel 2.8 Luas Kawasan Hutan Kalimantan Utara Hingga tahun 2021 (Ha)

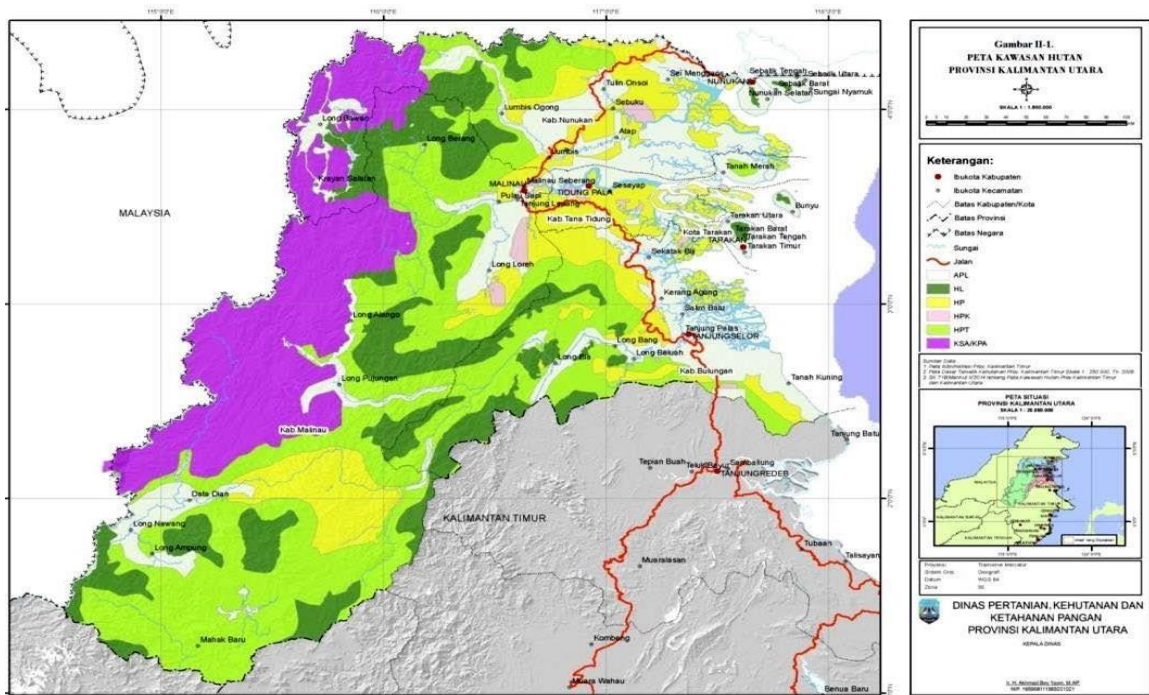
Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara

Berdasarkan Tabel 2.8, Kabupaten Malinau memiliki hutan terluas, yaitu 56,11% dari luas

Kode Wilayah	Kab/ Kota	Hutan Lindung	Suaka Alam dan Pelestarian Alam	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Dapat Dikonversi	Jumlah Luas Hutan & Perairan
6502	Malinau	69.6642.58	988.017.02	1.545.892.31	375.548.72	30.174.11	3.960.966.
6501	Bulungan	205.594.03	-	465.097.91	272.791.71	5.596.71	1.378.283.
6504	Tana Tidung	-	-	9.084.28	153.005.90	9.678.05	
6503	Nunukan	150.459.78	284.073.98	169.713.70	274.082.76	14.598.87	1.354.350.
6571	Tarakan	7.067.72	-	-	-	-	24.351.61
<b>Total</b>		<b>1.059.764.11</b>	<b>1.272.091.00</b>	<b>2.189.788.20</b>	<b>1075.429.09</b>	<b>60.047.74</b>	<b>7.059.251.</b>

seluruh kawasan hutan Kalimantan Utara. maupun kawasan hutannya (sekitar 48,38 %). Hutan Produksi Terbatas merupakan kawasan hutan yang paling luas di antara bentuk kawasan hutan lainnya yaitu sekitar 2.195.329 ha (sekitar 39 %).

Gambar 2.6 Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Utara



Sumber : Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) Kalimantan Utara

## 6. Sektor Perikanan

- Komoditas utama budidaya perikanan adalah ikan, udang dan rumput laut.
- Tahun 2018 jumlah budidaya perikanan yang terbesar adalah budidaya rumput laut sebesar 580.550 Ton, meningkat dari tahun 2017 sebesar 458.724 Ton.
- Luas lahan budidaya perikanan Provinsi Kaltara Tahun 2018 sebesar 1.340.165.675 m<sup>2</sup>. Daerah dengan luas lahan terbesar adalah kabupaten Bulungan dengan luas sebesar 775.943.404 m<sup>2</sup>



- d. Sedangkan untuk produksi perikanan tangkap laut tahun 2018 Provinsi Kaltara adalah sebesar 27.087 Ton, dengan Tarakan sebagai daerah dengan produksi terbesar yakni sebesar 16.105 Ton.

## 7. Sektor Industri

Pemerintah pusat telah menetapkan industri unggulan di Provinsi Kalimantan Utara adalah kakao. Jika dibandingkan dengan data perkebunan yang ada, komoditas kakao dan karet memang memiliki jumlah produksi yang tinggi. Potensi ini dapat dimanfaatkan untuk diolah menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah. Berdasarkan data, industri di bidang agro dan hasil hutan masih lebih kecil dibandingkan dengan industri logam, mesin, elektronika, dan aneka industri. Oleh karena itu, pengembangan industri agro perlu lebih dimaksimalkan. Produk unggulan UMKM di provinsi ini, antara lain meubel rotan, anyaman bambu, anyaman rotan, anyaman manik-manik, kue dan roti, bubuk kopi, pengolahan logam, pembuatan kapal, pengolahan rumput laut, minyak atsiri, beras Adan, ikan teri, udang kering, kerupuk durian, amplang, dan batik.

## 8. Sektor Pertambangan dan Energi

Pada tahun 2021, jumlah pelanggan listrik di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 180.227 pelanggan. Terjadi peningkatan sebesar 8,21 persen pada jumlah pelanggan listrik di Provinsi Kalimantan Utara bila dibandingkan dengan data tahun sebelumnya. Daya terpasang di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2021 mencapai 290.929.664 KWh. Produksi listrik di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 574.463.766 KWh, dengan jumlah listrik terjual sebesar 550.515.892,45 KWh, dipakai sendiri sebesar 1.767.070 KWh, dan susut/hilang mencapai 24.126.952 KWh.

Jika dilihat menurut kabupaten/ kota, Kota Tarakan memiliki jumlah pelanggan listrik terbesar di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu 37,14 persen dari total jumlah pelanggan di Provinsi Kalimantan Utara (66.930 pelanggan). Kabupaten Nunukan memiliki jumlah pelanggan listrik terbesar kedua, yaitu sebesar 24,78 persen (44.655 pelanggan). Kemudian diikuti oleh Kabupaten Bulungan yang memiliki jumlah pelanggan listrik sebesar 24,43 persen (44.029 pelanggan). (Provinsi Kalimantan Utara dalam Angka 2022).

## 9. Sektor Pariwisata

Objek pariwisata sendiri dapat didefinisikan sebagai kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk tujuan rekreasi, bisnis, atau pendidikan ke suatu daerah atau tempat yang menarik untuk dikunjungi.

Sebagai objek pariwisata, suatu tempat harus memiliki daya tarik atau keunikan yang dapat menarik minat wisatawan. Daya tarik tersebut dapat berupa keindahan alam, sejarah dan budaya, arsitektur, kegiatan olahraga, kuliner, dan masih banyak lagi. Sebagai contoh, Indonesia memiliki banyak objek pariwisata yang menarik seperti Bali dengan keindahan alam dan budayanya,



Yogyakarta dengan sejarah dan keunikan budayanya, dan Raja Ampat dengan keindahan alam bawah lautnya.

Objek pariwisata dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi suatu daerah. Pariwisata dapat membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, pariwisata juga dapat mempromosikan budaya dan kearifan lokal suatu daerah, serta meningkatkan kesadaran wisatawan akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

Namun, di sisi lain, pariwisata juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti kerusakan lingkungan, kerusakan budaya, dan ketidakseimbangan sosial ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaan objek pariwisata yang baik sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara manfaat dan dampak negatif dari pariwisata.

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan persebaran objek wisata di Kalimantan Utara :

**Tabel 2.9 Jumlah Objek Wisata Kalimantan Utara**

Kode Wilayah	Kabupaten / Kota	Jumlah
6571	Tarakan	34
6501	Bulungan	39
6502	Malinau	56
6503	Nunukan	51
6504	Tana Tidung	16
	<b>Total</b>	<b>196</b>

Sumber:  
Provinsi

Dinas Pariwisata  
Kalimantan Utara

Secara umum, objek wisata di Kalimantan Utara dapat dibagi menjadi 4, yaitu:

1. wisata budaya,
2. wisata alam,
3. wisata sejarah,
4. wisata alam dan
5. wisata religi

Pola pergerakan wisatawan yang menggunakan jalur udara, yaitu melalui: (a) Jakarta-Balikpapan-Tarakan; (b) Yogyakarta-Balikpapan-Tarakan; dan (c) Jakarta-Makassar-Balikpapan-Tarakan. Untuk jalur laut, telah dilengkapi dengan pelabuhan utama yaitu di Pelabuhan Tarakan (Kota Tarakan) dan Pelabuhan Tanjung Selor (Kabupaten Bulungan). Daya tarik wisata di Provinsi Kalimantan Utara, antara lain:

- a. Daya tarik wisata *Heart of Borneo (HoB)*.

*Heart of Borneo* merupakan keunikan untuk menunjukkan keberadaan hutan primer dan sekunder, luas dan tua di Asia Tenggara, yaitu di jantung Kalimantan di Taman Nasional Kayan Mentarang Kabupaten Malinau.

- b. Daya tarik wisata kawasan perkotaan Tarakan dan Kesultanan Bulungan.



Tarakan dikenal dengan minyak dan sejarah pendudukan negara Jepang, Kerajaan Bulungan merupakan salah satu kerajaan di Kalimantan Utara.

- c. Daya tarik wisata kawasan pesisir kepulauan (Nunukan, Bulungan Kepulauan, dan Tana Tidung Kepulauan)

Nunukan, Bulungan Kepulauan, dan Tana Tidung Kepulauan merupakan wilayah dengan potensi wisata yang beragam mulai dari pantai sampai dengan hutan hujan tropis.

- d. Daya tarik wisata kawasan pedalaman (pedalaman Bulungan dan Tana Tidung)

Daya tarik pariwisata ini dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu daya tarik wisata berbasis alam, wisata berbasis sejarah dan budaya, serta wisata berbasis kehidupan masyarakat yang lebih dominan.

- e. Kawasan Perbatasan Negara

Kawasan pengembangan pariwisata perbatasan negara yang ada di Kalimantan Utara, meliputi daerah perbatasan Malinau yang berbatasan langsung dengan Serawak (Malaysia Timur). Dalam pengembangan wisata di kawasan ini, didominasi variasi wisata kehidupan masyarakat dan wisata berbasis alam.

Adapun destinasi pariwisata unggulan di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu Pantai Amal, Wana Wisata Persemaian, Museum Rumah Bundar, Hutan Mangrove Tarakan, Air Terjun Martin Billa, Sungai Nyamuk, Long Bawan (Krayan), Gunung Rian, Batu Mapan, Hutan Lindung Sungai Sesayap, Pantai Kuning/Taman Laut Karang Tigau, dan Museum Kesultanan Bulungan.

## G. PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA

PDRB, atau Produk Domestik Regional Bruto, merupakan ukuran nilai semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. PDRB digunakan untuk mengukur tingkat aktivitas ekonomi suatu daerah atau negara.

Perilaku ekonomi masyarakat merujuk pada tindakan dan keputusan ekonomi yang diambil oleh individu-individu dalam suatu masyarakat. Perilaku ekonomi masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor sosial, budaya, kebijakan pemerintah, pendidikan, dan kondisi ekonomi secara umum.

PDRB dapat mempengaruhi perilaku ekonomi masyarakat dalam beberapa cara. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan PDRB yang meningkat cenderung memberikan dampak positif pada perilaku ekonomi masyarakat. Dalam situasi seperti itu, masyarakat cenderung memiliki lebih banyak sumber daya untuk diinvestasikan, lebih percaya diri untuk mengambil risiko ekonomi, dan memiliki daya beli yang lebih tinggi. Hal ini dapat mendorong konsumsi, investasi, dan kegiatan ekonomi lainnya.



Namun, perilaku ekonomi masyarakat juga dapat mempengaruhi PDRB. Keputusan konsumen untuk membeli atau tidak membeli barang dan jasa, investasi yang dilakukan oleh individu atau perusahaan, serta keputusan dalam hal tabungan dan pinjaman, semuanya berperan dalam membentuk aktivitas ekonomi suatu daerah. Jika masyarakat cenderung menyimpan uang mereka daripada menghabiskannya, hal ini dapat mengurangi permintaan dan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, jika masyarakat cenderung berbelanja dan berinvestasi, hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, perilaku ekonomi masyarakat juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak langsung terkait dengan PDRB. Misalnya, kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan pajak, subsidi, dan regulasi dapat mempengaruhi insentif ekonomi individu dalam mengambil keputusan. Faktor sosial dan budaya juga dapat memainkan peran penting dalam membentuk preferensi konsumen dan perilaku pengeluaran.

Dalam kesimpulannya, PDRB dan perilaku ekonomi masyarakat saling mempengaruhi. PDRB yang tinggi dapat mendorong perilaku ekonomi yang lebih aktif, sementara perilaku ekonomi masyarakat juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pemahaman tentang hubungan ini penting bagi para pengambil kebijakan dan ekonom untuk mengembangkan strategi yang mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

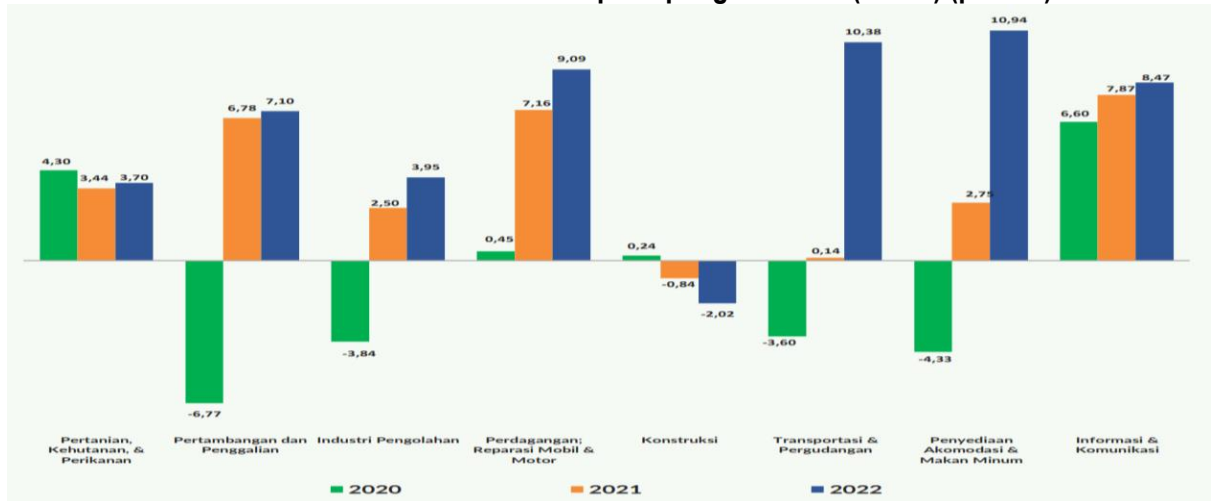
### **1. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022 (c-to-c)**

Ekonomi Kalimantan Utara tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 tumbuh 5,34 persen, hal ini disebabkan pertumbuhan hampir semua lapangan usaha selain konstruksi, dimana yang paling besar adalah lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh 10,94 persen; disusul Transportasi dan Pergudangan tumbuh 10,38 persen; Jasa Lainnya tumbuh 9,55 persen; Jasa Keuangan dan Asuransi tumbuh 9,15 persen; Perdagangan Besar Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh 9,09 persen dan Informasi dan Komunikasi tumbuh sebesar 8,47 persen. Lapangan Usaha lainnya tumbuh kurang dari 8,00 persen. Sedangkan lapangan usaha Konstruksi mengalami kontraksi sebesar 2,02 persen.

Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara tahun 2022, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 1,88 persen; diikuti Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 1,05 persen; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 0,66 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 0,63 persen; Industri Pengolahan sebesar 0,35 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 0,28 persen; . Sedangkan lapangan usaha lainnya kurang dari 0,2 persen.

Struktur perekonomian Kalimantan Utara menurut lapangan usaha tahun 2022 masih didominasi oleh empat lapangan usaha utama yaitu: Pertambangan dan Penggalian (36,42 persen); Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (14,06 persen); Perdagangan Besar-Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (11,11 persen); serta Konstruksi (10,82 persen), Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kalimantan Utara mencapai 72,42 persen.

**Gambar 2.7 Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (c-to-c) (persen)**

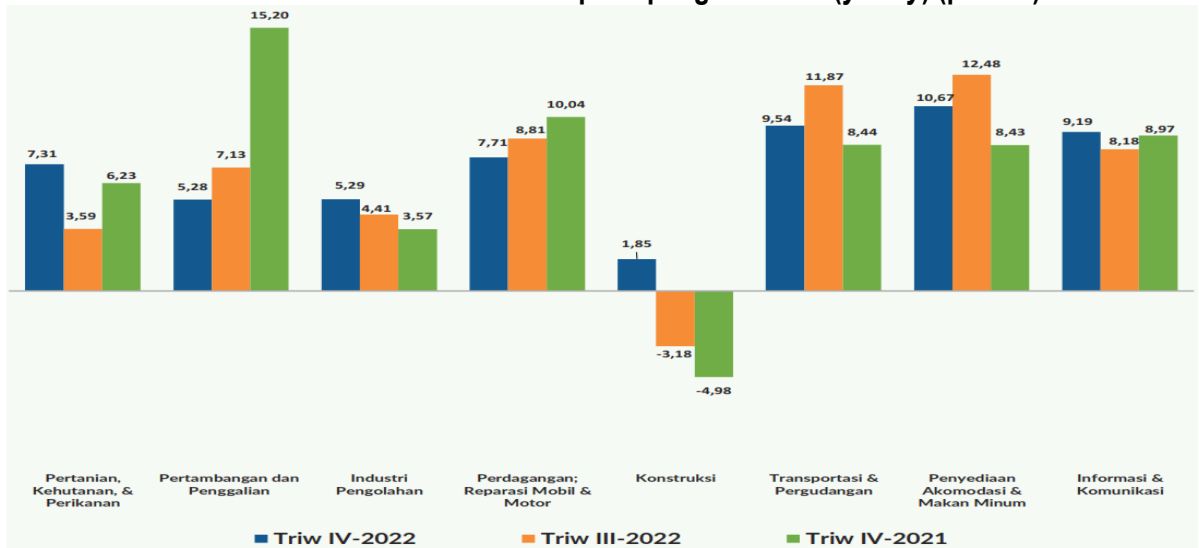


Sumber: BPS Prov. Kaltara

## 2. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV Tahun 2022 terhadap Triwulan IV Tahun 2021 (y-on-y)

Perekonomian Kalimantan Utara triwulan IV tahun 2022 dibanding triwulan IV tahun 2021 (y-on-y) tumbuh 6,17 persen. Pertumbuhan disebabkan oleh tumbuhnya hampir semua lapangan usaha selain Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dimana yang paling besar adalah lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi yang tumbuh 11,40 persen; disusul Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh 10,67 persen; Transportasi dan Pergudangan tumbuh 9,54 persen; Informasi dan Komunikasi tumbuh sebesar 9,19 persen; Jasa Lainnya tumbuh 8,93 persen; Adm. Pemerintahan tumbuh 8,68 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh 7,71 persen; Pengadaan Listrik dan Gas tumbuh 7,43 persen; dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tumbuh sebesar 7,31 persen. Lapangan Usaha lainnya tumbuh kurang dari 7,00 persen. Sedangkan lapangan usaha yang mengalami kontraksi adalah Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 1,03 persen.

Gambar 2.8 Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (y-on-y) (persen)

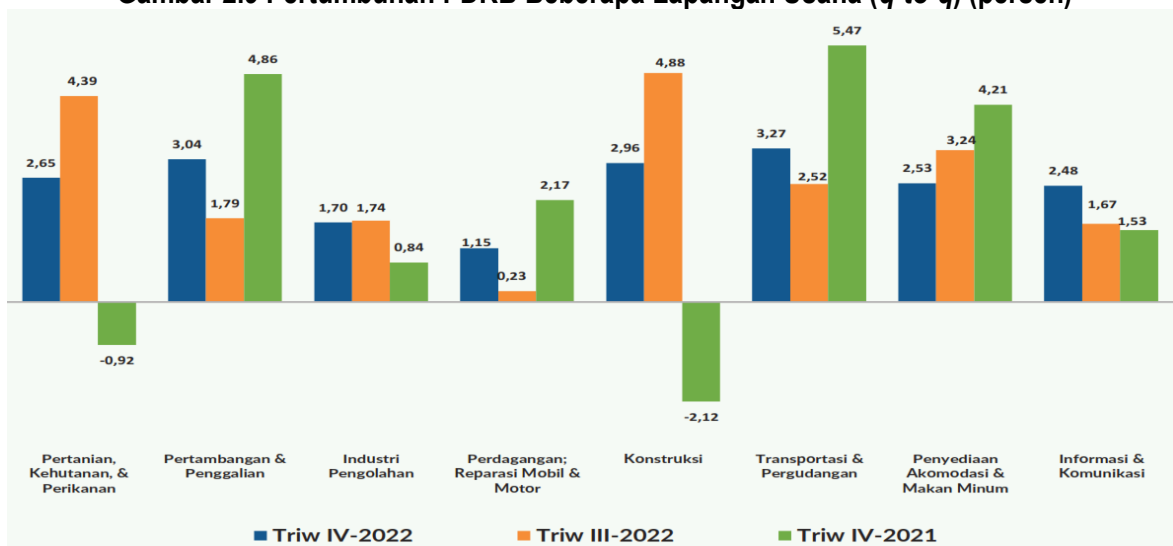


Sumber : BPS Prov. Kaltara

### 3. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2022 Terhadap Triwulan III-Tahun 2022 (q-to-q)

Ekonomi Kalimantan Utara triwulan IV-2022 dibanding triwulan sebelumnya (q-to-q) tumbuh sebesar 2,64 persen. Pertumbuhan terutama disebabkan oleh pertumbuhan semua lapangan Usaha, yang terbesar Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 6,04 persen. Disusul Adm. Pemerintahan tumbuh 5,37 persen; Transportasi dan Pergudangan tumbuh 3,27 persen; Pertambangan dan Penggalian tumbuh 3,04 persen; Konstruksi tumbuh sebesar 2,96 persen; Pertanian Kehutanan dan Perikanan tumbuh 2,65 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh 2,53 persen; Informasi dan Komunikasi tumbuh 2,48 persen; Jasa Pendidikan tumbuh 2,27 persen; dan Jasa Lainnya tumbuh 2,25 persen. Lapangan usaha lainnya tumbuh kurang dari 2,00 persen.

Gambar 2.9 Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (q-to-q) (persen)



Sumber : BPS Prov. Kaltara



**Tabel 2.10 Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen)**

Lapangan Usaha	Triw III-2022 Terhadap Triw II-2022 (q-to-q)	Triw IV-2022 Terhadap Triw III-2022 (q-to-q)	Triw III-2022 Terhadap Triw III-2021 (y-on-y)	Triw IV-2022 Terhadap Triw IV-2021 (y-on-y)	Laju Pertumbuhan 2022	Sumber Pertumbuhan 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,39	2,65	3,59	7,31	3,70	0,66
B. Pertambangan dan Penggalian	1,79	3,04	7,13	5,28	7,10	1,88
C. Industri Pengolahan	1,74	1,70	4,41	5,29	3,95	0,35
D. Pengadaan Listrik dan Gas	5,56	6,04	8,64	7,43	7,08	0,01
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,71	1,84	4,52	3,17	4,94	0,00
F. Konstruksi	4,88	2,96	-3,18	1,85	-2,02	-0,25
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,23	1,15	8,81	7,71	9,09	1,05
H. Transportasi dan Pergudangan	2,52	3,27	11,87	9,54	10,38	0,63
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,24	2,53	12,48	10,67	10,94	0,15
J. Informasi dan Komunikasi	1,67	2,48	8,18	9,19	8,47	0,28
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	6,62	1,54	12,36	11,40	9,15	0,11
L. Real Estat	0,09	1,28	4,41	4,16	4,76	0,04
M,N. Jasa Perusahaan	1,56	1,58	5,49	4,82	6,40	0,02
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,35	5,37	5,69	8,68	3,05	0,15
P. Jasa Pendidikan	1,08	2,27	7,52	6,06	6,69	0,18
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,19	0,90	0,22	-1,03	1,33	0,02
R,S,T,U. Jasa Lainnya	1,23	2,25	9,18	8,93	9,55	0,06
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>2,72</b>	<b>2,64</b>	<b>5,44</b>	<b>6,17</b>	<b>5,34</b>	<b>5,34</b>
<b>Produk Domestik Regional Bruto<sup>®</sup></b>	<b>2,78</b>	<b>2,68</b>	<b>5,61</b>	<b>6,34</b>	<b>5,49</b>	<b>5,32</b>

@ : Tanpa Migas

Sumber : BPS Prov. Kaltara

Catatan:

*q-to-q* : PDRB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya

*y-on-y* : PDRB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya

*c-to-c* : PDRB atas dasar harga konstan kumulatif sampai dengan triwulan dibandingkan periode kumulatif yang sama pada tahun sebelumnya



**Tabel 2.11 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah)**

Lapangan Usaha	Harga Berlaku			Konstan 2010		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	16.535,7	18.085,2	19.507,5	10.925,6	11.301,5	11.719,3
B. Pertambangan dan Penggalian	25.571,6	29.547,8	50.527,1	15.664,2	16.725,8	17.913,5
C. Industri Pengolahan	9.209,4	9.924,9	10.781,2	5.413,5	5.548,9	5.768,3
D. Pengadaan Listrik dan Gas	58,7	61,5	69,2	44,3	46,8	50,1
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	63,0	67,9	73,2	42,9	43,8	46,0
F. Konstruksi	14.329,3	15.135,2	15.014,9	7.905,2	7.839,1	7.680,7
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12.232,1	13.857,6	15.408,3	6.799,6	7.286,8	7.949,3
H. Transportasi dan Pergudangan	6.782,3	6.979,9	8.706,2	3.820,9	3.826,1	4.223,3
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.537,5	1.665,8	1.904,3	858,3	882,0	978,4
J. Informasi dan Komunikasi	2.559,5	2.940,9	3.333,6	1.937,7	2.090,2	2.267,2
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.120,3	1.248,1	1.408,4	696,3	746,2	814,5
L. Real Estat	766,3	820,5	868,9	575,2	587,5	615,5
M,N. Jasa Perusahaan	226,9	245,0	267,8	145,9	149,0	158,6
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.977,6	5.192,7	5.530,7	3.163,8	3.171,7	3.268,5
P. Jasa Pendidikan	2.590,2	2.826,0	3.115,4	1.597,2	1.670,9	1.782,7
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.139,3	1.261,8	1.303,6	753,5	817,9	828,8
R,S,T,U. Jasa Lainnya	723,4	808,0	897,9	401,8	428,7	469,6
Produk Domestik Regional Bruto	100.423,2	110.668,9	138.718,2	60.746,2	63.163,0	66.534,4
Produk Domestik Regional Bruto <sup>@</sup>	97.290,8	107.265,2	134.505,1	58.852,0	61.213,7	64.571,4

@ : Tanpa Migas

Sumber: BPS Prov. Kaltara



Tabel 2.12 Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen)

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan 2010				Distribusi Atas Dasar Harga Berlaku			
	2020	2021	2022		2020	2021	2022	
			Dengan Migas & Batubara	Tanpa Migas & Batubara			Dengan Migas & Batubara	Tanpa Migas & Batubara
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,30	3,44	3,70	3,70	16,47	16,34	14,06	20,45
B. Pertambangan dan Penggalian	-6,77	6,78	7,10	6,58	25,46	26,70	36,42	7,57
C. Industri Pengolahan	-3,84	2,50	3,95	3,95	9,17	8,97	7,77	11,30
D. Pengadaan Listrik dan Gas	11,57	5,55	7,08	7,08	0,06	0,06	0,05	0,07
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,74	1,99	4,94	4,94	0,06	0,06	0,05	0,08
F. Konstruksi	0,24	-0,84	-2,02	-2,02	14,27	13,68	10,82	15,74
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,45	7,16	9,09	9,09	12,18	12,52	11,11	16,15
H. Transportasi dan Pergudangan	-3,60	0,14	10,38	10,38	6,75	6,31	6,28	9,12
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-4,33	2,75	10,94	10,94	1,53	1,51	1,37	2,00
J. Informasi dan Komunikasi	6,60	7,87	8,47	8,47	2,55	2,66	2,40	3,49
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,51	7,17	9,15	9,15	1,12	1,13	1,02	1,48
L. Real Estat	0,76	2,14	4,76	4,76	0,76	0,74	0,63	0,91
M,N. Jasa Perusahaan	-0,78	2,15	6,40	6,40	0,23	0,22	0,19	0,28
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,07	0,25	3,05	3,05	4,96	4,69	3,99	5,80
P. Jasa Pendidikan	6,20	4,61	6,69	6,69	2,58	2,55	2,25	3,27
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,05	8,55	1,33	1,33	1,13	1,14	0,94	1,37
R,S,T,U. Jasa Lainnya	9,97	6,68	9,55	9,55	0,72	0,73	0,65	0,94
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>-1,09</b>	<b>3,98</b>	<b>5,34</b>	<b>4,86</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS Prov. Kaltara

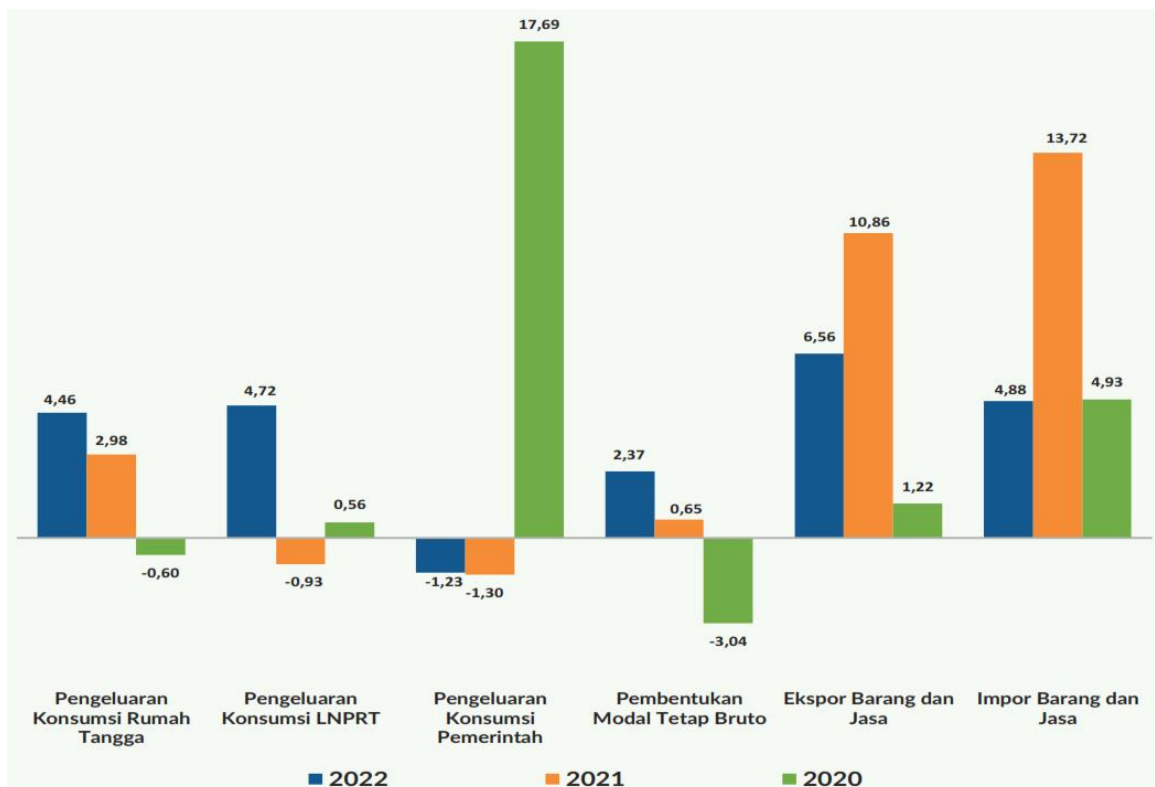
## H. PDRB MENURUT PENGELUARAN

### 1. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022 (c-to-c)

Ekonomi Kalimantan Utara sampai dengan tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,34 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua komponen PDRB Pengeluaran, kecuali Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (P-KP) yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,23 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 6,56 persen; diikuti oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 4,72 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 4,46 persen; dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 2,37 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa (yang merupakan faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran) mengalami pertumbuhan sebesar 4,88 persen.

Struktur PDRB Kalimantan Utara menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2022 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Kalimantan Utara masih didominasi oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 150,08 persen; Komponen PMTB sebesar 35,05 persen; Komponen PK-RT sebesar 12,97 persen; Komponen PK-P sebesar 8,17 persen; Komponen PK-LNPRT sebesar 0,86 persen; dan Komponen Perubahan Inventori sebesar 0,37 persen. Sementara komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 48,31 persen.

**Gambar 2.10 Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (c-to-c) (persen)**

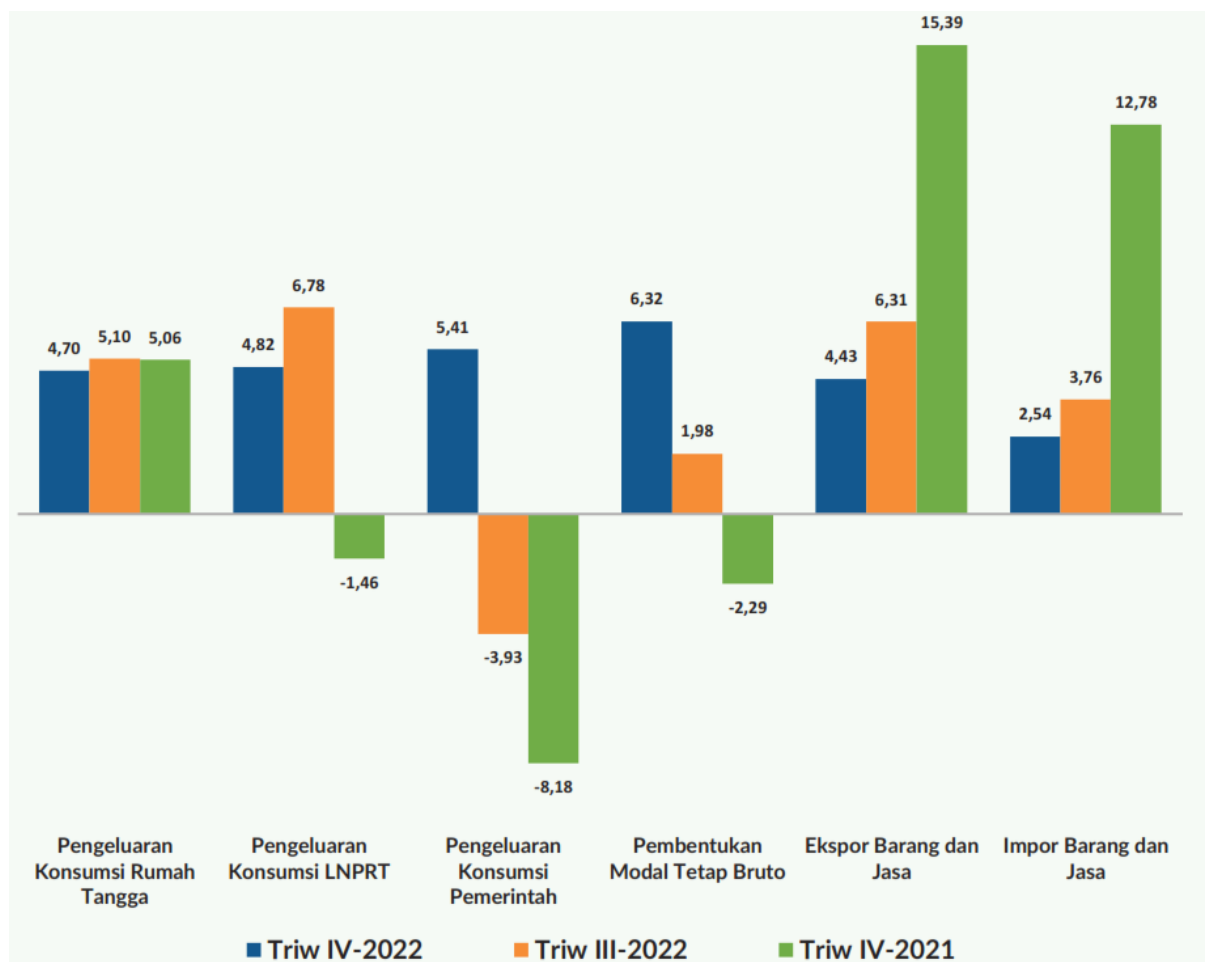


Sumber: BPS Prov. Kaltara

## 2. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2022 Terhadap Triwulan IV-2021 (y-on-y)

Ekonomi Kalimantan Utara pada triwulan IV-2022 terhadap triwulan IV-2021 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 6,17 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh komponen pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 6,32 persen; diikuti oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 5,41 persen; Komponen PK-LNPRT sebesar 4,82 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 4,70 persen; dan Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 4,43 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa (yang merupakan faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran) mengalami pertumbuhan sebesar 2,54 persen.

Gambar 2.11. Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (y-on-y) (persen)



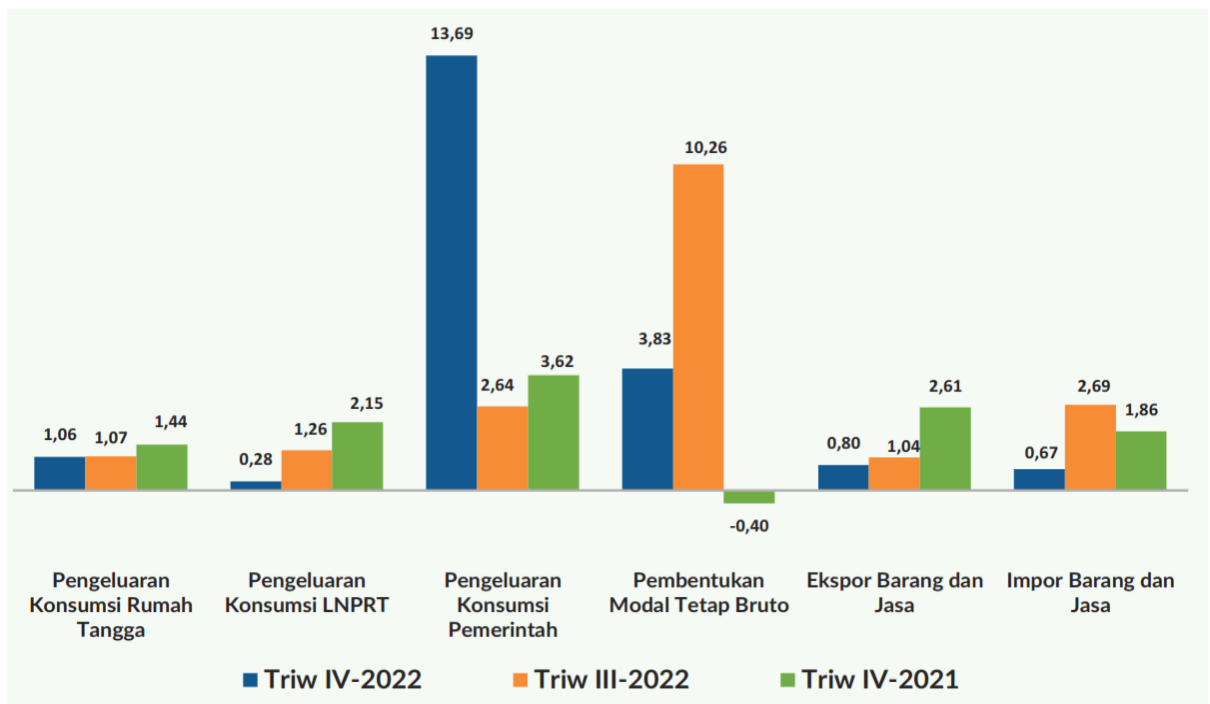
Sumber : BPS Prov. Kaltara



### 3. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2022 Terhadap Triwulan III-2022 (*q-to-q*)

Ekonomi Kalimantan Utara triwulan IV-2022 terhadap triwulan III-2022 (*q-to-q*) mengalami pertumbuhan mencapai 2,64 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh komponen pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 13,69 persen; diikuti oleh Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 3,83 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 1,06 persen; Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 0,80 persen; Konsumsi PK-LNPRT sebesar 0,28 persen;. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB tumbuh sebesar 0,67 persen.

Gambar 2.12. Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen (*q-to-q*) (persen)



Sumber : BPS Prov. Kaltara



Tabel 2.13 Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran (persen)

Lapangan Usaha	Triw III-2022	Triw IV-2022	Triw III-2022	Triw IV-2022	Laju Pertumbuhan 2022	Sumber Pertumbuhan 2022
	Terhadap Triw II-2022 (q-to-q)	Terhadap Triw III-2022 (q-to-q)	Terhadap Triw III-2021 (y-on-y)	Terhadap Triw IV-2021 (y-on-y)		
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1,07	1,06	5,10	4,70	4,46	0,71
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,26	0,28	6,78	4,82	4,72	0,03
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,64	13,69	-3,93	5,41	-1,23	-0,09
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	10,26	3,83	1,98	6,32	2,37	0,70
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-	-
6. Ekspor Barang dan Jasa	1,04	0,80	6,31	4,43	6,56	6,66
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	2,69	0,67	3,76	2,54	4,88	2,68
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>2,72</b>	<b>2,64</b>	<b>5,44</b>	<b>6,17</b>	<b>5,34</b>	<b>5,34</b>

Catatan: q-to-q: PDRB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya  
y-on-y: PDRB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya  
c-to-c: PDRB atas dasar harga konstan kumulatif sampai dengan triwulan dibandingkan periode kumulatif yang sama pada tahun sebelumnya

Sumber : BPS Prov. Kaltara

Tabel 2.14 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (miliar rupiah)

Lapangan Usaha	Harga Berlaku			Konstan 2010		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	15.997,6	16.591,3	17.994,9	9.745,7	10.036,3	10.483,9
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	746,3	754,2	826,6	455,1	450,8	472,1
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7.617,2	7.591,6	7.886,0	4.430,1	4.372,6	4.318,8
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	31.022,9	31.788,2	33.825,7	18.489,8	18.609,9	19.050,2
5. Perubahan Inventori	347,0	338,8	359,5	281,5	252,1	255,5
6. Ekspor Barang dan Jasa	97.850,2	114.374,6	144.841,1	57.834,8	64.116,6	68.322,5
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	53.158,0	60.769,7	67.015,6	30.490,8	34.675,3	36.368,6
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>100.423,2</b>	<b>110.668,9</b>	<b>138.718,2</b>	<b>60.746,2</b>	<b>63.163,0</b>	<b>66.534,4</b>

Sumber: BPS Prov. Kaltara

Tabel 2.15 Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran (persen)

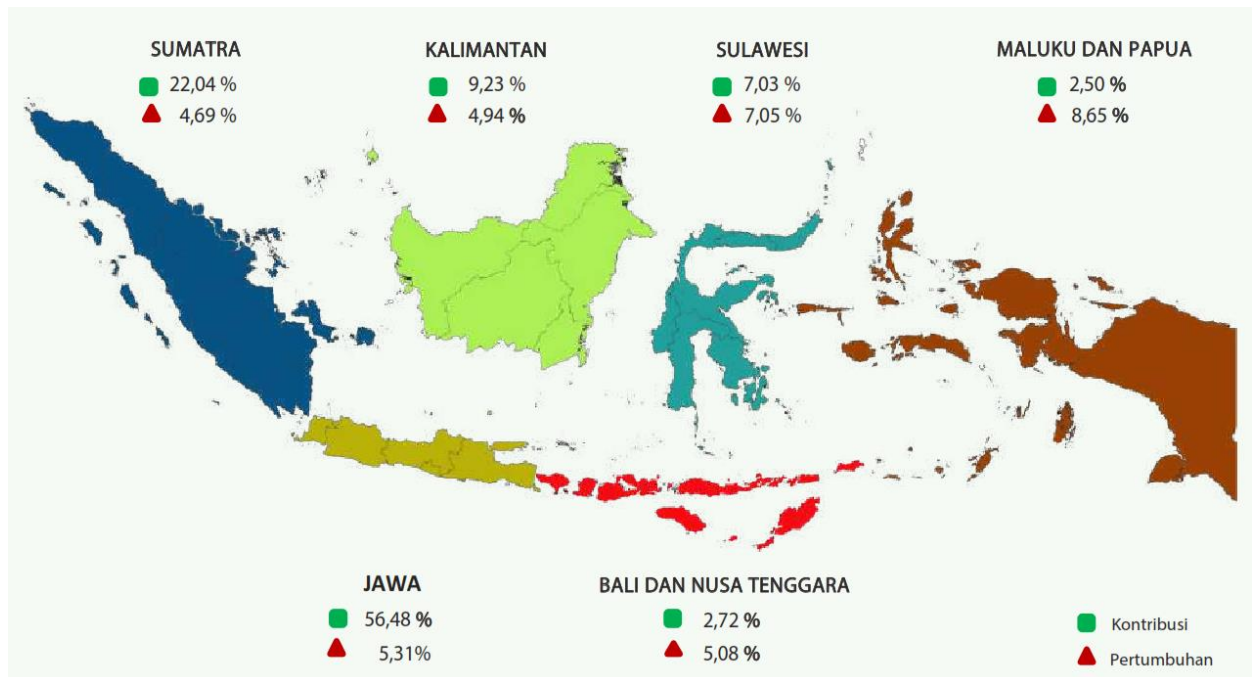
Komponen	Laju Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan 2010			Distribusi Atas Dasar Harga Berlaku		
	2019	2020	2022	2019	2020	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	-0,60	2,98	4,46	15,93	14,99	12,97
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,56	-0,93	4,72	0,77	0,78	0,86
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	17,69	-1,30	-1,23	7,89	7,87	8,17
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	-3,04	0,65	2,37	32,14	32,94	35,05
5. Perubahan Inventori	-	-	-	0,36	0,35	0,37
6. Ekspor Barang dan Jasa	1,22	10,86	6,56	101,39	118,51	150,08
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	4,93	13,72	4,88	52,93	54,91	48,31
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	-1,09	3,98	5,34	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Prov. Kaltara

## I. PERTUMBUHAN PDRB TRIWULAN IV-2022 MENURUT PROVINSI SE-KALIMANTAN DAN WILAYAH LAINNYA

Secara spasial, struktur perekonomian Indonesia pada triwulan IV-2022 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar 56,48 persen; diikuti Pulau Sumatera sebesar 22,04 persen; Pulau Kalimantan sebesar 9,23 persen; Pulau Sulawesi sebesar 7,03 persen; Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,72 persen; dan Pulau Maluku dan Papua sebesar 2,50 persen.

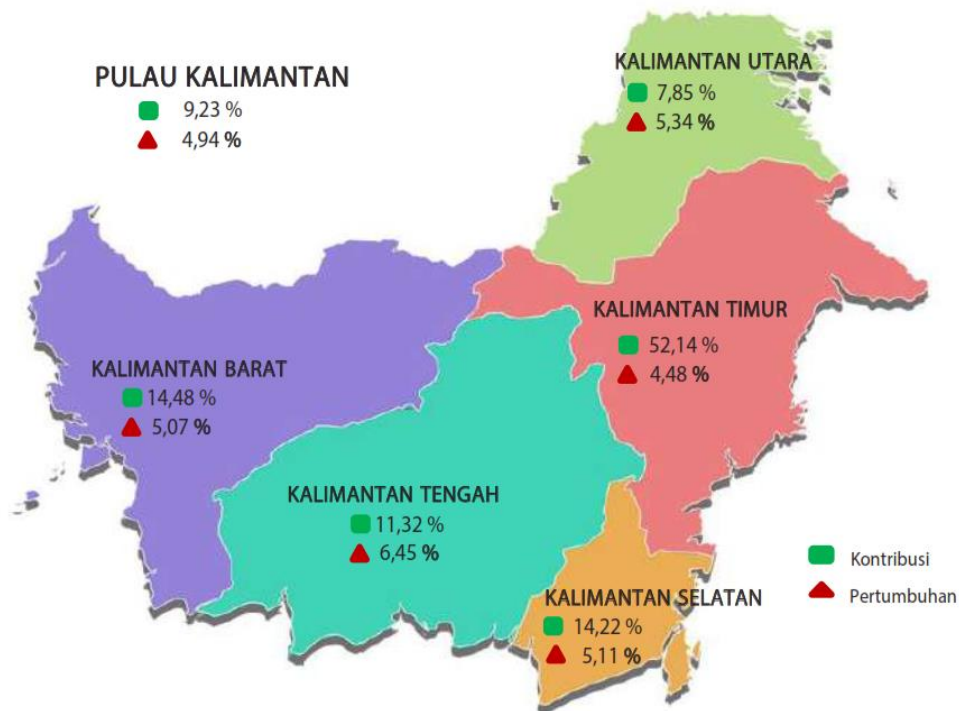
Gambar 2.13 Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Menurut Pulau, Triwulan IV-2022 (persen)



Sumber : BPS Prov. Kaltara

Setelah setahun lebih pandemi COVID-19 melanda, perbaikan perekonomian mulai terjadi di semua kelompok pulau namun dengan level pertumbuhan yang berbeda-beda. Pada tahun 2022, kelompok Pulau Maluku dan Papua mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 8,65 persen; diikuti Pulau Sulawesi sebesar 7,05 persen; Pulau Jawa sebesar 5,31 persen; Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 5,08 persen; Kalimantan sebesar 4,94 persen; dan terakhir Pulau Sumatera sebesar 4,69 persen.

**Gambar 2.14 Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Pulau Kalimantan Triwulan IV-2022 (persen)**



Sumber : BPS Prov. Kaltara

## J. PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA, MARET – SEPTEMBER 2022

Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Utara pada September 2022 sebesar 50,58 ribu (6,86 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 49,46 ribu (6,77 persen), jumlah penduduk miskin secara absolut bertambah 1,1 ribu jiwa dan secara persentase meningkat 0,09 persen poin.

Jumlah penduduk miskin daerah perkotaan mengalami penurunan baik secara absolut maupun persentase sedangkan penduduk miskin daerah pedesaan mengalami kenaikan secara absolut maupun persentase. Selama periode Maret-September 2022, penduduk miskin di daerah perkotaan menurun sebanyak 0,2 ribu jiwa dari 26,55 ribu orang pada Maret 2022 menjadi 26,38 ribu orang pada September 2022 atau secara persentase turun sebesar 0,08 persen dari 5,66 persen menjadi 5,58 persen. Penduduk



Miskin di daerah perdesaan mengalami kenaikan sebanyak 1,3 ribu jiwa dari 22,91 ribu orang pada Maret 2022 menjadi

24,20 ribu orang pada September 2022 atau secara persentase naik 0,40 persen dari 8,75 persen menjadi 9,15 persen.

Jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan lebih sedikit dibanding di daerah perkotaan. Meskipun begitu, persentase penduduk miskin yang berada di daerah perdesaan pada bulan September 2022 sebesar 9,15 persen, sedangkan di daerah perkotaan sebesar 5,58 persen. Pola ini sama dengan kondisi Maret 2022 persentase penduduk miskin di perkotaan 5,66 persen sedangkan di perdesaan lebih tinggi 8,75 persen.

**Tabel 2.16 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kalimantan Utara Menurut Daerah, Maret 2022 dan September 2022**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)			Persentase Penduduk Miskin		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Maret 2022	26,55	22,91	49,46	5,66	8,75	6,77
September 2022	26,38	24,20	50,58	5,58	9,15	6,86

Sumber: BPS Prov. Kaltara - Diolah dari data Susenas Maret dan September 2022

**Tabel 2.17  
Perkembangan Penduduk Miskin Menurut Kabupaten Kota, Tahun 2019 – 2022 (Persen)**

Kode Wilayah	Kabupaten/Kota Provinsi Nasional	Persentase Penduduk Miskin (Persen)			
		2019	2020	2021	2022
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6502	Malinau	6,96	6,63	7,30	6,64
6501	Bulungan	8,78	9,06	10,03	9,32
6504	Tana Tidung	4,72	4,81	5,15	4,45
6503	Nunukan	6,11	6,36	6,79	6,13
6571	Tarakan	6,00	6,24	6,71	6,30
<b>6500</b>	<b>KALIMANTAN UTARA</b>	6,63	6,80	7,36	6,77
	<b>INDONESIA</b>	9,41	9,78	10,15	9,54

Sumber : BPS Prov. Kaltara - Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2019 - 2022

## K. KEADAAN KETENAGAKERJAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA, AGUSTUS 2022

### 1. Penduduk Usia Kerja

Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Dalam perencanaan pembangunan, data mengenai ketenagakerjaan memegang peranan penting. Tanpa data ketenagakerjaan, program pembangunan akan sulit dapat dilaksanakan. Ketersediaan data ketenagakerjaan yang semakin lengkap dan tepat akan memudahkan pemerintah dalam membuat rencana pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan khususnya di Provinsi Kalimantan Utara dibutuhkan sekali data mengenai jumlah tenaga kerja dan angkatan kerja baik dari aspek kualitas maupun kuantitas.

Penduduk usia kerja (*working age population*) di Provinsi Kalimantan Utara menurut hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada bulan Agustus 2022 tercatat berjumlah sekitar 547.170 orang. Bila dirinci menurut jenis kelamin, penduduk usia kerja laki-laki tercatat sebanyak 291.712 orang atau sekitar 53,31 persen dari total penduduk usia kerja di Kalimantan Utara. Jumlah tersebut lebih banyak bila dibanding dengan penduduk usia kerja Perempuan yang tercatat sebanyak 255.458 orang (sekitar 46,69 persen), dengan rasio jenis kelamin sebesar 114,19 persen yang berarti bahwa untuk setiap 100 penduduk usia kerja perempuan sebanding dengan sekitar 114 penduduk usia kerja laki-laki.

Keadaan penduduk usia kerja bulan Agustus 2022 menurut daerah juga terlihat tidak berbeda jauh komposisinya dibandingkan dengan keadaan penduduk usia kerja pada bulan Agustus 2021. Penduduk usia kerja di daerah perkotaan masih mendominasi jumlah penduduk usia kerja. Di daerah perkotaan pada Agustus 2022 terdapat sekitar 62,65 persen dari total penduduk usia kerja sedangkan di daerah perdesaan tercatat sekitar 37,35 persen.

**Tabel 2.18 Persentase Penduduk Kalimantan Utara Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Klasifikasi Daerah, Agustus 2021 dan 2022**

Tahun	Jenis Kelamin		Total	Daerah		Total
	Laki-laki	Perempuan		Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2021	53,42	46,58	100,00	62,48	37,52	100,00
2022	53,31	46,69	100,00	62,65	37,35	100,00

Sumber : BPS Prov. Kaltara - Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Agustus 2021 - 2022

## 2. Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Berdasarkan jenis kegiatannya, angkatan kerja meliputi kegiatan bekerja dan pengangguran, sedangkan bukan angkatan kerja mencakup kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga, dan kegiatan lainnya.

**Gambar 2.15**  
**Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kegiatan dan Klasifikasi Daerah di Kalimantan Utara, Agustus 2022 (Ribuan Jiwa)**



Sumber : BPS Prov. Kaltara - Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Agustus 2022

**Tabel 2.19**  
**Persentase Penduduk Usia Kerja Menurut Kegiatan dan Jenis Kelamin di Kalimantan Utara, Agustus 2022**

Jenis Kegiatan	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(6)
<b>Angkatan Kerja</b>	<b>83,67</b>	<b>49,30</b>	<b>67,62</b>
Bekerja	79,66	47,60	64,69
Pengangguran	4,01	1,70	2,93
<b>Bukan Angkatan Kerja</b>	<b>16,33</b>	<b>50,70</b>	<b>32,38</b>
Sekolah	8,71	9,69	9,17
Mengurus Rumah Tangga	2,50	38,48	19,30
Lainnya	5,13	2,53	3,91
<b>Total PUK</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS Prov. Kaltara - Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Agustus 2022

Penduduk bukan angkatan kerja perempuan didominasi oleh penduduk yang mengurus rumah tangga. Dari 50,70 persen penduduk bukan angkatan kerja perempuan, sebagian besar (38,48 persen)



mempunyai kegiatan mengurus rumah tangga, (9,69 persen) terdiri dari mereka yang bersekolah dan 2,53 mempunyai kegiatan lainnya. Sedangkan untuk penduduk laki-laki, kegiatan mengurus rumah tangga justru merupakan bagian terkecil. Dari 16,33 persen penduduk bukan angkatan kerja laki-laki, hanya 2,50 persen yang mempunyai kegiatan mengurus rumah tangga, sedang bersekolah sekitar 8,71 persen dan 5,13 persen mempunyai kegiatan lainnya.

### 3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja (bekerja dan pengangguran) terhadap jumlah penduduk usia kerja. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin besar bagian dari penduduk usia kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat, dalam kegiatan produktif memproduksi barang dan jasa, dalam kurun waktu tertentu. TPAK di Kalimantan Utara pada Agustus 2022 tercatat sebesar 67,62 persen. Hal ini berarti bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja, sekitar 67 orang termasuk angkatan kerja. Atau dapat diartikan dari 1.000 orang penduduk usia kerja sekitar 676 orang diantaranya aktif secara ekonomi.

**Tabel 2.20**  
**Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin,**  
**Klasifikasi Daerah dan TPAK di Kalimantan Utara, Agustus 2022**

Jenis Kegiatan	Jenis Kelamin		Daerah		Total
	Laki-laki	Perempuan	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penduduk Usia Kerja	291 712	255 458	342 823	204 347	547 170
Angkatan Kerja	244 065	125 947	228 861	141 151	370 012
TPAK	83,67	49,30	66,76	69,07	67,62

Sumber : BPS Prov. Kaltara -Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Agustus 2022

Apabila dikaitkan dengan isu gender, menunjukkan bahwa TPAK laki-laki jauh lebih besar dari pada TPAK perempuan, masing-masing sebesar 83,67 persen dan 49,30 persen. Di Indonesia khususnya di Kalimantan Utara pembagian tugas dalam keluarga sebagian besar rakyat memposisikan pria yang berkewajiban mencari nafkah sedangkan perempuan mengurus rumah tangga menjadikan kesempatan bekerja untuk perempuan menjadi lebih kecil. Sementara itu bila dibedakan menurut daerah, TPAK di daerah perkotaan dan perdesaan hampir seimbang yaitu masing-masing sebesar 66,76 persen dan 69,07 persen.





**Tabel 2.21**  
**Angkatan Kerja, Pengangguran Terbuka dan TPT Kalimantan Utara**  
**Menurut Jenis Kelamin dan Klasifikasi Daerah, Agustus 2022**

Jenis Kegiatan	Jenis Kelamin		Daerah		Total
	Laki-laki	Perempuan	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Angkatan Kerja	244 065	125 947	228 861	141 151	370 012
Pengangguran Terbuka	11 690	4 338	12 530	3 498	16 028
TPT	4,79	3,44	5,47	2,48	4,33

Sumber : BPS Prov. Kaltara - Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Agustus 2022

Keterangan:

Penganggur Terbuka, terdiri dari :

- Mereka yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
- Mereka yang tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
- Mereka yang sudah punya pekerjaan/usaha, tetapi belum mulai bekerja.
- Mereka yang tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa).

**Tabel 2.22**  
**Jumlah Pengangguran Terbuka dan TPT Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin,**  
**Agustus 2022**

Kode Wilayah	Kab/Kota	Penganggur			TPT		Total
		Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
6502	Malinau	925	667	1 592	3,04	3,75	3,30
6501	Bulungan	2 844	401	3 245	6,36	2,03	5,03
6504	Tana Tidung	395	181	576	3,42	3,17	3,33
6503	Nunukan	2 536	380	2 916	3,51	1,11	2,74
6571	Tarakan	4 990	2 709	7 699	5,85	5,60	5,76
TOTAL		11 690	4 338	16	4,79	3,44	4,33

Sumber : BPS Prov. Kaltara - Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Agustus 2022

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) memberikan indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran terbuka. TPT dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pengangguran terbuka dengan jumlah angkatan kerja, dinyatakan dalam persentase. Ukuran ini dapat digunakan untuk mengindikasikan seberapa besar penawaran kerja yang tidak dapat terserap dalam pasar kerja di Kalimantan Utara.

TPT di Kalimantan Utara pada Agustus 2022 tercatat sebesar 4,33 persen yang berarti bahwa dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 4 orang yang menganggur. Bila dilihat menurut jenis



kelamin, TPT perempuan lebih rendah dari pada TPT laki-laki, tercatat masing-masing sebesar 4,79 persen dan 3,44 persen.

**Tabel 2.23**  
**Perkembangan TPT Menurut Kabupaten Kota Tahun 2019 - 2022**

Kode Wilayah	Kabupaten/Kota Provinsi Nasional	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)			
		2019	2020	2021	2022
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6502	Malinau	3,99	5,08	4,14	3,30
6501	Bulungan	4,39	4,45	4,54	5,03
6504	Tana Tidung	4,45	4,83	5,26	3,33
6503	Nunukan	3,76	4,14	4,24	2,74
6571	Tarakan	5,30	5,86	4,94	5,76
<b>6500</b>	<b>KALIMANTAN UTARA</b>	<b>4,49</b>	<b>4,97</b>	<b>4,58</b>	<b>4,33</b>
	<b>INDONESIA</b>	<b>5,23</b>	<b>7,07</b>	<b>6,49</b>	<b>5,86</b>

Sumber : BPS Prov. Kaltara - Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Agustus 2019 - 2022

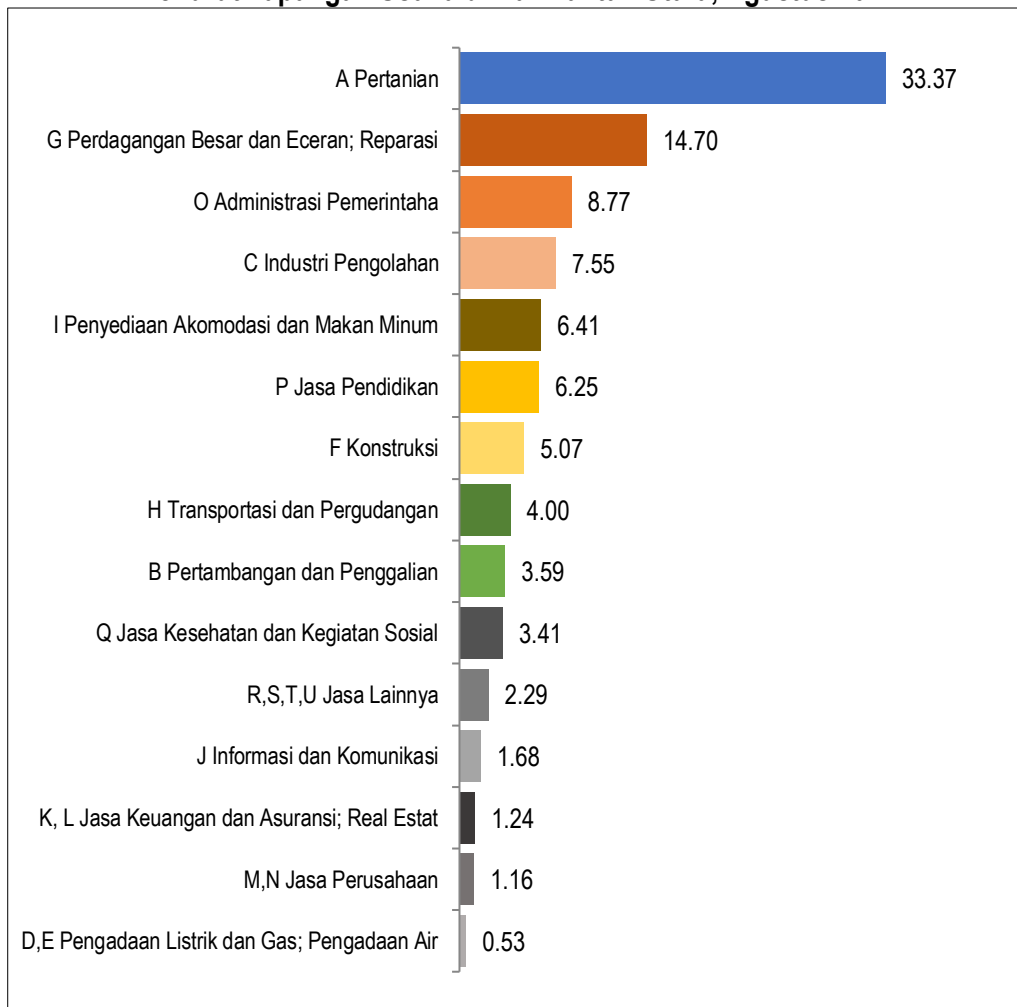
Berdasarkan tipe daerah terlihat bahwa TPT untuk daerah perkotaan sebesar 5,47 persen, lebih besar dibandingkan dengan TPT daerah perdesaan yang tercatat sebesar 2,48 persen sebagai bagian efek dari adanya industrialisasi. Pengangguran terjadi sebagai akibat dari tidak sempurnanya pasar tenaga kerja, atau tidak mempunyai pasar tenaga kerja dalam menyerap tenaga kerja yang ada. Kondisi tersebut mengakibatkan timbulnya sejumlah pekerja yang tidak diberdayakan dalam kegiatan perekonomian. Hal ini terutama terjadi di daerah perkotaan dimana antara permintaan dan penawaran tenaga kerja tidak seimbang.

#### 4. Penduduk yang Bekerja

Konsep Baku Ketenagakerjaan Berdasarkan *International Conference of Labour Statistician* (ICLS) 13. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, yang dilakukan minimal 1 (satu) jam dalam seminggu yang lalu, termasuk pula kegiatan pekerja keluarga/tidak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi. Termasuk ke dalam konsep bekerja adalah orang yang sementara tidak bekerja yaitu mereka yang mempunyai pekerjaan/usaha tetapi selama seminggu yang lalu tidak bekerja karena sesuatu sebab seperti sakit, cuti, menunggu panen, tugas belajar, atau mogok kerja. Jumlah penduduk yang bekerja bulan Agustus 2022 merupakan bagian dari penduduk yang aktif secara ekonomi sekitar 353,9 ribu orang atau 64,69 persen dari total penduduk usia kerja tahun 2022.

Proporsi penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama biasanya dipakai sebagai salah satu ukuran untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja, di samping itu juga digunakan untuk mengetahui struktur perekonomian suatu daerah.

**Gambar 2.16**  
**Persentase Penduduk Usia Kerja (15 Tahun Ke Atas) yang Bekerja**  
**Menurut Lapangan Usaha di Kalimantan Utara, Agustus 2022**

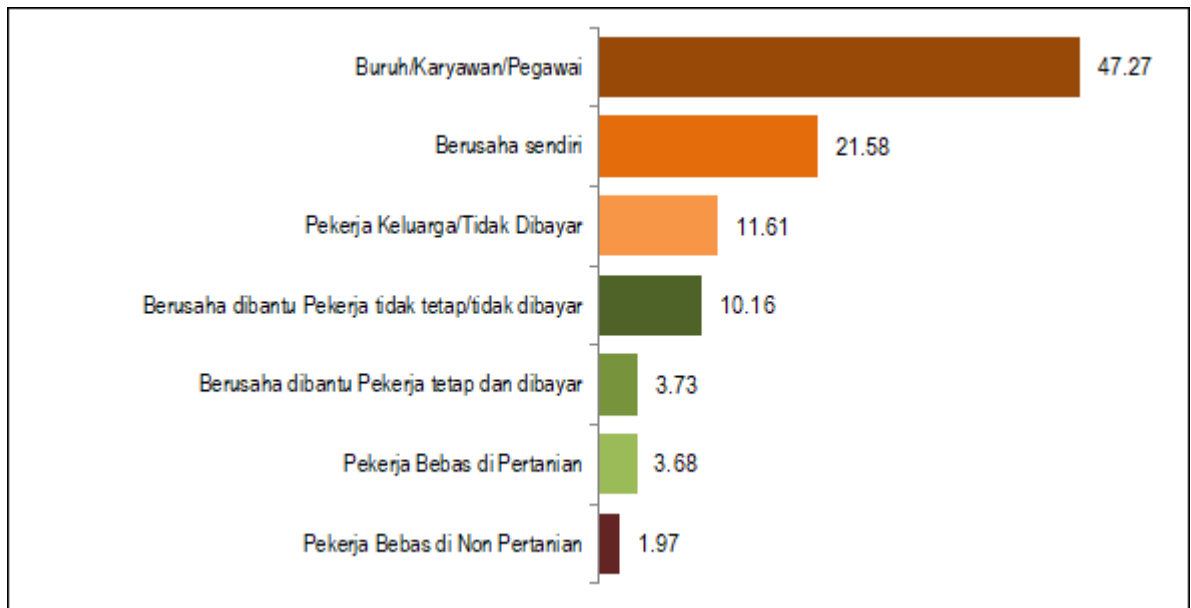


Sumber : BPS Prov. Kaltara - Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Agustus 2022

Gambar 2.16 menggambarkan bahwa lapangan usaha pertanian merupakan sektor yang paling besar dalam menyerap tenaga kerja di Kalimantan Utara. Pada periode Agustus 2022, penyerapan sektor ini mencapai sekitar 33,37 persen kemudian disusul oleh sektor perdagangan besar dan eceran sekitar 14,70 persen dan sektor administrasi pemerintahan sekitar 8,77 persen. Sektor yang paling kecil dalam menyerap tenaga kerja adalah sektor Pengadaan Listrik dan Gas serta Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang sekitar 0,53 persen.

Penyerapan tenaga kerja menurut sektoral kadang kala menggambarkan kinerja sektor secara ekonomis yang diukur dari penciptaan nilai tambah bruto (PDRB) oleh tenaga kerja yang terserap pada masing-masing sektor. Sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak tentu saja akan dapat menciptakan nilai tambah yang lebih besar. Tetapi di sisi lain juga terjadi fenomena bahwa sektor yang lebih bersifat tradisional dan konvensional akan lebih ramah terhadap penyerapan tenaga kerja dibandingkan sektor yang dikelola secara lebih modern.

**Gambar 2.17**  
**Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja**  
**Menurut Status Pekerjaan Utama di Kalimantan Utara, Agustus 2022**



Sumber : BPS Prov. Kaltara - Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Agustus 2022

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang kedudukan pekerja adalah status pekerjaan bagi penduduk yang bekerja. Status pekerjaan sebagai buruh/karyawan/pegawai merupakan bagian terbesar dari status pekerjaan penduduk di Kalimantan Utara pada periode Agustus 2022 sebesar 47,27 persen dari total pekerja. Selain sebagai buruh/karyawan/pegawai, bagian yang besar lainnya adalah berstatus berusaha sendiri yang mencapai 21,58 persen, pekerja keluarga/tak dibayar sebesar 11,61 persen, berstatus berusaha dibantu buruh tidak tetap/tak dibayar sebesar 10,16 persen, dan status pekerja dengan persentase terkecil adalah pekerja bebas di non pertanian sebesar 1,97 persen.

#### **5. Dampak Pandemi Covid-19 pada Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Utara**

Covid-19 diketahui muncul pertama kali di Wuhan, China, pada Desember 2019. Tanggal 13 Januari 2020, terdapat kasus baru Covid-19 di luar China untuk pertama kalinya. Sedangkan di Indonesia, kasus pertama yang diumumkan Presiden adalah pada tanggal 2 Maret 2020. Selanjutnya, Covid-19 dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO pada tanggal 16 Maret 2020. Sejak Covid-19 dinyatakan sebagai pandemi, Indonesia menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sampai dengan Mei 2020.

Namun setelah itu, perlahan-lahan kegiatan ekonomi dan sosial mulai dibuka kembali pada Juni 2020. Pada bulan Mei-Juli 2021 Indonesia kembali mengalami gelombang kedua kasus covid-19 sehingga Pemerintah kembali membuat kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mulai dari PPKM Darurat Jawa-Bali hingga PPKM level 1 sampai 4 di beberapa Kabupaten/Kota di Indonesia termasuk di Kalimantan Utara.



Pada Hari Jumat, 30 Desember 2022 Pemerintah secara resmi mencabut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terkait pandemi Covid-19 setelah Presiden Joko Widodo mengumumkannya melalui konferensi pers di Istana Negara, Jakarta. Keputusan tersebut tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 50 dan 51 Tahun 2022. Meskipun kebijakan PPKM telah dicabut, akan tetapi status pandemi Covid-19 masih tetap ada dan belum dicabut.

Dengan adanya pandemi Covid-19, tidak hanya masalah kesehatan yang timbul, namun beberapa aspek dalam kehidupan ikut terdampak termasuk perekonomian. Terdampaknya aktivitas ekonomi berdampak juga pada dinamika ketenagakerjaan di Kalimantan Utara. Tidak hanya pengangguran, penduduk usia kerja lainnya juga turut terdampak dengan adanya pandemi Covid-19.

Penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 tersebut dikelompokkan menjadi empat komponen yaitu:

- Pengangguran karena covid-19;
- Bukan angkatan kerja yang pernah berhenti bekerja karena covid-19;
- Penduduk yang bekerja dengan status sementara tidak bekerja karena covid-19;
- Penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena covid-19.

Kodisi c) dan d) merupakan dampak pandemi Covid-19 yang dirasakan oleh mereka yang saat ini masih bekerja, sedangkan kondisi a) dan b) merupakan dampak pandemi Covid-19 bagi mereka yang berhenti bekerja.

**Tabel 2.24**  
**Dampak Covid-19 terhadap Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin (jiwa), Agustus 2022**

Penduduk Usia Kerja	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
a) Pengangguran Karena Covid-19	269	0	269
b) Bukan Angkatan Kerja (BAK) Karena Covid-19	110	299	409
c) Sementara Tidak Bekerja Karena Covid-19	123	152	275
d) Penduduk Bekerja yang Mengalami	7 815	3 117	10 932
<b>Total</b>	<b>8 317</b>	<b>3 568</b>	<b>11 885</b>

Sumber : BPS Prov. Kaltara - Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Agustus 2022

**Tabel 2.25**  
**Dampak Covid-19 terhadap Penduduk Usia Kerja Menurut Wilayah (Jiwa), Agustus 2022**

Penduduk Usia Kerja	Klasifikasi Wilayah		Total
	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)
a) Pengangguran Karena Covid-19	269	0	269
b) Bukan Angkatan Kerja (BAK) Karena Covid-19	409	0	409
c) Sementara Tidak Bekerja Karena Covid-19	275	0	275
d) Penduduk Bekerja yang Mengalami Pengurangan	7 441	3 491	10 932
<b>Total</b>	<b>8 394</b>	<b>3 491</b>	<b>11 885</b>

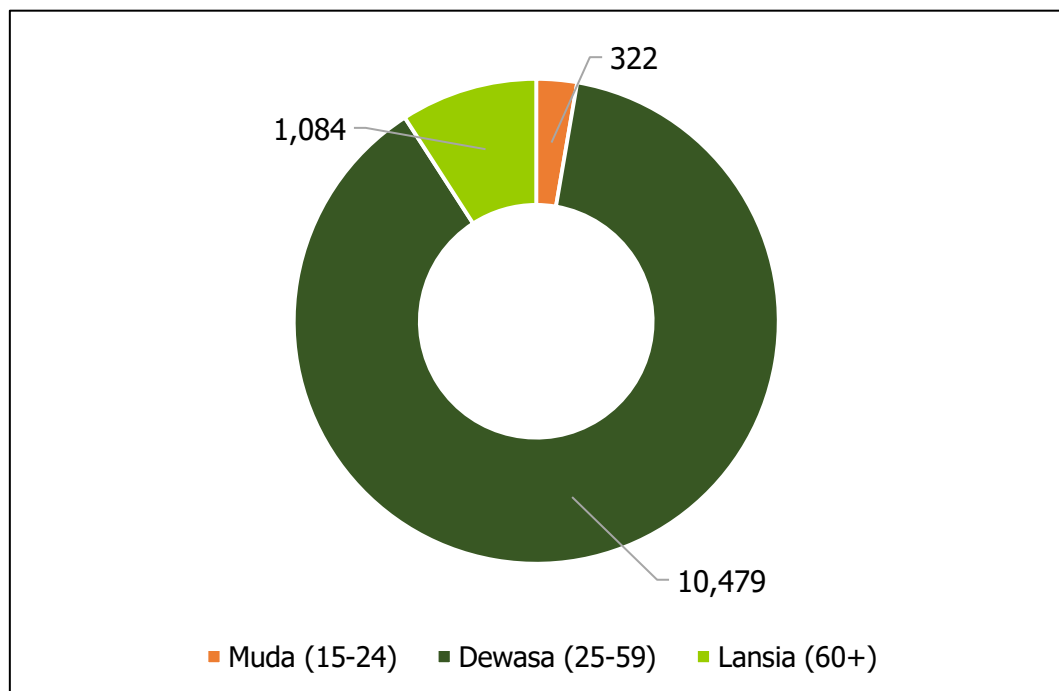
Sumber : BPS Prov. Kaltara - Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Agustus 2022

Keterangan:

1. Penghitungan dengan menggunakan penimbang hasil proyeksi SUPAS 2015.
2. Pengangguran karena Covid-19 adalah pengangguran yang pernah berhenti bekerja karena Covid-19 sejak Februari 2020.
3. Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 adalah penduduk usia kerja yang termasuk dalam kategori bukan angkatan kerja dan pernah berhenti bekerja karena Covid-19 sejak Februari 2020.

Penduduk yang terdampak Covid-19 di Provinsi Kalimantan Utara keseluruhan adalah sebanyak 54.677 orang, 45.018 orang diantaranya mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19. Sedangkan 1.434 orang merupakan Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19. Jika dilihat dari jenis kelamin, penduduk usia kerja pada Laki-laki lebih banyak terdampak dibandingkan Perempuan, sedangkan jika dilihat menurut klasifikasi wilayah pada tabel 2.23, maka penduduk di wilayah Perkotaan lebih banyak terdampak dibandingkan penduduk yang ada di wilayah Perdesaan.

**Gambar 2.18**  
**Dampak Covid-19 pada Penduduk Usia Menurut Kelompok Umur (Jiwa),**  
**Agustus 2022**



Sumber : BPS Prov. Kaltara - Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Agustus 2022

Berkurangnya jam kerja adalah salah satu dampak Covid-19 yang paling banyak dirasakan penduduk usia kerja. Pada gambar diatas menunjukkan bahwa penduduk pada kelompok umur 25-59 tahun yang paling banyak merasakan dampak Covid-19 yaitu sebanyak 10.479 orang (88 persen). Diikuti dengan penduduk pada kelompok umur 60 tahun ke atas sebanyak 1.084 orang (9 persen) dan yang terakhir penduduk kelompok umur 15-24 tahun sebanyak 322 orang (3 persen).



### BAB III KUANTITAS PENDUDUK

#### A. Persebaran (Distribusi) Penduduk

Kuantitas Penduduk diartikan sebagai jumlah penduduk yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu, yang dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, migrasi (perpindahan penduduk) dan mobilitas sosial.

Bab ini juga akan membahas komposisi penduduk berdasarkan jumlah dan persebaran penduduk serta penduduk menurut karakteristik demografi. Tabel dan gambar di bab ini bersumber dari Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 2 Tahun 2023 Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI yang diolah dan OPD terkait.

##### 1. Jumlah dan Persebaran Penduduk

Persebaran atau distribusi Penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah. Apakah persebarannya merata atau tidak, dapat dilihat dari jumlah dan proporsi penduduk menurut jenis kelamin, kepadatan penduduk, dan laju pertumbuhan penduduk.

Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 sebesar 747.415 jiwa, terdiri dari 392.339 jiwa Laki-laki dan 355.076 jiwa Perempuan, serta memiliki luas wilayah keseluruhan ±75.469 Km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk kabupaten/kota yang ada di provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat berikut ini :<sup>1</sup>

**Tabel 3.1 Jumlah Penduduk di Kabupaten / Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023**

Kode Wilayah	NAMA WILAYAH	JENIS KELAMIN		PENDUDUK	JUMLAH KECAMATAN
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
6501	BULUNGAN	87.393	78.382	165.775	10
6502	MALINAU	44.851	40.222	85.073	15
6503	NUNUKAN	115.669	102.254	217.923	21
6504	TANA TIDUNG	15.061	13.623	28.684	5
6500	KOTA TARA KAN	129.365	120.595	249.960	4

<sup>1</sup> Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI, Data Konsolidasi Bersih (DKB) Per Desember Tahun 2023



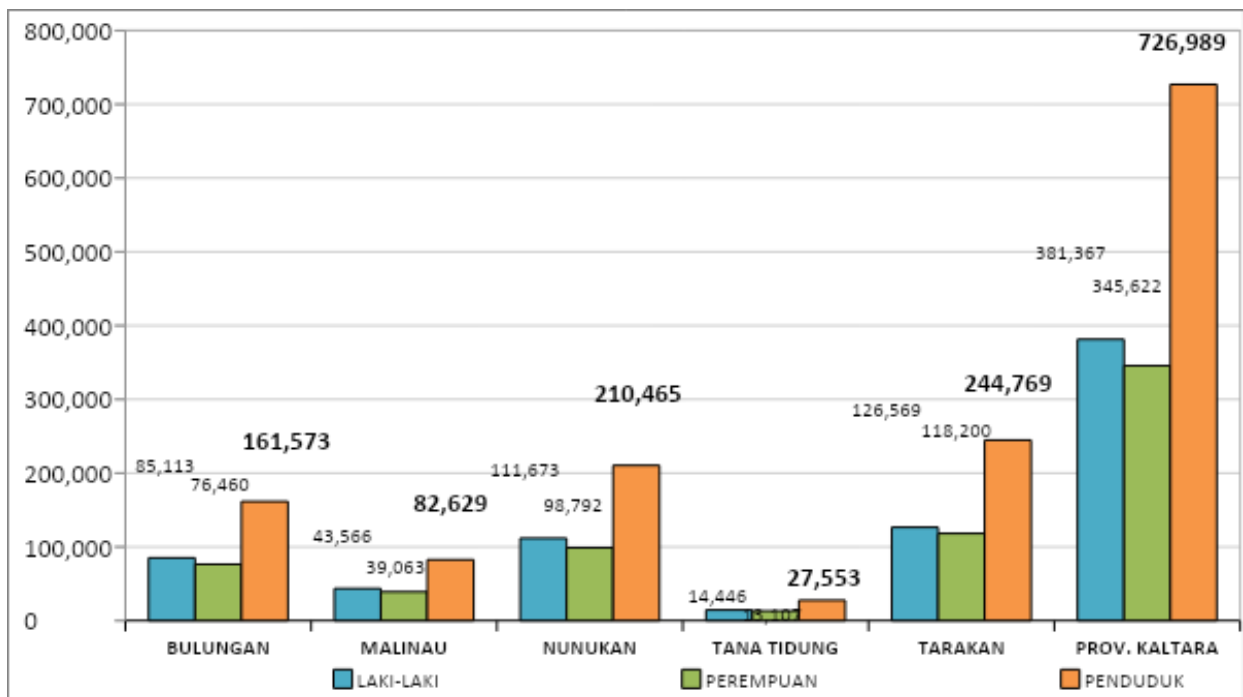
6500	KALIMANTAN UTARA	392.339	355.076	747.415	55
------	------------------	---------	---------	---------	----

Sumber : DKB 2 2023 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Kota Tarakan merupakan Kota dengan jumlah penduduk terbesar yaitu 249.960 jiwa (33,44% dari total penduduk Provinsi Kalimantan Utara, turun 0,23% dari tahun lalu 33,67% atau bertambah 5.191 jiwa dari 244.769 jiwa), diikuti Kabupaten Nunukan 217.923 jiwa (29,16% dari total penduduk Provinsi Kalimantan Utara, naik 0,21% dari tahun lalu 28,95% atau bertambah 7.458 jiwa dari 210.465 jiwa), Kabupaten Bulungan 165.775 jiwa (22,18% dari total penduduk Provinsi Kalimantan Utara, turun 0,04% dari tahun lalu 22,22% atau bertambah 4.202 jiwa dari 161.573 jiwa), Kabupaten Malinau 82.629 jiwa (11,37% dari total penduduk Provinsi Kalimantan Utara, turun 0,37% dari tahun lalu 11,74% atau bertambah 704 jiwa dari 82.629 jiwa) dan Kabupaten Tana Tidung adalah wilayah dengan jumlah penduduk terkecil dengan jumlah penduduk sebesar 27.553 jiwa (3,79% dari total penduduk Provinsi Kalimantan Utara, turun 0,01% dari tahun lalu 3,80% atau bertambah 1.045 jiwa). Jumlah penduduk dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

**Gambar 3.1 Grafik Jumlah Penduduk di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara**

**Tahun 2023**



Sumber : DKB 2 2023 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Adapun jumlah penduduk berdasarkan kecamatan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara dan jenis kelamin tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini : **Catatan** : Nama kecamatan yang





dicetak tebal dan miring adalah kecamatan-kecamatan yang memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia.<sup>2</sup>

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Per Kecamatan Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023

<b>Kabupaten Bulungan</b>				
<b>KODE</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>PRIA</b>	<b>WANITA</b>	<b>JUMLAH</b>
650101	TANJUNG PALAS	9.453	8.734	18.187
650102	TANJUNG PALAS BARAT	3.746	3.172	6.918
650103	TANJUNG PALAS UTARA	6.021	5.538	11.559
650104	TANJUNG PALAS TIMUR	10.441	8.763	19.204
650105	TANJUNG SELOR	31.957	29.246	61.203
650106	TANJUNG PALAS TENGAH	6.614	5.916	12.530
650107	PESO	2.293	1.994	4.287
650108	PESO ILIR	2.280	1.936	4.216
650109	SEKATAK	6103	5.544	11.647
650110	BUNYU	6.205	5.617	11.822
<b>TOTAL</b>		<b>85113</b>	<b>76.460</b>	<b>161.573</b>
<b>Kabupaten Malinau</b>				
<b>KODE</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>PRIA</b>	<b>WANITA</b>	<b>JUMLAH</b>
650201	MENTARANG	2.822	2.627	5449
650202	MALINAU KOTA	13.466	12.428	25894
650203	<b><i>PUJUNGAN</i></b>	955	797	1752
650204	<b><i>KAYAN HILIR</i></b>	863	675	1538
650205	<b><i>KAYAN HULU</i></b>	1.219	1.122	2341
650206	MALINAU SELATAN	2.763	2.336	5099

<sup>2</sup> Biro Pengelola Perbatasan Negara Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018



650207	MALINAU UTARA	8.129	7.126	15255
650208	MALINAU BARAT	5.988	5.437	11425
650209	SUNGAI BOH	1.256	1.080	2336
650210	<b>KAYAN SELATAN</b>	1.024	966	1990
650211	<b>BAHAU HULU</b>	723	604	1327
650212	MENTARANG HULU	929	857	1786
650213	MALINAU SELATAN HILIR	1.584	1.398	2982
650214	MALINAU SELATAN HULU	1.374	1.191	2565
650215	SUNGAI TUBU	471	419	890
<b>TOTAL</b>		<b>43.566</b>	<b>39.063</b>	<b>82.629</b>

<b>Kabupaten Nunukan</b>				
<b>KODE</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>PRIA</b>	<b>WANITA</b>	<b>JUMLAH</b>
650301	<b>SEBATIK</b>	3.693	3.318	7.011
650302	<b>NUNUKAN</b>	38.272	32.820	71.092
650303	SEMBAKUNG	3.521	3.193	6.714
650304	LUMBIS	3.515	3.178	6.693
650305	<b>KRAYAN</b>	1.876	1.682	3.558
650306	SEBUKU	6.291	5.348	11.639
650307	<b>KRAYAN SELATAN</b>	746	696	1.442
650308	<b>SEBATIK BARAT</b>	6.274	5.751	12.025
650309	<b>NUNUKAN SELATAN</b>	12.406	11.337	23.743
650310	<b>SEBATIK TIMUR</b>	7.508	7.192	14.700
650311	<b>SEBATIK UTARA</b>	4.074	3.950	8.024
650312	<b>SEBATIK TENGAH</b>	4.532	4.195	8.727



650313	<b>SEI MENGGARIS</b>	5.882	4682	10.564
650314	<b>TULIN ONSOI</b>	5.667	4.805	10.472
650315	<b>LUMBIS OGONG</b>	1.563	1.434	2.997
650316	SEMBAKUNG ATULAI	1.630	1.492	3.122
650317	<b>KRAYAN TENGAH</b>	579	468	1.047
650318	<b>KRAYAN TIMUR</b>	861	722	1.583
650319	<b>KRAYAN BARAT</b>	1.634	1.417	3.051
650320	<b>LUMBIS PANSANGAN</b>	762	724	1.486
650321	<b>LUMBIS HULU</b>	387	388	775
<b>TOTAL</b>		<b>111.673</b>	<b>98.792</b>	<b>210.465</b>

<b>Kabupaten Tana Tidung</b>				
<b>KODE</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>PRIA</b>	<b>WANITA</b>	<b>JUMLAH</b>
650401	SESAYAP	5.974	5.496	11.470
650402	SESAYAP HILIR	3.908	3.564	7.472
650403	TANA LIA	1.846	1.571	3.417
650404	BETAYAU	1.813	1.606	3.419
650405	MURUK RIAN	905	870	1.775
<b>TOTAL</b>		<b>14.446</b>	<b>13.107</b>	<b>27.553</b>

<b>Kota Tarakan</b>				
<b>KODE</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>PRIA</b>	<b>WANITA</b>	<b>JUMLAH</b>
657101	TARAKAN BARAT	42.281	39.982	82.263
657102	TARAKAN TENGAH	36.085	33.487	69.572
657103	TARAKAN TIMUR	30.621	28.629	59.250



657104	TARAKAN UTARA	17.582	16.102	33.684
<b>TOTAL</b>		<b>126.569</b>	<b>118.200</b>	<b>244.769</b>

Sumber : DKB 2 2023 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

## 2. Penduduk Di Wilayah Perbatasan

Kawasan Perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain.<sup>3</sup>

Jumlah rasio penduduk di kawasan perbatasan adalah sesuai tabel berikut :

**Tabel 3.3 Rasio Penduduk Perbatasan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023**

Kode Wilayah	Kabupaten	Penduduk Perbatasan	Jumlah Penduduk	Rasio Kabupaten	Rasio Provinsi
6503	Nunukan	182.297	210.465	86,62	26,33
6502	Malinau	8.948	82.629	10,83	1,29
	<b>Jumlah</b>	<b>191.245</b>	<b>293.094</b>	<b>65,25</b>	<b>26,31</b>

Sumber : DKB 2 2023 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Dari tabel di atas, apabila kita fokuskan pada kecamatan-kecamatan yang memiliki wilayah perbatasan, kita akan memperoleh data sebagai berikut : jumlah penduduk perbatasan Kabupaten Nunukan adalah 182.297 jiwa atau 86,62% (naik 0,36% dari tahun lalu 86,26% atau bertambah 14.848 jiwa) dari jumlah seluruh penduduk Nunukan, yaitu 210.465 jiwa.

Sedangkan Kabupaten Malinau memiliki penduduk di kawasan perbatasan 8.948 jiwa atau 10,83% (turun 0,36% dari tahun lalu 11,19% atau turun 223 jiwa) dari jumlah seluruh penduduk Malinau 82.629 jiwa.

<sup>3</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 6, kawasan perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain.



Rasio provinsi keseluruhan penduduk yang bertempat tinggal di perbatasan terhadap jumlah penduduk Se-Provinsi Kalimantan Utara adalah 26,31% naik 1,01% dibandingkan tahun lalu sebesar 25,30%.

Angka 26,31% adalah jumlah besar penduduk perbatasan yang sangat potensial. Keadaan nyata penduduk di wilayah-wilayah perbatasan dan / atau terpencil ini menyadarkan kita bahwa kependudukan bukanlah sekedar angka-angka kuantitatif saja. Mereka adalah “patok hidup” di wilayah perbatasan. Patok hidup adalah istilah yang dicetuskan oleh Bupati Bulungan R.A. Besing pada tahun 1999 terkait pemekaran Kabupaten Bulungan menjadi wilayah Kabupaten Nunukan dan Malinau, serta merupakan ungkapan yang menggambarkan semangat nasionalisme dan patriotisme mereka dalam membela dan memihak NKRI daripada Malaysia.<sup>4</sup> Mereka lah sebenarnya patok hidup penjaga wilayah perbatasan, sehingga kehadiran negara adalah wajib untuk melindungi mereka dengan cara memberikan pelayanan publik salah satunya penyediaan dokumen administrasi kependudukan. Dokumen ini penting sebagai kunci akses bagi pelayanan-pelayanan publik yang disediakan pemerintah dan sebagai bukti legalitas dan administratif bahwa mereka berstatus sebagai WNI. Fakta bahwa banyak penduduk perbatasan yang mencari pekerjaan dan membeli kebutuhan pokok ke Malaysia tidak bisa dijadikan justifikasi bahwa nasionalisme mereka untuk Malaysia. Itu adalah pilihan logis ketika infrastruktur dan ketersediaan pangan lebih mudah dijangkau di negara tetangga. Mereka tidak mungkin menunggu distribusi makanan dan bahan-bahan lainnya dari pemerintah daerah atau penyedia setempat, sementara untuk menjangkau pusat pemerintahan kabupaten atau kota setempat saja harus ditempuh dengan pesawat atau perahu, karena nyaris mustahil ditempuh lewat jalur darat.

### 3. **Kepadatan Penduduk (*Population Density Ratio*)**

Kepadatan Penduduk adalah perbandingan banyaknya penduduk terhadap luas wilayah suatu daerah. Sedangkan masalah kepadatan penduduk seringkali ikut hadir pada suatu wilayah / daerah yang sedang mengurban (urbanisasi).

---

<sup>4</sup> Fakta ini banyak kami jumpai setelah beberapa kali melakukan pelayanan kependudukan di wilayah-wilayah tersebut, terutama daerah-daerah yang pernah menjadi medan pertempuran perang Dwikora. Melalui wawancara informal, kami mendengar cerita-cerita menarik tentang heroisme dan semangat para veteran saat mempertahankan jengkal demi jengkal kedaulatan Indonesia kala itu. Rasa bangga dan heroisme itu mereka tunjukkan dengan memperlihatkan sertifikat-sertifikat, piagam-piagam, dan seragam-seragam mereka yang sudah nampak lusuh disertai cerita mereka saat berlindung dari bom dan desingan senapan musuh.

Urbanisasi disini tidak hanya dimaknai sebagai perpindahan penduduk dari desa ke kota, namun juga proses perubahan suatu wilayah yang sebelumnya sepi menjadi ramai dari segi jumlah penduduk dan bertambahnya infrastruktur fisik maupun fasilitas publik. Dengan mengetahui kepadatan penduduk maka dapat diketahui konsentrasi penduduk di suatu wilayah serta dapat digunakan sebagai acuan untuk mewujudkan pemerataan dan persebaran penduduk (Program Transmigrasi).

Secara umum, permasalahan-permasalahan akibat kepadatan penduduk di Indonesia berdampak terhadap aspek sosial, ekonomi, politik, pertahanan, keamanan. Dari segi kuantitas, jumlah penduduk yang besar berarti permasalahan dalam kemampuan menyediakan kebutuhan sandang, pangan, dan papan.

Sedangkan dari segi kualitas terlihat dari kemampuan dan daya saing Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kalimantan Utara sebagai provinsi baru yang berusia 9 (sembilan) tahun, saat ini belum mengalami ledakan jumlah penduduk sehingga masih banyak waktu untuk menata ruang dan wilayahnya.

Luas wilayah Provinsi Kalimantan Utara tercatat seluas 75.469 Km<sup>2</sup> atau 14% dari luas Pulau Kalimantan yang masuk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebaran penduduk umumnya terkonsentrasi di pusat-pusat perkotaan, baik di Kabupaten atau Kota.

Kawasan permukiman yang cukup padat berada di Kota Tarakan diikuti Kabupaten Nunukan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kabupaten Malinau. Data kepadatan penduduk Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini:<sup>5</sup>

**Tabel 3.4 Rasio Kepadatan Penduduk di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023**

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	PENDUDUK	LUAS WILAYAH	KEPADATAN
		(JIWA)	(Km <sup>2</sup> )	(JIWA/Km <sup>2</sup> )
6501	BULUNGAN	161.573	13.926	11,60
6502	MALINAU	82.629	42.621	1,94
6503	NUNUKAN	210.465	13.842	15,20
6504	TANA TIDUNG	27.553	4.829	5,71

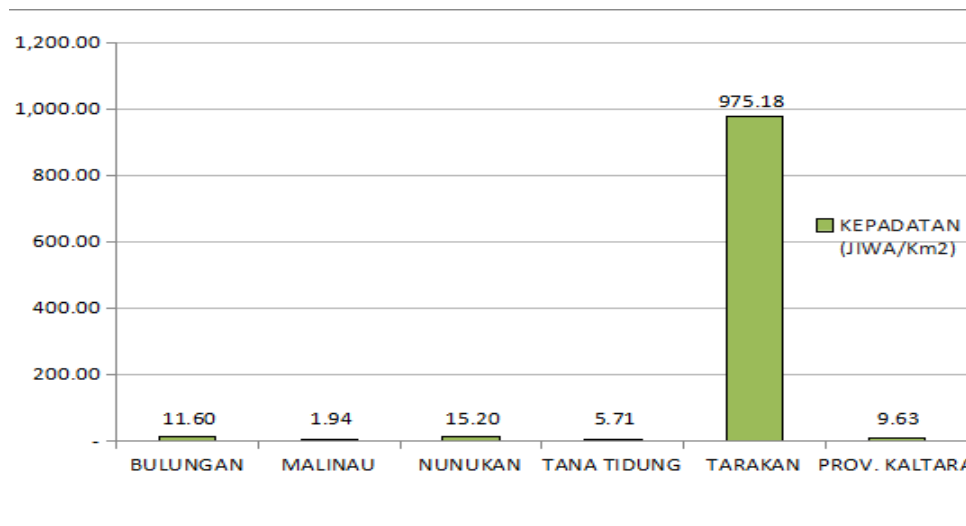
<sup>5</sup> Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI, *Op.cit.*

6571	KOTA TARAKAN	244.769	251	975,18
TOTAL		726.989	75.469	9,63

Sumber : DKB 2 2023 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini :

**Gambar 3.2 Grafik Rasio Kepadatan Penduduk di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023**



Sumber : DKB 2 2023 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Jika dilihat persebaran di setiap wilayah nampak bahwa kepadatan penduduk di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 9,63 Jiwa/Km<sup>2</sup> naik 0,38 Jiwa/Km<sup>2</sup> dari tahun sebelumnya 9,25 Jiwa/Km<sup>2</sup>. Kota Tarakan merupakan wilayah terpadat dengan kepadatan sebesar 975,18 Jiwa/Km<sup>2</sup> naik 11,46 Jiwa/Km<sup>2</sup> dari tahun lalu 963,72 Jiwa/Km<sup>2</sup>.

Padatnya Kota Tarakan disebabkan oleh posisinya sebagai kota administratif, kota industri, kota perdagangan dan kota transportasi, sehingga perputaran ekonomi lebih dinamis di wilayah ini. Kondisi ini menjadikannya daya tarik bagi para pendatang dan penduduk lainnya untuk bekerja dan bertempat tinggal di Kota Tarakan.

Wilayah terpadat kedua adalah Kabupaten Nunukan dengan kepadatan sebesar 15,20 Jiwa/Km<sup>2</sup> naik 1,18 Jiwa/Km<sup>2</sup> dari tahun lalu 14,02 Jiwa/Km<sup>2</sup>. Nunukan menjadi padat penduduk kedua yang salah satu sebabnya yaitu karena letaknya yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia.

Nunukan menjadi pintu gerbang perpindahan penduduk dan perdagangan antara dua negara. Sedangkan tingkat kepadatan penduduk terendah yaitu Kabupaten Malinau dengan tingkat

kepadatan sebesar 1,94 Jiwa/Km<sup>2</sup> naik 0,02 Jiwa/Km<sup>2</sup> dari tahun lalu 1,92 Jiwa/Km<sup>2</sup> yang salah satu sebabnya yaitu karena hampir sebagian besar wilayah Kabupaten Malinau adalah kawasan hutan lindung dan hutan konservasi yang tidak memungkinkan untuk dihuni.

Dengan perbedaan kepadatan penduduk per wilayah kabupaten/kota yang cukup mencolok tersebut, maka pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Utara dipandang perlu meningkatkan penataan dan pengaturan persebaran penduduk, tata ruang, pendayagunaan lahan dan peningkatan lapangan kerja yang akan mengendalikan mobilisasi penduduk secara alami.

#### 4. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk adalah rata-rata laju pertumbuhan penduduk di suatu daerah selama periode waktu tertentu, sehingga dapat diketahui perubahan jumlah penduduk antar dua periode waktu.

Laju pertumbuhan penduduk adalah salah satu indikator yang paling sering digunakan untuk menggambarkan suatu kondisi kependudukan suatu daerah di masa kini maupun di masa depan. Secara umum pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh faktor alami yaitu kelahiran dan kematian, dan faktor non alami yaitu migrasi (perpindahan penduduk).

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2021 adalah 698.003 jiwa dan jumlah penduduk di tahun 2023 adalah 726.989 jiwa.

Dengan demikian pertambahan jumlah penduduk yang berasal dari dinamika / demografi penduduk seperti fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian), maturnitas (perkawinan), migrasi (perpindahan) dan mobilitas sosial periode tahun 2021-2023 adalah 28.986 jiwa atau sebesar 4,15% naik 1,64% dari tahun 2020-2021 sebesar 2,51% atau bertambah 11.877 jiwa dari tahun 2020-2021 sebesar 17.109 jiwa. Berikut pertumbuhan penduduk Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021-2023 sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :<sup>6</sup>

**Tabel 3.5 Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten / Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara**

KODE WILAYAH	WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK	PERTUMBUHAN PENDUDUK (%)
--------------	---------	-----------------	--------------------------

<sup>6</sup> *Ibid*





		2021	2023	
6501	BULUNGAN	153.558	161.573	5,22
6502	MALINAU	81.925	82.629	0,86
6503	NUNUKAN	194.119	210.465	8,42
6504	TANA TIDUNG	26.508	27.553	3,94
6571	TARAKAN	241.893	244.769	1,19
<b>Total</b>		<b>698.003</b>	<b>726.989</b>	<b>4,15</b>

**Tahun 2021-2023**

Sumber : DKB 2 2023 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Dari tabel diatas terlihat bahwa laju pertumbuhan Penduduk Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021 ke tahun 2023 adalah 4,15% atau 28.986 jiwa.<sup>7</sup> Semua Kabupaten / Kota mengalami peningkatan jumlah penduduk dari yang tertinggi adalah Kabupaten Nunukan 8,42%, disusul Kabupaten Bulungan 5,22%, Kabupaten Tana Tidung 3,94%, Kota Tarakan 1,19% dan Kabupaten Malinau 0,86%. Jika dibandingkan dengan nilai persentase totalnya tahun 2021,<sup>8</sup> terjadi kenaikan sebesar 1,64%.

Tahun 2023 Kabupaten Bulungan mengalami pertumbuhan jumlah penduduk 5,22%, naik 1,78% dari tahun 2021 3,44%. Tahun 2023 Kabupaten Malinau mengalami pertumbuhan jumlah penduduk 0,86%, naik 0,02% dari tahun 2021 0,84%. Tahun 2023 Kabupaten Nunukan mengalami pertumbuhan jumlah penduduk sebesar 8,42%, naik 5,3% dari tahun 2021 3,12%. Tahun 2023 Kabupaten Tana Tidung mengalami pertumbuhan jumlah penduduk 3,94%, turun 0,62% dari tahun 2021 4,56%. Tahun 2023 Kota Tarakan mengalami pertumbuhan jumlah penduduk sebesar 1,19% turun 0,62% dari tahun 2021 1,81 %.

Maka jika dilihat dari selisih perbandingan nilai persentase pertumbuhan jumlah penduduk tahun 2020-2021 dengan tahun 2021-2023 diatas, Kabupaten yang mengalami peningkatan jumlah penduduk adalah Kabupaten Bulungan 1,78%, Malinau 0,02% dan Nunukan 5,3%. Dan yang

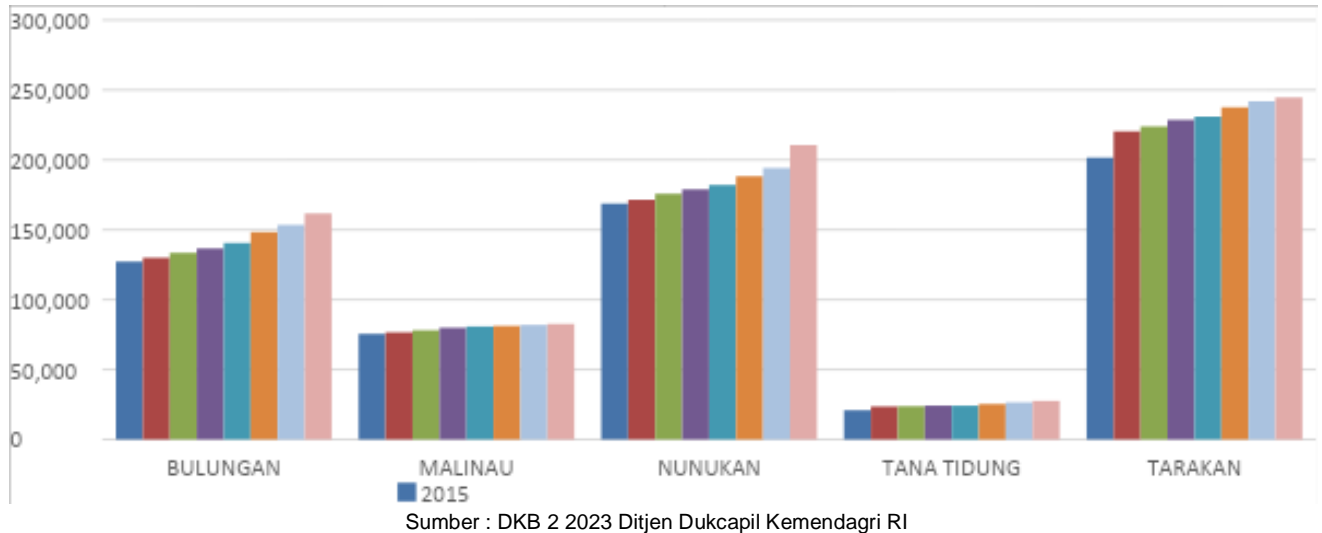
<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Pertumbuhan penduduk Kaltara 2020-2021 adalah 2,51%. Sumber: Tim, *Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021*, (Tanjung Selor : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara, 2023), hlm. 57.

mengalami penurunan persentase pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Tana Tidung dan Kota Tarakan masing-masing 0,62%.

Untuk pertumbuhan jumlah penduduk tahun 2015-2023 dapat dilihat pada grafik berikut :

**Gambar 3.3 Grafik Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2023**



Diperkirakan sampai beberapa tahun ke depan, Kabupaten Bulungan akan mengalami peningkatan tren pertumbuhan penduduk, karena Kabupaten Bulungan sebagai tempat ibukota Provinsi Kalimantan Utara sebagai kota pemerintahan yang berada di Kecamatan Tanjung Selor yang direncanakan akan menjadi kota mandiri baru dan adanya pembangunan infrastruktur strategis nasional seperti Kantor Pemerintahan Provinsi, PLTA Sungai Kayan, Pelabuhan KIPIT Tanah Kuning, dll.

Kota Tarakan akan juga mengalami peningkatan tren pertumbuhan penduduk karena sebagai kota administratif, kota industri, kota perdagangan, juga merupakan pintu masuk utama menuju Kalimantan Utara melalui Bandar Udara Internasional Juwata Tarakan.

Kabupaten Tana Tidung tahun ini mengalami peningkatan jumlah penduduk terbesar salah satunya dikarenakan banyaknya kedatangan penduduk dari penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten, kelahiran penduduk dan lainnya.

Kabupaten Nunukan yang mayoritas penduduknya mendiami perbatasan juga diperkirakan mengalami peningkatan penduduk karena sebagai pintu perbatasan negara tetangga banyak masyarakat yang datang dan menetap untuk bekerja dan mencari penghidupan.

Sedangkan Kabupaten Malinau mengalami pertumbuhan penduduk terkecil, salah satu faktor kemungkinan penyebabnya adalah di karena pemerintah nya tidak menerima warga Transmigrasi, wilayah nya yang sebagian besar adalah hutan lindung, dan sebagainya.

## B. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Demografi

Demografi adalah ilmu kependudukan yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan.

Analisis demografi merujuk masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnis tertentu.

Indikator penduduk menurut karakter demografi dapat dilihat dari usia dan jenis kelamin, status perkawinan, keluarga, pendidikan, agama, kecacatan, kelahiran dan kematian.

### 1. Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis kelamin

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih, dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap.

Penduduk menurut kelompok umur merupakan penduduk yang dikelompokkan menurut kelompok umur 5 tahunan.

Karakteristik penduduk menurut umur dan jenis kelamin berguna dalam membantu menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk sesuai dengan kebutuhan kelompok umur masing-masing seperti kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, hiburan dan lain-lain.

Setiap kelompok umur memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, misalnya kelompok bayi dan balita, mereka lebih membutuhkan asupan gizi yang baik dan perawatan kesehatan.

Data penduduk ini juga sangat vital jika dikaitkan dengan program-program yang digalakkan pemerintah.

Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin tergambar dalam tabel berikut

:<sup>9</sup>

**Tabel 3.6 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023**

KELOMPOK	JENIS KELAMIN (JIWA)	JUMLAH
----------	----------------------	--------

<sup>9</sup> Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI, *Op.cit.*



UMUR	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		PENDUDUK	
	n	%	n	%	n	%
75 >	4.246	1,11	4.159	1,20	8.405	1,16
70-74	4.439	1,16	3.669	1,06	8.108	1,12
65-69	7.347	1,93	6.187	1,79	13.534	1,86
60-64	11.112	2,91	9.567	2,77	20.679	2,84
55-59	16.335	4,28	13.480	3,90	29.815	4,10
50-54	22.983	6,03	19.333	5,59	42.316	5,82
45-49	26.527	6,96	22.995	6,65	49.522	6,81
40-44	31.437	8,24	28.089	8,13	59.526	8,19
35-39	29.491	7,73	27.814	8,05	57.305	7,88
30-34	30.113	7,90	27.673	8,01	57.786	7,95
25-29	32.579	8,54	29.313	8,48	61.892	8,51
20-24	34.509	9,05	31.694	9,17	66.203	9,11
15-19	31.101	8,16	29.250	8,46	60.351	8,30
10-14	37.763	9,90	35.368	10,23	73.131	10,06
05-09	36.609	9,60	33.993	9,84	70.602	9,71
00-04	24.776	6,50	23.038	6,67	47.814	6,58
<b>TOTAL</b>	<b>381.367</b>	<b>100,00</b>	<b>345.622</b>	<b>100,00</b>	<b>726.989</b>	<b>100,00</b>

Sumber : DKB 2 2023 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Tabel diatas menunjukkan bahwa penduduk Provinsi Kalimantan Utara pada kelompok umur 10-14 tahun merupakan jumlah terbanyak dengan persentase sebesar 10,06% atau 73.131 jiwa turun 0,2% atau naik 1.485 jiwa dari tahun 2021 sebesar 10,26% atau 71.646 jiwa. Dengan rincian laki-laki 37.763 jiwa atau 9,90% naik 0,24% atau 754 jiwa dari tahun 2021 10,14% atau

37.009 jiwa dan perempuan 35.368 jiwa atau 10,23% naik 0,17% atau 731 jiwa dari tahun 2021 10,40% atau 34.637 jiwa.

Penduduk terbanyak kedua pada kelompok umur 05-09 tahun sebesar 70.602 jiwa atau 9,71% turun 0,21% atau 1.363 jiwa dari tahun 2021 sebesar 9,92% atau 69.239 jiwa dari jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Utara.

Kedua persentase terbesar ini merupakan usia sekolah menengah pertama dan usia sekolah dasar. Kondisi ini menuntut perhatian pemerintah provinsi Kalimantan Utara dalam penanganan kelompok penduduk usia ini karena menurut prediksi saat ini Indonesia sedang berada pada fase awal bonus demografi dimana puncaknya berada pada tahun 2028-2030 menuju Indonesia Emas 2045. Bonus Demografi merupakan kondisi dimana suatu wilayah atau negara memiliki jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) lebih banyak dibandingkan dengan usia non-produktif.<sup>10</sup>

Prasyarat yang harus dipenuhi oleh suatu negara apabila ingin memperoleh manfaat besar bonus demografi yaitu sumber daya manusia yang berkualitas. Karena dengan adanya masyarakat yang berkualitas dapat meningkatkan pendapatan perkapita suatu negara apabila ada kesempatan kerja yang produktif.

Kedua, terserapnya tenaga kerja menjadi faktor penting dalam memanfaatkan bonus demografi karena dengan banyak dibutuhkannya tenaga kerja, maka pengangguran akan berkurang dan kesejahteraan akan meningkat pesat.

Ketiga, meningkatkan tabungan di tingkat rumah tangga. Setiap rumah tangga memiliki potensi untuk membuka suatu usaha yang akan memberi lapangan pekerjaan untuk orang lain sehingga angka pengangguran menurun.

Terakhir, peran perempuan yang masuk ke dalam pasar kerja akan membantu peningkatan pendapatan dan akan lebih banyak lagi penduduk usia produktif menjadi benar-benar produktif.

## 2. Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*)

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara jumlah penduduk pria dan jumlah penduduk wanita pada suatu daerah pada suatu waktu tertentu, yang dinyatakan dalam berapa banyaknya penduduk pria berbanding 100 orang wanita. Jika *sex ratio* diatas 100 menunjukkan bahwa jumlah

---

<sup>10</sup> Disebut sebagai "bonus" karena kondisi ini tidak terjadi secara terus menerus melainkan hanya terjadi sekali dan tidak bertahan lama. Bonus demografi terjadi jika dua orang penduduk usia produktif (15-64) menanggung satu orang tidak produktif (kurang dari 15 tahun dan 65 tahun atau lebih)

penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan, sedangkan bila *sex rasionya* kurang dari 100 berarti jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki.

Data mengenai rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan sumber daya manusia laki-laki dan perempuan secara adil. Informasi tentang rasio jenis kelamin juga penting diketahui oleh masyarakat termasuk institusi partai politik, terutama untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen/legislatif.

Komposisi jumlah penduduk yang berimbang dan partisipasi aktif laki-laki dan perempuan dalam setiap proses pembangunan akan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan. Dari rasio jenis kelamin ini, diharapkan penentu kebijakan di level pusat dan daerah dapat membuat legislasi secara adil dan tidak bias gender. Dengan jumlah penduduk yang hampir berimbang antara laki-laki dan perempuan, maka sangat dibutuhkan peran aktif kedua belah pihak di berbagai bidang pembangunan, sehingga dapat dirasakan kesetaraan gender yang pada akhirnya akan mewujudkan tujuan pembangunan yang adil dan makmur. Data penduduk berdasarkan kelompok umur dan rasio jenis kelamin (*sex ratio*) Provinsi Kalimantan Utara selengkapnya pada tabel berikut <sup>11</sup>:

**Tabel 3.7 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023**

NO	NAMA WILAYAH	JENIS KELAMIN		PENDUDUK	Rasio Jenis Kelamin
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
1	BULUNGAN	85.113	76.460	161.573	<b>111,32</b>
2	MALINAU	43.566	39.063	82.629	<b>111,53</b>
3	NUNUKAN	111.673	98.792	210.465	<b>113,04</b>
4	TANA TIDUNG	14.446	13.107	27.553	<b>110,22</b>
5	KOTA TARAKAN	126.569	118.200	244.769	<b>107,08</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>381.367</b>	<b>345.622</b>	<b>726.989</b>	<b>110,34</b>

Sumber : DKB 2 2023 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Dari tabel di atas nampak bahwa Rasio Jenis Kelamin (RJK) atau *Sex Ratio* di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021 adalah 110,34 atau naik 0,73 dari tahun 2021 sebesar 109,61 yang

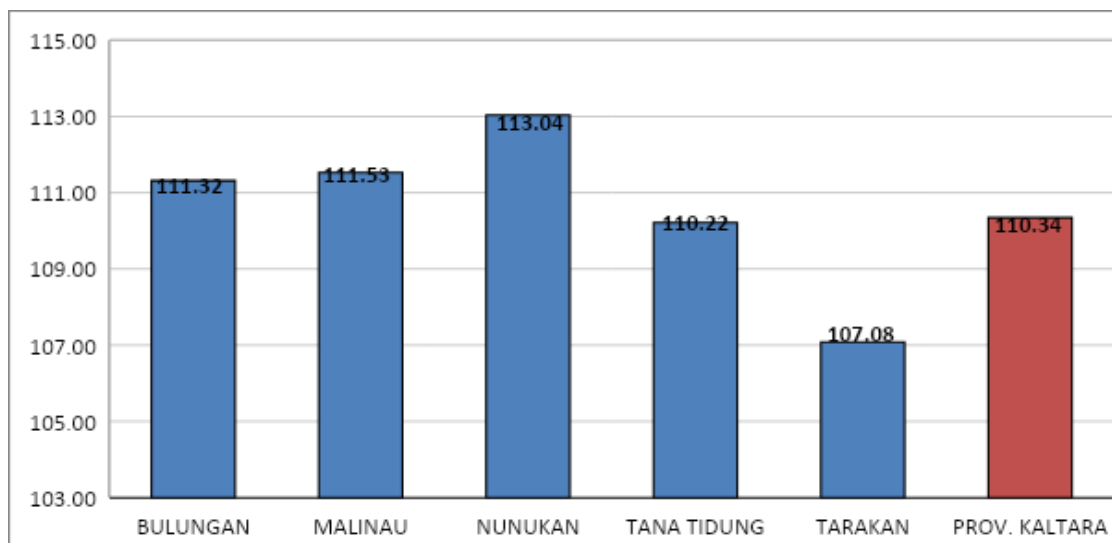
<sup>11</sup> Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI, *Op.cit.*

berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 110 orang penduduk laki-laki naik 1 orang dari tahun lalu 109. Jika dilihat per kabupaten/kota pada tabel, terlihat bahwa rasio jenis kelamin (*sex ratio*) di setiap Kabupaten/Kota di atas 100, hal ini berarti bahwa jumlah penduduk laki-laki di setiap Kabupaten/Kota lebih banyak daripada perempuan.

Jika diamati masing-masing wilayah Kabupaten/Kota, maka terlihat bahwa Kabupaten Nunukan memiliki rasio jenis kelamin tertinggi yaitu 113,04 (naik 2,62 dari tahun 2021 110,42), diikuti Kabupaten Malinau 111,53 (naik 0,24 dari tahun 2021 111,29) Kabupaten Bulungan sebesar 111,32 (turun 0,1 dari tahun 2021 111,22); Kabupaten Tana Tidung sebesar 110,22 (turun 0,75 dari tahun 2021 110,97) sedangkan rasio jenis kelamin terendah adalah Kota Tarakan 107,08 (turun 0,19 dari tahun 2021 107,27).

Apabila data rasio jenis kelamin ini disajikan dalam bentuk grafik, maka akan terlihat seperti berikut ini :

**Gambar 3.4 Grafik Rasio Jenis Kelamin Provinsi Kalimantan Utara per Kabupaten/Kota Tahun 2023**



Sumber : DKB 2 2023 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

### 3. Piramida Penduduk

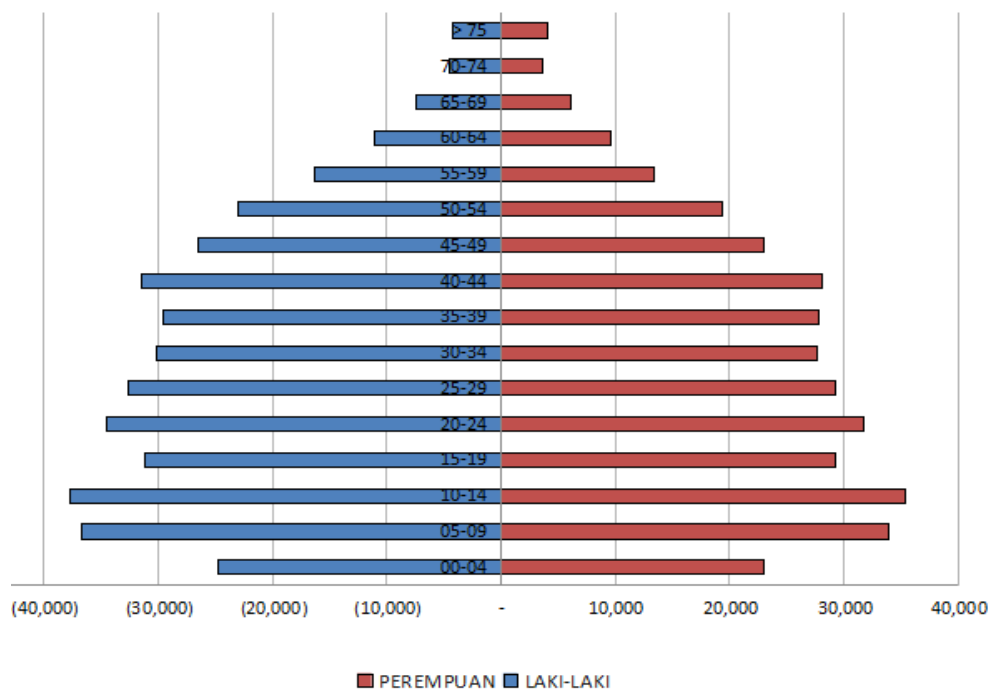
Piramida Penduduk adalah grafik mendatar atau diagram batang yang menyajikan data penduduk berdasarkan umur, jenis kelamin dan daerah suatu penduduk. Piramida penduduk disajikan dalam dua buah grafik batang, pada satu sisi menunjukkan jumlah penduduk laki-laki dan pada sisi lainnya menunjukkan jumlah penduduk perempuan dalam kelompok interval usia penduduk

lima tahunan. Untuk laki-laki digambarkan di sisi kanan dan untuk perempuan di sisi kiri. Piramida penduduk ini mengandung beberapa informasi, yaitu:

- 1) Jumlah angka kelahiran semakin bertumbuh sehingga jumlah penduduk juga bertambah;
- 2) Rasio perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan;
- 3) Penggolongan penduduk berdasarkan usia secara berkala;
- 4) Jumlah usia produktif dan non-produktif;
- 5) Jumlah lapangan kerja yang dibutuhkan;
- 6) Kebutuhan infrastruktur pendidikan untuk penduduk;
- 7) Perkiraan jumlah kelahiran di masa depan;
- 8) Perkiraan jumlah kematian yang akan terjadi, dsb.

Berikut gambaran piramida penduduk Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin :<sup>12</sup>

**Gambar 3.5 Piramida Penduduk Menurut Kelompok Umur Kalimantan Utara Tahun 2023**



Sumber : DKB 2 2023 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Piramida penduduk Provinsi Kalimantan utara tahun 2023 berdasarkan komposisi penduduk umur dan jenis kelamin menunjukkan ciri *Expansive* yang artinya sebagian besar penduduk berada

<sup>12</sup> *Ibid.*





dalam kelompok umur muda dan umur produktif dibandingkan kelompok umur di atasnya dan *Rapid Growth* yang artinya persentase penduduk umur muda yang besar. Pada piramida penduduk di atas, terlihat bahwa jumlah penduduk kelompok umur 0-4 tahun yang terletak pada dasar piramida lebih kecil dari kelompok umur di atasnya yang berarti usia 0-4 tahun atau balita lebih sedikit daripada usia 5-9 tahun, dst. Jumlah terbesar adalah penduduk 10-14 tahun, yang berarti dibutuhkan perhatian lebih untuk mengakomodir pemenuhan segala kebutuhan penduduk kelompok umur ini contohnya penyediaan sekolah dasar dan menengah di sektor pendidikan.

Jumlah penduduk pada kelompok usia 20-24 tahun dan kelompok usia 25-29 tahun menunjukkan jumlah yang paling besar pada kelompok usia produktif (usia 15-64) dengan jumlah keduanya 128.095 jiwa atau 17,62% dari total penduduk Kalimantan Utara meningkat 0,29% atau 7.080 jiwa dari tahun 2021 sebesar 17,33% atau 121.015 jiwa. Penduduk lansia (60 tahun ke atas) menunjukkan proporsi yang kecil, namun di masa depan proporsi penduduk lansia diperkirakan akan terus merambat naik, karena penambahan umur penduduk serta usia harapan hidup yang semakin meningkat. Pertambahan jumlah penduduk lansia ini harus mulai diantisipasi dari sekarang, karena kelompok ini akan terus bertambah di masa depan, sehingga diperlukan kebijakan yang baik di berbagai bidang seperti kesehatan, pelayanan lansia serta kebutuhan sosial dasar lainnya.

Selanjutnya ukuran untuk menyatakan "tua-muda" suatu penduduk dapat dilihat dari umur median penduduk tersebut. Umur median adalah umur yang membagi jumlah penduduk tepat menjadi dua bagian yang sama jumlahnya, bagian yang pertama lebih muda dan bagian yang kedua lebih tua daripada umur median. Umur median digunakan untuk mengukur tingkat pemusatan penduduk pada kelompok-kelompok umur tertentu. Penduduk Kalimantan Utara termasuk dalam kategori penduduk *Intermediate*. Setelah dihitung umur median penduduk Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 adalah 28,17 tahun, yang berarti setengah penduduk Kalimantan Utara pada tahun ini berusia di bawah 28 tahun dan setengahnya lagi berusia lebih tua dari 28 tahun.<sup>13</sup> Dengan kata lain, penduduk Provinsi Kalimantan utara dikategorikan sebagai penduduk dewasa (*intermediate*).<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Dibandingkan dengan tahun 2021, umur median penduduk Kalimantan Utara nya adalah 27,05 tahun, lebih tua 1,12 tahun dari tahun 2023. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara, *Op.cit.*, hlm. 65

<sup>14</sup> Suatu penduduk disebut sebagai "penduduk tua" jika umur median dari penduduk tersebut adalah 30 tahun ke atas. Jika umur mediannya antara 20-29 tahun maka disebut "penduduk dewasa" (*intermediate*). Dan jika umur mediannya dibawah 20 tahun maka disebut sebagai "penduduk muda".

#### 4. Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*)

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator kasar yang menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Rasio ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif (umur 15-64 tahun) dan usia non-produktif (umur 0-14 tahun ditambah umur 65 tahun ke atas). Rasio ini digunakan untuk melihat seberapa besar beban tanggungan yang harus ditanggung oleh penduduk produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk non-produktif. Sebaliknya semakin rendah rasio ketergantungan, maka semakin rendah pula beban kelompok produktif untuk menanggung penduduk usia belum produktif dan atau tidak produktif. Data kependudukan menurut kelompok produktif dan jenis kelamin Kalimantan Utara adalah sebagai berikut :<sup>15</sup>

**Tabel 3.8 Jumlah Penduduk Usia Produktif Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023**

KELOMPOK UMUR	JENIS KELAMIN (JIWA)				JUMLAH	
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		PENDUDUK	
	n	%	n	%	n	%
65 >	16.032	4,20	14.015	4,06	30.047	4,13
15-64	266.187	69,80	239.208	69,21	505.395	69,52
< 14	99.148	26,00	92.399	26,73	191.547	26,35
<b>TOTAL</b>	<b>381.367</b>	<b>100</b>	<b>345.622</b>	<b>100</b>	<b>726.989</b>	<b>100,00</b>

Sumber : DKB 2 2023 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Jika melihat tabel di atas dapat dianalisa bahwa hampir tiga perempatnya merupakan penduduk usia produktif yaitu kelompok umur 15-64 tahun yang berjumlah 505.395 jiwa naik 31.224 jiwa dari tahun 2021 sebesar 474.171 jiwa dan persentasenya 69,52% naik 1,59% dari tahun 2021 sebesar 67,93%.

Demikian pula dengan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, nampak bahwa penduduk laki-laki dan perempuan yang terbesar berada pada kelompok umur 15-64 tahun.

<sup>15</sup> Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI, *Op.cit.*

Kondisi ini sangat menguntungkan karena sebagian besar penduduk merupakan penduduk usia kerja (usia produktif) yang berpotensi sebagai modal pembangunan di masa depan menuju Bonus Demografi 2028-2030 dan Indonesia Emas 2045.

Untuk usia muda 0-14 tahun sebanyak 191.547 jiwa turun 7.130 jiwa dari tahun 2021 198.677 jiwa dan persentasenya 26,35% turun 2,11% dari tahun 2021 28,46% serta usia tua 65 tahun keatas 30.047 jiwa naik 4.892 jiwa dari tahun 2021 25.155 jiwa dan persentasenya 4,13% naik 0,53% dari tahun 2021 3,60%.

Penduduk usia muda harus mendapat perhatian karena 5 tahun mendatang kelompok ini akan menjadi tenaga kerja baru yang memerlukan *skill* dan kualitas SDM yang baik dan profesional.

Karena itu diperlukan dukungan sektor pendidikan dan / atau pelatihan yang baik serta ekosistem pendukung yang baik. Sehingga ketika mereka memasuki dunia kerja, mampu menjadi tenaga kerja yang profesional dibidangnya.

Di sisi lain, pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sejak dini harus mendorong sebuah kebijakan agar masyarakat mampu mendapatkan asupan gizi yang baik, sarana prasarana pendidikan yang memadai serta lingkungan yang ramah anak, baik di rumah di sekolah maupun di tempat umum, menciptakan lapangan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak dan lebih berkualitas.

Jika melihat struktur umur penduduk Kalimantan Utara, maka rasio ketergantungannya dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$DR = \frac{\text{Jumlah usia nonproduktif}}{\text{Usia produktif}} \times 100$$

$$DR = \frac{191.547+30.047}{505.395} \times 100 \\ = 43,85$$

Hitungan diatas menunjukkan rasio ketergantungan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 sebesar 43,85 % turun 3,35% dari tahun 2021 47,20%. Angka ini menunjukkan dari 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) di Provinsi Kalimantan Utara mempunyai tanggungan sekitar 43 sampai dengan 44 jiwa penduduk usia non produktif, turun 3-4 jiwa dari tahun 2021 sebesar 47 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel rinci berikut :<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

Tabel 3.9 Rasio Ketergantungan Penduduk Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023

KODE WILAYAH	KABUPATEN/KOTA	USIA PRODUKTIF (15-64)	USIA NON PRODUKTIF			RASIO KETERGANTUNGAN
			< 15	65 >	TOTAL	
6501	BULUNGAN	111.707	42.351	7.515	49.866	44,64
6502	MALINAU	56.772	22.343	3.514	25.857	45,545
6503	NUNUKAN	148.820	53.345	8.300	61.645	41,42
6504	TANA TIDUNG	18.692	7.962	899	8.861	47,41
6571	TARAKAN	169.404	65.546	9.819	75.365	44,49
	<b>TOTAL</b>	<b>505.395</b>	<b>191.547</b>	<b>30.047</b>	<b>221.594</b>	<b>43,85</b>

Sumber : DKB 2 2023 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

## 5. Jumlah Penduduk Menurut Status Kawin

Jumlah penduduk jika dilihat menurut status perkawinan dapat dilihat pada tabel berikut ini :<sup>17</sup>

Tabel 3.10 Status Perkawinan Penduduk Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023

STATUS KAWIN	JENIS KELAMIN (JIWA)		JUMLAH PENDUDUK	PERSENTASE (%)
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
BELUM KAWIN	212.901	166.385	379.286	52,17
KAWIN	159.347	157.362	316.709	43,56
CERAI HIDUP	5.045	6.452	11.497	1,58
CERAI MATI	4.074	15.423	19.497	2,68
<b>TOTAL</b>	<b>381.367</b>	<b>345.622</b>	<b>726.989</b>	<b>100</b>

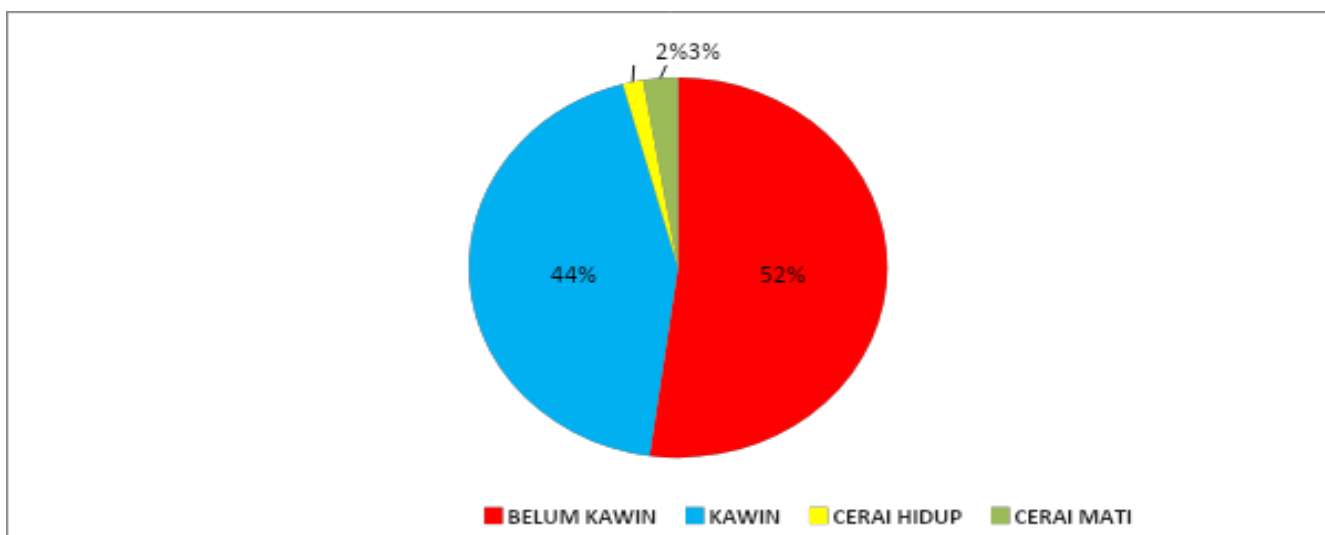
Sumber : DKB 2 2023 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk Provinsi Kalimantan Utara didominasi penduduk berstatus belum kawin sebanyak 52,17% naik 0,02% dari tahun 2021 52,15%. Jika dilihat menurut jenis kelamin terlihat bahwa proporsi penduduk laki-laki yang belum kawin lebih besar dibandingkan dengan penduduk perempuan yang belum kawin. Hal ini dapat disebabkan karena

<sup>17</sup> *Ibid.*

laki-laki cenderung meneruskan pendidikan dan / atau baru mulai bekerja untuk dapat membiayai pernikahannya sehingga menunda perkawinan dan juga dapat disebabkan laki-laki yang nantinya akan menjadi kepala rumah tangga berkeinginan untuk hidup mapan secara ekonomi sebelum memasuki kehidupan berumah tangga demi memenuhi kebutuhan keluarga. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram berikut ini :

**Gambar 3.6 Diagram Status Perkawinan Penduduk Kalimantan Utara Tahun 2023**



Sumber : DKB 2 2023 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Proporsi penduduk dengan status cerai hidup dan cerai mati lebih tinggi pada perempuan dibandingkan penduduk laki-laki. Pada beberapa kasus hal ini dapat disebabkan karena perempuan memiliki lebih banyak pertimbangan untuk menikah kembali khususnya pada perempuan yang mandiri secara ekonomi sehingga menunda perkawinan kembali, dapat pula disebabkan masih adanya trauma dari perkawinan sebelumnya. Untuk data status perkawinan Kabupaten / Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 dapat dilihat di tabel berikut :<sup>18</sup>

**Tabel 3.11 Status Perkawinan Per Kabupaten / Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023**

KABUPATEN / KOTA	STATUS PERKAWINAN								TOTAL	
	BELUM KAWIN		KAWIN		CERAI HIDUP		CERAI MATI			
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
BULUNGAN	82.374	11,33	72.013	9,91	2.568	0,35	4.618	0,64	161.573	22,22
MALINAU	44.248	6,09	35.630	4,90	654	0,09	2.097	0,29	82.629	11,37

<sup>18</sup> *Ibid.*



NUNUKAN	110.816	15,24	92.354	12,70	2.493	0,34	4.802	0,66	210.465	28,95
TANA TIDUNG	14.363	1,98	12.241	1,68	320	0,04	629	0,09	27.553	3,79
TARAKAN	127.485	17,54	104.471	14,37	5.462	0,75	7.351	1,01	244.769	33,67
<b>TOTAL</b>	<b>379.286</b>	<b>52,17</b>	<b>316.709</b>	<b>43,56</b>	<b>11.497</b>	<b>1,58</b>	<b>19.497</b>	<b>2,68</b>	<b>726.989</b>	<b>100,00</b>

Sumber : DKB 2 2023 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa di seluruh kabupaten / kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara status perkawinan didominasi oleh status belum kawin seperti telah disebutkan diatas. Dan untuk semua status perkawinan (belum kawin, kawin, cerai hidup dan cerai mati) angka tertinggi ada di Kota Tarakan disusul Kabupaten Nunukan, Bulungan, Malinau dan Tana Tidung.

## C. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Sosial

### 1. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Terakhir

Tingkat pendidikan merupakan salah satu ukuran untuk kualitas penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang diselesaikan semakin baik kualitas SDM di wilayah tersebut. Namun ukuran ini masih harus ditambah dengan etos kerja dan keterampilan baik *hard skill* maupun *soft skill*. Beberapa pelaku usaha menyatakan bahwa yang dibutuhkan tidak saja keterampilan tetapi juga *attitude* (sikap perilaku/kepribadian), karena kepribadian dapat mencerminkan etos kerja dan untuk meningkatkan kepribadian membutuhkan waktu yang relatif lama, sedangkan keterampilan dapat ditingkatkan melalui bimbingan dan pelatihan.

Tamat belajar/pendidikan didefinisikan sebagai jenjang pendidikan yang telah berhasil diselesaikan oleh seseorang dengan dibuktikan adanya ijazah atau surat tanda tamat belajar. Jenjang pendidikan tertinggi merupakan jenjang atau kelas pendidikan tertinggi yang pernah diselesaikan oleh seseorang.

Pemerintah Kalimantan Utara perlu memperhatikan kondisi saat ini mengingat bahwa era revolusi industri 5.0 telah berlangsung dan persaingan yang ketat untuk memperoleh pekerjaan di Indonesia. Perlunya peningkatan pendidikan misalnya program 1 Sarjana 1 KK untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan eksplorasi terhadap pekerjaan baik menciptakan lapangan pekerjaan maupun sebagai tenaga kerja yang berkualitas, penilaian terhadap kemampuan diri yang dikaitkan dengan masalah pekerjaan, perencanaan pekerjaan, pengambilan keputusan dalam pemilihan pekerjaan. Peningkatan akses kependidikan yang merata terutama untuk penduduk perbatasan, 3T

(tertinggal, terencil, terluar) serta ekonomi menengah kebawah perlu dilakukan mengingat bahwa sebagian besar peluang kerja membutuhkan tenaga terdidik yang memiliki keterampilan khusus. Untuk data penduduk menurut pendidikan dan jenis kelamin di Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini :<sup>19</sup>

Tabel 3.12 Tingkat Pendidikan Terakhir Penduduk Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023

PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN (JIWA)				JUMLAH	PERSENTASE
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		PENDUDUK	(%)
	n	%	n	%	n	%
TIDAK / BELUM SEKOLAH	110.577	15,21	104.170	14,33	214.747	29,54
BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	55.217	7,60	49.488	6,81	104.705	14,40
TAMAT SD/SEDERAJAT	64.524	8,88	60.559	8,33	125.083	17,21
SLTP/SEDERAJAT	46.662	6,42	43.504	5,98	90.166	12,40
SLTA/SEDERAJAT	80.447	11,07	62.441	8,59	142.888	19,65
DIPLOMA I / II	1.322	0,18	1.498	0,21	2.820	0,39
AKADEMI / D-III / S. MUDA	3.854	0,53	6.483	0,89	10.337	1,42
DIPLOMA IV / STRATA I	17.311	2,38	16.829	2,31	34.140	4,70
STRATA II	1.397	0,19	631	0,09	2.028	0,28
STRATA III	56	0,01	19	0,00	75	0,01
<b>TOTAL</b>	<b>381.367</b>	<b>52</b>	<b>345.622</b>	<b>48</b>	<b>726.989</b>	<b>100</b>

Sumber : DKB 2 2023 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Tabel 3.13 Tingkat Pendidikan Terakhir Penduduk Per Kabupaten/Kota Tahun 2023

PENDIDIKAN	KABUPATEN / KOTA					TOTAL
	BULUNGAN	MALINAU	NUNUKAN	TANA TIDUNG	TARAKAN	
TIDAK / BELUM SEKOLAH	54.621	20.894	60.034	7.028	72.170	214.747

<sup>19</sup> *Ibid.*



BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	21.037	14.910	38.246	4.241	26.271	104.705
TAMAT SD/SEDERAJAT	26.830	11.293	46.472	4.584	35.904	125.083
SLTP/SEDERAJAT	18.549	9.842	24.589	3.133	34.053	90.166
SLTA/SEDERAJAT	27.976	17.626	31.449	5.404	60.433	142.888
DIPLOMA I / II	718	374	748	185	795	2.820
AKADEMI / D-III / S. MUDA	2.257	1.870	2.004	749	3.457	10.337
DIPLOMA IV / STRATA I	9.036	5.427	6.655	2.147	10.875	34.140
STRATA II	536	380	263	80	769	2.028
STRATA III	13	13	5	2	42	75
<b>TOTAL</b>	<b>161.573</b>	<b>82.629</b>	<b>210.465</b>	<b>27.553</b>	<b>244.769</b>	<b>726.989</b>

Sumber : DKB 2 2023 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Dengan melihat jumlah komposisi penduduk yang memiliki pendidikan SLTA / Sederajat keatas tentunya akan berpengaruh terhadap tingkat perekonomian dan kesejahteraan karena pendidikan formal yang ditamatkan cukup berpengaruh terhadap penghasilan yang diperoleh. Artinya, penduduk yang tingkat pendidikannya rendah tidak akan terserap oleh pasar tenaga kerja, akan menjadi pengangguran, sehingga menambah pula jumlah penduduk miskin.

Keterkaitan tingkat pendidikan dengan kemiskinan sangat besar, karena pendidikan memberikan kesempatan terhadap individu untuk berkembang melalui ilmu pengetahuan dan keterampilan.

Kemiskinan muncul karena kualitas sumber daya manusia yang rendah, dan kemiskinan juga menghalangi seseorang untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi.

Rendahnya tingkat pendidikan tersebut hanya salah satu faktor yang menyebabkan kemiskinan, faktor lainnya adalah: rendahnya derajat kesehatan; terbatasnya lapangan pekerjaan; dan wilayah yang terisolasi/terpencil.<sup>20</sup>

Keterisolasian menjadi salah satu kendala di Kalimantan Utara, karena masih banyak wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Penduduk di wilayah-wilayah tersebut pun sulit untuk

<sup>20</sup> Tsumma Lazuardini Imamia, *Hubungan Tingkat Pendidikan Dengan Pemberantasan Kemiskinan Di Indonesia*, Universitas Brawijaya



mengakses fasilitas pendidikan yang memadai. Untuk mengikuti ujian akhir berbasis komputer, siswa-siswa harus naik perahu berjam-jam melewati banyak jeram menuju ibukota kabupaten, dan menginap disana.

Maka untuk meningkatkan tingkat pendidikan tersebut pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dibawah kepemimpinan Bp Drs. H. Zainal Paliwang, SH, M.Hum dan Bp Dr. Drs. Yansen TP, M.Si telah mencanangkan program Wajib Belajar 16 tahun atau pendidikan sampai D4 / S1.<sup>21</sup>

## 2. Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan

Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia pada sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, dan dalam Pasal 29 ayat 1 UUD 1945 dinyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya”, memberikan jaminan kepada seluruh warga negaranya untuk melaksanakan ibadah atau ritual agamanya.

Agama di sini meliputi seluruh sistem kepercayaan, baik agama-agama samawi monotheis, polytheis, maupun agama-agama yang bersumber dari adat istiadat atau kepercayaan leluhur.<sup>22</sup>

Kemudian dalam hal kebijakan bidang keberagamaan, data penduduk berdasarkan agama yang dianut dapat menjadi acuan pemerintah untuk mengambil kebijakan terkait dengan kebebasan dan toleransi kehidupan beragama, dan perencanaan sarana dan prasarana peribadatan.

Data agama penduduk dibagi tiap jenis kelamin dan setiap kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini : <sup>23</sup>

AGAMA	JENIS KELAMIN (JIWA)		JUMLAH (JIWA)	PERSENTASE
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN		(%)

<sup>21</sup> <https://diskominfo.kaltaraprov.go.id/wagub-wajib-belajar-16-tahun-bagian-dari-persiapan-generasi-emas-kaltara/> diakses 1 Maret 2023 pukul 11.49 WITA

<sup>22</sup> Sila pertama Pancasila bukan hanya untuk monotheisme. Jika kita membahasnya dalam bahasa Sansekerta ataupun Pali, Ketuhanan Yang Maha Esa bukanlah Tuhan yang bermakna satu. Ketuhanan berasal dari kata tuhan yang diberi awalan ke- dan akhiran -an membuatnya menjadi kata sifat, yang bermakna: “mengalami hal” atau “Memiliki sifat-sifat”. Dengan kata lain, ketuhanan berarti sifat-sifat tuhan atau sifat-sifat yang berhubungan dengan tuhan. Kata Maha bisa berarti mulia atau besar (bukan dalam pengertian bentuk). Kata Maha bukan berarti sangat. Kata “esa” bukan berarti satu atau tunggal dalam jumlah. Kata “esa” berasal dari kata “etad” yang lebih mengacu pada pengertian keberadaan yang mutlak atau mengacu pada kata “ini” (*this-Inggris*). Sedangkan kata “satu” dalam pengertian jumlah adalah kata “eka”. Jika yang dimaksud dalam sila pertama adalah jumlah Tuhan yang satu, maka kata yang seharusnya digunakan adalah “eka” bukan kata “esa”.

<sup>23</sup> Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI, *Op.cit.*



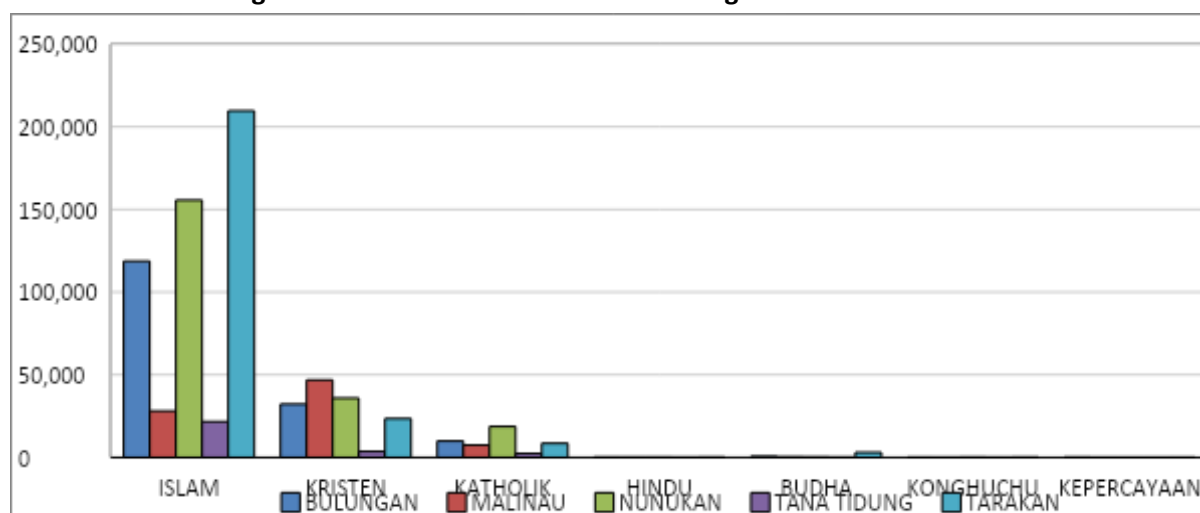
ISLAM	279.146	254.529	533.675	73,41
KRISTEN	74.675	67.222	141.897	19,52
KATHOLIK	25.224	21.540	46.764	6,43
HINDU	171	164	335	0,05
BUDHA	2.038	2.053	4.091	0,56
KONGHUCHU	74	76	150	0,02
KEPERCAYAAN	39	38	77	0,01
<b>TOTAL</b>	<b>381.367</b>	<b>345.622</b>	<b>726.989</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 3.14 Jumlah Penduduk Menurut Agama di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023**

Sumber : DKB 2 2023 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Dilihat dari tabel diatas penduduk Provinsi Kalimantan Utara didominasi pemeluk agama Islam sebesar 533.675 jiwa naik 21.799 jiwa dari tahun 2021 511.876 jiwa persentasenya 73,41% naik 0,08% dari tahun 2021 73,33%, kemudian disusul pemeluk agama Kristen sebesar 141.897 jiwa naik 3.459 jiwa dari tahun 2021 138.438 jiwa, persentasenya 19,52% turun 0,31% dari tahun 2021 19,83%, kemudian agama Katholik 46.764 jiwa naik 3.696 jiwa dari tahun 2021 43.068 jiwa, persentasenya 6,43% naik 0,26% dari tahun 2021 6,17% sedangkan Hindu, Budha dan Konghucu serta aliran Kepercayaan dibawah 1%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar 3.7 Diagram Persentase Penduduk Menurut Agama Kalimantan Utara Tahun 2023**



Sumber : DKB 2 2023 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Tabel 3.15 Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara  
Tahun 2023

AGAMA	KABUPATEN / KOTA					TOTAL	
	BULUNGAN	MALINAU	NUNUKAN	TANA TIDUNG	TARAKAN	(JIWA)	(%)
ISLAM	118.730	28.041	155.635	21.632	209.637	533.675	73,41
KRISTEN	32.187	46.843	35.849	3.571	23.447	141.897	19,52
KATHOLIK	9.873	7.413	18.677	2.298	8.503	46.764	6,43
HINDU	97	73	63	4	98	335	0,05
BUDHA	610	258	173	48	3.002	4.091	0,56
KONGHUCHU	6	1	66	-	77	150	0,02
KEPERCAYAAN	70	-	2	-	5	77	0,01
<b>TOTAL</b>	<b>161.573</b>	<b>82.629</b>	<b>210.465</b>	<b>27.553</b>	<b>244.769</b>	<b>726.989</b>	<b>100</b>

Sumber : DKB 2 2023 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Dari tabel diatas <sup>24</sup> Agama Islam terbesar ada di Kota Tarakan sebesar 209.637 jiwa naik 2.778 jiwa dari tahun 2021 206.859 jiwa, diikuti Kabupaten Nunukan 155.635 jiwa naik 12.042 jiwa dari tahun 2021 143.593 jiwa, dan Kabupaten Bulungan 118.730 jiwa naik 5.759 jiwa dari tahun 2021 112.971 jiwa, Kabupaten Malinau 28.041 jiwa naik 432 jiwa dari tahun 2021 27.609 jiwa, dan Kabupaten Tana Tidung 21.632 jiwa naik 788 jiwa dari tahun 2021 20.844 jiwa.

Agama kedua terbesar adalah agama Kristen, Kabupaten Malinau merupakan wilayah dengan agama Kristen terbesar dengan jumlah 46.843 jiwa naik 37 jiwa dari tahun 2021 46.806 jiwa diikuti Kabupaten Nunukan 35.849 jiwa naik 1.936 jiwa dari tahun 2021 33.913 jiwa, Kabupaten Bulungan 32.187 jiwa naik 1.281 jiwa dari tahun 2021 30.906 jiwa, Kota Tarakan 23.447 jiwa naik 28 jiwa dari tahun 2021 23.419 jiwa, dan Kabupaten Tana Tidung 3.571 jiwa naik 177 jiwa dari tahun 2021 3.394 jiwa.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

### 3. Jumlah Rata-Rata Anggota Keluarga

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 1988, mendefinisikan keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul, serta tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Definisi ini digunakan pada pengajaran di sekolah-sekolah, seperti yang terdapat pada salah satu modul pengajaran sosiologi yang menjelaskan bahwa keluarga adalah kelompok sosial terkecil dalam masyarakat, yang terdiri dari orang tua (ayah dan ibu) serta anak. Modul tersebut juga menyebutkan bahwa setiap anggota dalam keluarga memiliki peranan yang berbeda. Pada masa lampau, peran ayah seringkali diasosiasikan sebagai pencari nafkah utama. Sementara itu, ibu mengurus semua kebutuhan di rumah, seperti memasak, membersihkan rumah, dan mengasuh anak namun mereka adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pendefinisian keluarga oleh pemerintah pada masa itu tentunya disesuaikan dengan kondisi riil yang banyak ditemui di masyarakat. Pada akhir tahun 1980-an, keluarga ideal adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, nenek, kakek, paman, bibi, dan anak. Tiap anggota keluarga tersebut memiliki peran yang berbeda-beda namun saling melengkapi.<sup>25</sup> Situasi tersebut menunjukkan bagaimana pemerintah memiliki kontrol yang kuat terhadap masyarakat pada masa itu, baik melalui media<sup>26</sup> maupun pendidikan. Hal ini tidak mengherankan sebab pembatasan jumlah anak menjadi salah satu prioritas pembangunan utama oleh pemerintah masa itu. Sebagai konsekuensinya, definisi keluarga pun mengikuti arah pembangunan tersebut.

Definisi lain dari keluarga adalah ia merupakan unit terkecil dari masyarakat dalam sistem sosial sebagai tempat untuk belajar bersosialisasi, artinya proses belajar bagi individu menempatkan diri dalam masyarakat dan kelompok sosialnya. Keluarga merupakan embrio atau miniatur berbagai unsur sistem sosial manusia. Oleh karena itu, kondisi keluarga dapat mempengaruhi kualitas sebuah masyarakat. Dalam UU Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga disebutkan bahwa pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan

---

<sup>25</sup> Dalam hal ini, peran ayah adalah sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah utama. Dengan kata lain, ayah adalah orang yang bertanggungjawab di ranah publik. Di lain pihak, ibu adalah orang yang bertanggung jawab di ranah privat atau domestik sebab mereka memiliki tugas utama merawat dan mengasuh anak, serta mengurus keperluan rumah tangga. Anak juga digambarkan sebagai pribadi yang senantiasa menurut perintah baik orang tua

<sup>26</sup> Salah satu acara yang menggambarkan keluarga pada tahun 80an adalah sinetron Rumah Masa Depan, yang menggambarkan keluarga ideal, terdiri dari kakek, nenek, ayah, ibu, dan dua anak yang tinggal di desa. Mereka tinggal dalam satu rumah dengan peran yang berbeda dan anak-anaknya digambarkan sebagai anak penurut.

keluarga yang berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.<sup>27</sup> Unit keluarga menjadi hal penting untuk berbagai intervensi seperti penanganan kemiskinan, keluarga berencana, kesehatan dan lain sebagainya.

Keluarga terbagi menjadi dua yaitu keluarga inti/batih (*nuclear family*) dan keluarga luas (*extended family*). *Nuclear family* adalah keluarga inti atau keluarga dasar yaitu istilah yang digunakan untuk mendefinisikan sebuah keluarga, kelompok yang terdiri dari sepasang orang dewasa dan anak-anak mereka. *Extended family* adalah keluarga diluar keluarga inti, yang terdiri dari kakek-nenek, bibi, paman, dan sepupu semua yang tinggal didekatnya atau di rumah yang sama. Besarnya jumlah anggota keluarga dapat digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan keluarga, dimana semakin kecil jumlah anggota keluarga relatif diasumsikan akan semakin tinggi tingkat kesejahteraannya namun setiap keluarga berbeda-beda.<sup>28</sup>

Jika melihat realitas sosial saat ini, beberapa definisi keluarga di atas, ada yang masih relevan dan ada pula yang sudah tidak relevan lagi. Persyaratan yang masih relevan adalah adanya syarat perkawinan, hubungan darah, atau pun adopsi. Syarat lain yang masih relevan adalah fungsi keluarga sebagai penerus kebudayaan.

Hal ini tercermin dalam pengalaman sehari-hari ketika generasi muda lebih banyak belajar dari keluarga mengenai masakan, bahasa, silsilah keluarga, ataupun cara berinteraksi dibandingkan dari pihak lain selain keluarga. Ikatan kekeluargaan yang masih sangat kuat di Indonesia menjadi dasar argumen relevansi syarat ini.

Namun, terdapat pula beberapa syarat yang sudah tidak relevan lagi. Pertama, adanya syarat seluruh anggota keluarga tinggal di bawah satu atap yang sama. Sekarang ini, banyak pasangan yang harus hidup terpisah ataupun banyak orang tua yang tinggal berjauhan dengan anak mereka karena alasan pekerjaan, studi maupun alasan lainnya.

Jarak tidak lagi menjadi alasan terbentuknya keluarga yang utuh karena semakin variatifnya media komunikasi dan alat transportasi yang ada. Seperti konsep *imagined community* yang dikemukakan oleh Anderson (1991), konsep keluarga masa kini pun dapat dibentuk berdasarkan

---

<sup>27</sup> BAB I Ketentuan Umum nomor 7 UU No.52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga

<sup>28</sup> Sekarang ini sudah banyak adanya satu keluarga yang terdiri dari 3 generasi yaitu generasi orang tua, anak, menantu dan cucu atau yang disebut dengan *sandwiches family* yaitu kondisi pasangan suami istri yang bersamaan merawat orang tua/mertua dan membesarkan anak-anak serta sekaligus bekerja penuh waktu. Salah satu persoalan yang dapat muncul adalah bagaimana dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan keluarga itu, dan bagaimana sistem pengasuhan baik orang tua maupun anak bisa berlangsung dengan baik dalam keluarga tersebut.

imajinasi dan ikatan perasaan yang dibangun antar anggota dalam keluarga itu tanpa mewajibkan kehadiran fisik mereka pada tempat dan waktu yang sama.

Kedua, adalah syarat keberadaan suami sebagai kepala keluarga dan peran anggota keluarga yang sangat deterministik. Sekarang ini, peran masing-masing anggota dalam keluarga tidak lagi bersifat patron-klien<sup>29</sup> seperti masa sebelumnya.

Ibu dapat menjadi kepala keluarga, anak perempuan dapat berfungsi sebagai pencari nafkah utama, dan ayah sebagai pengurus rumah tangga di rumah. Meskipun masih banyak masyarakat yang menyangkal, tetapi keberadaan situasi keluarga seperti ini tidak dapat dipungkiri dapat dijumpai di Indonesia.

Dengan kondisi seperti diuraikan di atas, kepemilikan Kartu Keluarga (KK) menjadi sangat penting. KK merupakan kartu identitas bagi sebuah keluarga yang memuat berbagai data penting, seperti nama, susunan anggota keluarga, hubungan, pekerjaan setiap anggota keluarga, dan berbagai informasi penting lainnya. Dalam penggunaannya, kartu keluarga akan sering dipakai sebagai salah satu persyaratan utama dalam pengurusan administrasi dan juga berbagai dokumen penting. Misalnya, pembuatan akta kelahiran bagi anak, pendaftaran anak masuk sekolah, penggantian KTP, dan berbagai urusan perbankan juga akan membutuhkan kartu keluarga sebagai persyaratannya.

**Tabel 3.16 Jumlah Rata-Rata Anggota Keluarga Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023**

NO	NAMA WILAYAH	JUMLAH KELUARGA	PENDUDUK	RATA-RATA JUMLAH ANGGOTA KELUARGA
1	BULUNGAN	49.809	161.573	3,24
2	MALINAU	24.470	82.629	3,38
3	NUNUKAN	73.484	210.465	2,86
4	TANA TIDUNG	8.856	27.553	3,11
5	TARAKAN	79.098	244.769	3,09

<sup>29</sup> Pola hubungan patron-klien merupakan aliansi dari dua kelompok komunitas atau individu yang tidak sederajat. Baik dari segi status, kekuasaan, maupun penghasilan sehingga menempatkan klien dalam kedudukan yang lebih rendah (inferior), dan patron dalam kedudukan yang lebih tinggi (superior). Atau, dapat pula diartikan bahwa patron adalah orang yang berada dalam posisi untuk membantu klien-kliennya (Scott, 1983 dan Jarry, 1991). sumber : <http://news.detik.com/opini/d-1367204/negeri-patron-klien-bernama-indonesia> diakses 30 Maret 2023 09.15 WITA

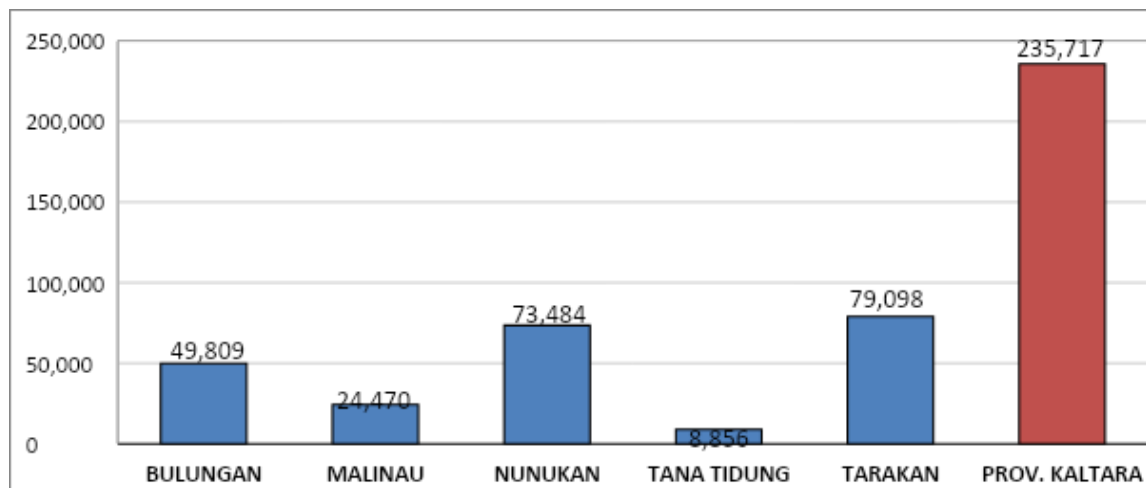
TOTAL	235.717	726.989	3,08
-------	---------	---------	------

Sumber : DKB 2 2023 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Dilihat dari tabel di atas<sup>30</sup> jumlah keluarga pada tahun 2023 di Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 235.717 keluarga naik 15.404 keluarga dari tahun 2021 220.313 keluarga yang tersebar di 5 (lima) Kabupaten/Kota. Kota Tarakan memiliki jumlah terbesar yaitu 79.098 keluarga naik 833 keluarga dari tahun 2021 78.265 keluarga, kemudian disusul oleh Kabupaten Nunukan 73.484 keluarga naik 9.998 keluarga dari tahun 2021 63.486 keluarga, selanjutnya Kabupaten Bulungan memiliki 49.809 keluarga naik 3.259 keluarga dari tahun 2021 46.550 keluarga, dan selanjutnya Kabupaten Malinau sebanyak 24.470 keluarga naik 925 keluarga dari tahun 2021 23.545 keluarga dan jumlah keluarga terkecil berada di Kabupaten Tana Tidung yaitu 8.856 keluarga naik 389 keluarga dari tahun 2021 8.467 keluarga.

Sedangkan rata-rata jumlah anggota keluarga di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 sebesar 3,08 turun 0,09 dari tahun 2021 3,17. Kabupaten Malinau memiliki rata-rata jumlah anggota keluarga tertinggi sebesar 3,38 turun 0,1 dari tahun 2021 3,48 disusul Kabupaten Bulungan 3,24 turun 0,06 dari tahun 2021 3,30 kemudian Kabupaten Tana Tidung 3,11 turun 0,02 dari tahun 2021 3,13 kemudian Kota Tarakan sama dengan tahun 2021 3,09 dan terkecil Kabupaten Nunukan 2,86 turun 0,2 dari tahun 2021 3,06. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar 3.8 Grafik Jumlah Keluarga Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023**



Sumber : DKB 2 2023 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

<sup>30</sup> Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI, *Op.cit.*

Informasi tentang rata-rata jumlah anggota keluarga ini dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan program keluarga berencana di wilayah Provinsi Kalimantan Utara dan dapat digunakan pemerintah Kabupaten/Kota dalam merencanakan kebutuhan perumahan, seperti untuk menentukan ukuran rumah dengan berbagai tipe agar dapat memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat yang keluarganya beranggotakan 4 orang dan lainnya.

#### 4. Status Hubungan dengan Kepala Keluarga

Hubungan dengan kepala keluarga dapat digunakan untuk melihat banyaknya kepala keluarga menurut jenis kelamin, pola pengaturan tinggal bersama (*living arrangement*) dan pola pengasuhan anak dalam keluarga tersebut. Setiap anggota dalam keluarga mempunyai status hubungan dengan kepala keluarga yang menunjukkan hubungan antar anggota keluarga dengan kepala keluarga, baik mereka yang masih mempunyai hubungan kekerabatan maupun tidak, seperti suami, istri, anak, menantu, cucu, orang tua, mertua, famili lain, termasuk adanya orang lain yang tinggal bersama seperti pembantu rumah tangga dan lain sebagainya. Jumlah penduduk berdasarkan status hubungan dengan kepala keluarga Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini :<sup>31</sup>

Tabel 3.17 Jumlah Penduduk Menurut Status Hubungan dengan Kepala Keluarga Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023

No	Status Hubungan dg Kepala Keluarga	Laki-laki		Perempuan		Total	
		n	%	n	%	n	%
1	Kepala Keluarga	193.087	26,56	42.630	5,86	235.717	32,42
2	Suami	14	0,00	-	-	14	0,00
3	Istri	-	-	141.990	19,53	141.990	19,53
4	Anak	176.886	24,33	149.869	20,62	326.755	44,95
5	Menantu	6	0,00	3	0,00	9	0,00
6	Cucu	1.714	0,24	1.495	0,21	3.209	0,44
7	Orang Tua	99	0,01	840	0,12	939	0,13

<sup>31</sup> *Ibid.*





8	Mertua	85	0,01	508	0,07	593	0,08
9	Famili Lain	8.238	1,13	6.808	0,94	15.046	2,07
10	Lainnya	1.238	0,17	1.479	0,20	2.717	0,37
<b>Total</b>		<b>381.367</b>	<b>52,46</b>	<b>345.622</b>	<b>47,54</b>	<b>726.989</b>	<b>100,00</b>

Sumber : DKB 2 2023 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Dari tabel di atas, nampak bahwa kepala keluarga laki-laki umumnya mempunyai pasangan / istri. Kepala keluarga laki-laki dari 193.087 jiwa naik 11.621 jiwa dari tahun 2021 181.466 jiwa dan terdapat 141.990 jiwa naik 3.988 jiwa dari tahun 2021 138.002 jiwa istri yang satu kartu keluarga dengan kepala keluarga nya / suami.

Kepala keluarga perempuan dari 42.630 jiwa naik 3.779 jiwa dari tahun 2021 38.851 jiwa, dan masih ada 14 jiwa sama dengan tahun 2021 yang berstatus suami dan tercantum bersama dalam satu kartu keluarga perempuan. Kepala keluarga perempuan dalam kartu keluarganya bisa saja mencantumkan anak, menantu, cucu, orang tua, mertua, famili lain, pembantu rumah tangga dan lainnya. Kondisi kepala keluarga perempuan ini juga menunjukkan bahwa kepala keluarga perempuan pada umumnya berstatus lajang baik mereka yang belum kawin maupun mereka yang berstatus cerai hidup atau cerai mati. Perempuan berstatus kepala keluarga ini perlu mendapatkan perhatian lebih, karena pada umumnya keluarga yang dikepalai oleh perempuan relatif mempunyai ekonomi / kesejahteraan lebih rendah dibandingkan keluarga yang dikepalai oleh laki-laki, namun hal itu tidak berlaku keseluruhan kepala keluarga perempuan. Adapun persentase anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah tangga yang berstatus menantu, cucu, orang tua, mertua, famili lain dan lainnya (status hubungan pembantu di gabungkan ke status hubungan lainnya sejak tahun 2023 ini) menunjukkan proporsi yang rendah jika dijumlahkan yaitu hanya dibawah 5 persen, ini mencerminkan bahwa keluarga luas / tambahan (*extended family*) di Provinsi Kalimantan Utara jumlahnya tidak begitu besar. Data status hubungan dengan kepala keluarga di kabupaten / kota Se-Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini :<sup>32</sup>

**Tabel 3.18 Jumlah Penduduk Menurut Status Hubungan dengan Kepala Keluarga di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023**

No	Status Hubungan dg Kepala Keluarga	Bulungan		Malinau		Nunukan		Tana Tidung		Tarakan		Total	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	Kepala Keluarga	49.809	7	24.470	3	73.484	10	8.856	1	79.098	11	235.717	32

<sup>32</sup> *Ibid.*



2	Suami	12	0	-	-	-	-	-	-	2	0	14	0
3	Istri	33.437	5	16.323	2	38.808	5	5.539	1	47.883	7	141.990	20
4	Anak	72.800	10	38.874	5	90.963	13	12.587	2	111.531	15	326.755	45
5	Menantu	-	-	-	-	6	0	-	-	3	0	9	0
6	Cucu	609	0	277	0	953	0	69	0	1.301	0	3.209	0
7	Orang Tua	216	0	91	0	281	0	21	0	330	0	939	0
8	Mertua	129	0	39	0	174	0	13	0	238	0	593	0
9	Famili Lain	3.798	1	2.515	0	4.067	1	436	0	4.230	1	15.046	2
10	Lainnya	763	0	40	0	1.729	0	32	0	153	0	2.717	0
Total		161.573	22	82.629	11	210.465	29	27.553	4	244.769	34	726.989	100

Sumber : DKB 2 2023 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

## 5. Golongan Darah

Golongan darah adalah ilmu pengklasifikasian darah dari suatu kelompok berdasarkan ada atau tidak adanya zat antigen warisan pada permukaan membran sel darah merah. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan jenis karbohidrat dan protein pada permukaan membran sel darah merah tersebut. Dua jenis penggolongan darah yang paling penting adalah penggolongan ABO dan Rhesus (faktor Rh). Di dunia ini sebenarnya dikenal sekitar 46 jenis antigen selain antigen ABO dan Rh, hanya saja lebih jarang dijumpai. Transfusi darah dari golongan yang tidak kompatibel dapat menyebabkan reaksi transfusi imunologis yang berakibat anemia hemolisis, gagal ginjal, syok, dan kematian. Ilmuwan Austria, Karl Landsteiner, memperoleh penghargaan Nobel dalam bidang Fisiologi dan Kedokteran pada tahun 1930 untuk jasanya menemukan cara penggolongan darah ABO. Jan Janskydi pada tahun 1907 mengklasifikasikan darah manusia ke dalam empat grup, yang hingga kini masih digunakan.<sup>33</sup> Berikut tabel dan grafik jumlah penduduk berdasarkan golongan darah :<sup>34</sup>

<sup>33</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Golongan\\_darah](https://id.wikipedia.org/wiki/Golongan_darah) diakses 30 Maret 2023 pukul 15:13 WITA

<sup>34</sup> Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI, *Op.cit*

**Tabel 3.19 Jumlah Penduduk Menurut Golongan Darah Kabupaten/Kota Se-Provinsi**

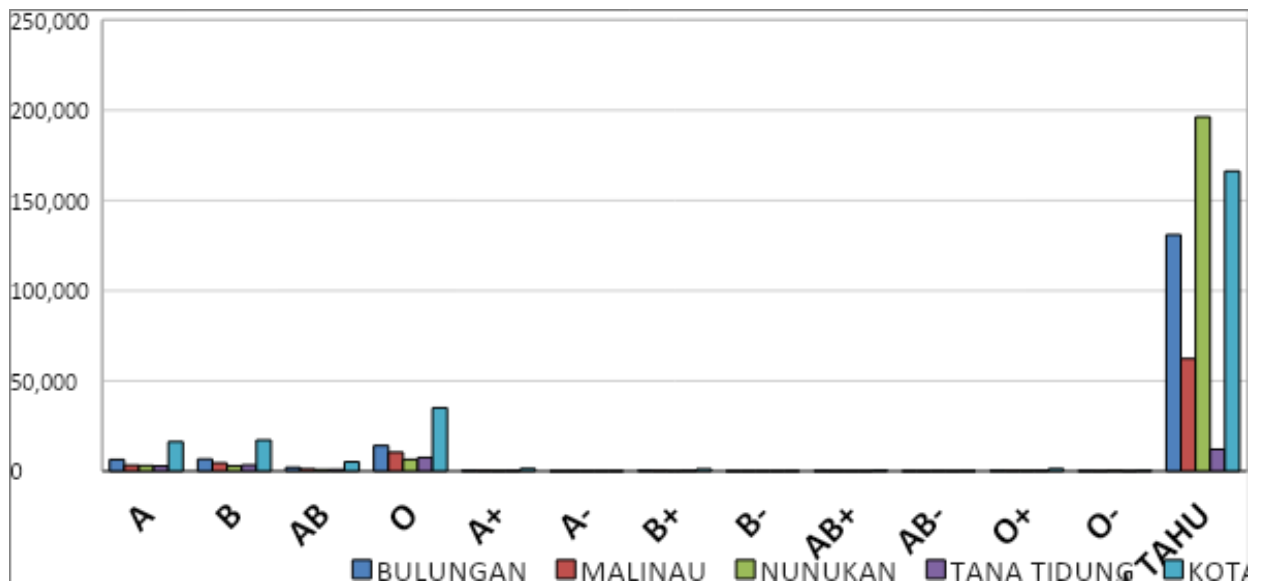
**Kalimantan Utara Tahun 2023**

Sumber : DKB 2 2023 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	A	B	AB	O	A+	A-	B+	B-	AB+	AB-	O+	O-	TIDAK TAHU	JUMLAH PENDUDUK
		(Jiwa)	(Jiwa)	(Jiwa)	(Jiwa)	(Jiwa)	(Jiwa)	(Jiwa)	(Jiwa)	(Jiwa)	(Jiwa)	(Jiwa)	(Jiwa)	(Jiwa)	(Jiwa)
6501	BULUNGAN	6.422	6.685	2.060	14.165	320	17	331	11	140	45	264	138	130.975	161.573
6502	MALINAU	3.266	4.535	1.239	10.477	223	14	204	14	49	10	206	58	62.334	82.629
6503	NUNUKAN	3.059	2.933	862	6.477	147	7	100	14	53	42	213	269	196.289	210.465
6504	TANA TIDUNG	2.869	3.413	901	7.540	183	3	223	3	52	7	237	23	12.099	27.553
6571	KOTA TARA KAN	16.301	17.223	5.175	35.085	1.405	25	1.193	36	410	91	1.330	270	166.225	244.769
<b>TOTAL</b>		<b>31.917</b>	<b>34.789</b>	<b>10.237</b>	<b>73.744</b>	<b>2.278</b>	<b>66</b>	<b>2.051</b>	<b>78</b>	<b>704</b>	<b>195</b>	<b>2.250</b>	<b>758</b>	<b>567.922</b>	<b>726.989</b>

**Gambar 3.9 Grafik Jumlah Penduduk Menurut Golongan Darah Kabupaten/Kota Se-Provinsi**

**Kalimantan Utara Tahun 2023**



Sumber : DKB 2 2023 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI



## BAB IV KUALITAS PENDUDUK

Kualitas Penduduk merupakan kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang, berbudaya, berkepribadian, dan hidup layak.

Aspek-aspek tersebut merupakan Indikator Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) dalam pemenuhan kesejahteraan. Kualitas pendidikan penduduk dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang dihitung dari angka melek aksara/huruf dan jenjang pendidikan yang telah ditempuh. Sedangkan aspek kesehatan dihitung dari angka kematian bayi dan angka harapan hidup waktu lahir; dan aspek kesejahteraan dihitung dari penghasilan per kapita.

Permasalahan kualitas kependudukan di Indonesia masih berkuat pada soal sumber daya manusianya, karena rendahnya tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, hingga berakibat pada rendahnya kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasarnya. BKKBN menyebutkan beberapa masalah kependudukan di Indonesia, yaitu:<sup>1</sup>

1. Jumlah penduduk besar tetapi kualitas relatif rendah;
2. Laju pertumbuhan penduduk tinggi;
3. Fertilitas relatif tinggi dengan penyebaran yang tidak merata;
4. Angka kematian ibu dan anak tinggi, sedangkan angka harapan hidup relatif rendah;
5. Persebaran penduduk yang tidak merata.

Tabel dan gambar di bab ini bersumber dari OPD-OPD terkait dan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI yang telah diolah.

### A. Kesehatan

Kesehatan merupakan faktor terpenting yang dapat mempengaruhi kinerja dan produktivitas seseorang. Tinggi rendahnya tingkat kesehatan penduduk suatu daerah salah satunya dapat dilihat dari besarnya angka kematian bayi dan ibu saat melahirkan. Semakin rendah angka kematian bayi dan ibu saat melahirkan, berarti semakin baik tingkat kesehatan penduduk.

Rendahnya tingkat kesehatan suatu daerah, antara lain disebabkan oleh banyaknya lingkungan yang kotor dan sanitasi yang buruk, dan terbatasnya akses layanan kesehatan. Untuk meningkatkan tingkat kesehatan penduduk, pemerintah melakukan berbagai upaya di antaranya melaksanakan program

---

<sup>1</sup> Presentasi Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty pada Rapat Kerja Nasional Kesehatan 2016, Jakarta 5 April 2016

perbaikan gizi khususnya untuk anak-anak balita, peningkatan kesadaran penduduk untuk berperilaku hidup sehat, penambahan sarana dan prasarana kesehatan juga diperlukan untuk meratakan pelayanan kesehatan di seluruh lapisan masyarakat, program penyediaan air bersih dan perbaikan sanitasi lingkungan, berupa pembangunan jamban keluarga, pembuatan sumur, penyediaan tempat pembuangan sampah, dan lain sebagainya.

Berikut ini adalah beberapa indikator untuk melihat kualitas penduduk :

### 1. ASFR (*Age Specific Fertility Rate*)

*Age-Specific Fertility Rate* (ASFR) adalah ukuran kesuburan yang menghitung jumlah kelahiran hidup yang dilahirkan oleh perempuan dalam kelompok usia tertentu, dibagi dengan jumlah perempuan dalam kelompok usia tersebut. ASFR sering digunakan oleh peneliti kependudukan untuk mengukur kesuburan populasi di suatu dalam suatu periode waktu tertentu.

ASFR berguna untuk mengidentifikasi perbedaan tingkat kesuburan antara kelompok usia yang berbeda dalam populasi, dan untuk memprediksi bagaimana tingkat kesuburan mungkin berubah seiring dengan perubahan demografi dan sosial di masa depan. ASFR juga dapat membantu pemerintah dalam merencanakan kebijakan terkait program kesehatan reproduksi dan keluarga.

Secara alamiah potensi  *fekunditas* (kapasitas reproduksi potensial suatu individu ataupun populasi) perempuan untuk melahirkan berbeda menurut umur dan relatif menjadi steril/tidak subur setelah menopause atau usia 49 tahun keatas. Secara sosial, ada kecenderungan bahwa saat ini perempuan ingin membatasi jumlah anak setelah umur 35 tahun.

Pengetahuan mengenai ASFR akan berguna untuk pelaksanaan program KB dan peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Indikator ASFR merupakan data dasar untuk mengembangkan proyeksi penduduk untuk mengetahui jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin, dan sebagai basis data untuk perencanaan pembangunan manusia di masa yang akan datang.

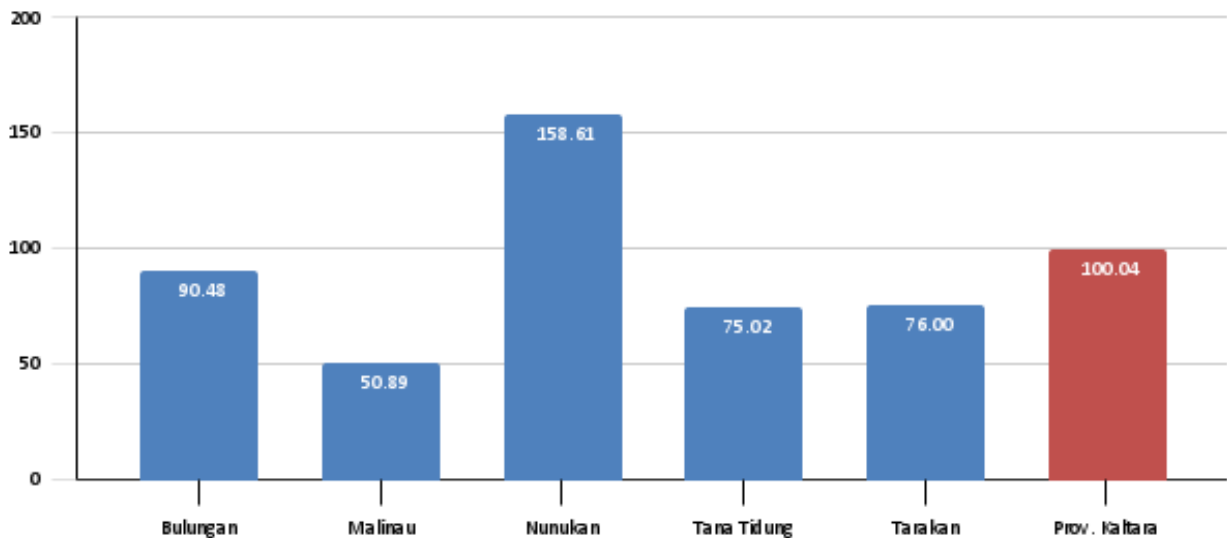
**Tabel 4.1 Angka Kelahiran Menurut Umur di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022**

Kode Wilayah	Kab/Kota	Jumlah Perempuan 15-49 (Jiwa)	Jumlah Kelahiran Hidup (Jiwa)	Angka Kelahiran Menurut Umur (ASFR)
6501	Bulungan	43.115	3.901	90.48
6502	Malinau	22.499	1.145	50.89
6503	Nunukan	56.643	8.984	158.61
6504	Tana Tidung	7.491	552	75.02
6571	Tarakan	67.080	5.098	76.00
	<b>Total</b>	<b>196.828</b>	<b>19.690</b>	<b>100.04</b>

Sumber : DKB 2 2022 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Dari Tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa ASFR di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 100.04 artinya dari 1.000 penduduk perempuan usia 15-49 tahun terjadi kelahiran 100-101 jiwa. Dari data ini dapat dilihat bahwa angka ASFR di Provinsi Kalimantan Utara mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 66.21. Jika dilihat per kabupaten/kota nilai ASFR tertinggi adalah Kota Tarakan sebesar 76.00 dan terendah adalah Kabupaten Malinau sebesar 50.89.

**Gambar 4.1 Grafik Rasio Angka Kelahiran Menurut Umur (ASFR) Kalimantan Utara Per Kabupaten/Kota Tahun 2022**



Sumber : DKB 2 2022 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

## 2. Rasio Anak dan Perempuan (*Child Women Ratio*)

*Child Women Ratio* (CWR) adalah rasio antara jumlah anak perempuan dengan jumlah wanita dewasa dalam suatu populasi. CWR sering digunakan sebagai indikator untuk mengukur kesejahteraan anak perempuan dalam suatu masyarakat. Semakin tinggi CWR, semakin banyak anak perempuan dalam populasi tersebut dibandingkan dengan wanita dewasa.

CWR biasanya dihitung dengan membagi jumlah anak perempuan di bawah usia 18 tahun dengan jumlah wanita dewasa yang berusia 18 tahun ke atas, kemudian dikalikan dengan 100. Hasilnya adalah persentase CWR untuk suatu populasi.

CWR yang rendah dapat menjadi indikator adanya ketidaksetaraan gender di suatu masyarakat. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti preferensi keluarga yang menginginkan anak laki-laki, atau ketidakmampuan wanita untuk mengakses layanan kesehatan dan pendidikan yang memadai. Oleh karena itu, meningkatkan CWR menjadi salah satu tujuan penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi di berbagai negara. Di bawah ini adalah tabel data CWR di kabupaten/kota seProvinsi Kalimantan Utara:



Tabel 4.2 Rasio Anak dan Perempuan di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022

Kode Wilayah	Kab/Kota	Jumlah Perempuan 15-49 (Jiwa)	Jumlah Penduduk 0-4 (Jiwa)	Rasio Anak dan Perempuan (CWR)
6501	Bulungan	43.115	10.829	25,12
6502	Malinau	22.499	5.256	23,26
6503	Nunukan	56.643	12.659	22,35
6504	Tana Tidung	7.491	2.037	27,19
6571	Tarakan	67.080	17.033	25,39
<b>Total</b>		<b>196.828</b>	<b>47.814</b>	<b>24,29</b>

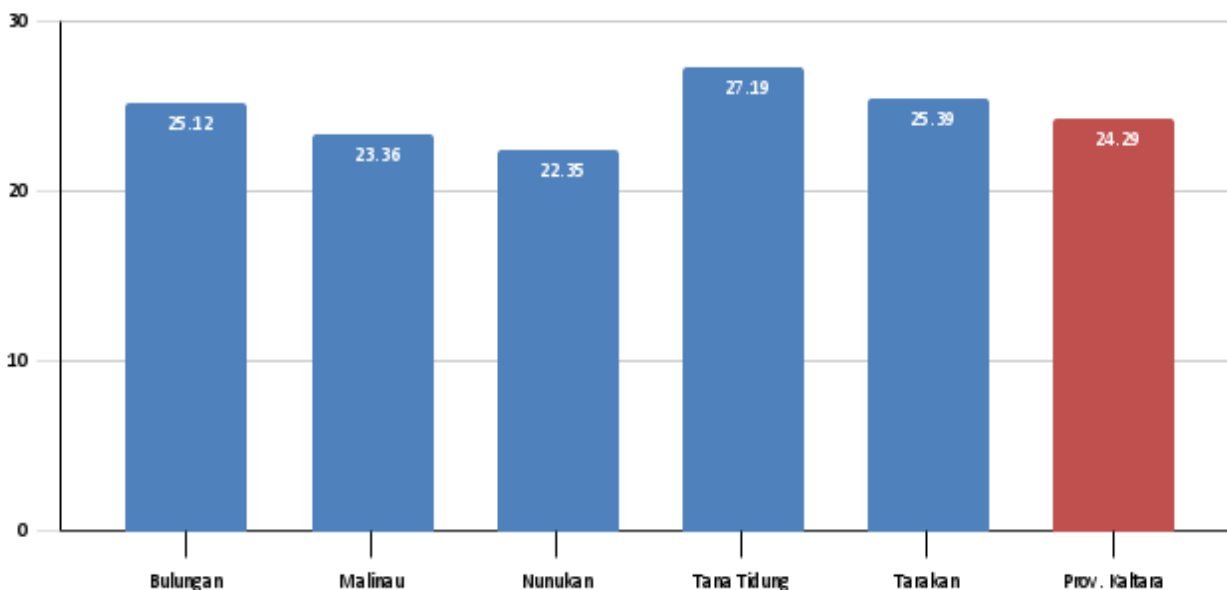
Sumber : DKB 2 2022 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Pada tahun 2022, besarnya rasio anak dan perempuan di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 30,62 hal ini berarti bahwa diantara 100 perempuan usia produktif terdapat 30-31 balita. Tahun 2022 CWR tertinggi di Kabupaten Tana Tidung, yaitu 27,19, sedangkan CWR terendah adalah Kabupaten Nunukan 22,35.

Angka CWR yang tinggi menunjukkan bahwa populasi memiliki banyak anak di bawah usia 15 tahun dibandingkan dengan jumlah wanita usia produktif, yang dapat mengindikasikan tingkat kelahiran yang tinggi dan perlu adanya upaya untuk mengurangi angka kelahiran. Sementara itu, angka CWR yang rendah dapat menunjukkan rendahnya tingkat kelahiran dan masalah terkait ketimpangan gender dalam akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah tersebut.

CWR juga dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kelahiran dan pertumbuhan penduduk di suatu wilayah atau negara. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi CWR meliputi tingkat pendidikan, kesehatan, kondisi ekonomi, dan peran wanita dalam masyarakat.

Gambar 4.2 Grafik Rasio Anak dan Perempuan (CWR) Kalimantan Utara Per Kabupaten/Kota



(Sumber : DKB 2 2022 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI)

### 3. Paska Pandemi Covid 19

*Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 dan telah ditetapkan sebagai pandemic global oleh *World Health Organization*. Sampai saat ini situasi penularan Covid-19 di tingkat global maupun nasional masih sangat tinggi. Ancaman varian baru SARS-Cov-2 membutuhkan respon yang cepat untuk mencegah penularan berkelanjutan, oleh karena itu dilakukan langkah-langkah strategis untuk mempercepat pencegahan dan pengendalian Covid-19. Pemerintah telah berupaya mempercepat pelaksanaan tracing, testing, dan treatment (3T), memenuhi obat antivirus untuk pengobatan pasien Covid-19, pemenuhan kebutuhan oksigen, percepatan vaksinasi untuk seluruh penduduk Indonesia.

Total kasus konfirmasi COVID-19 global per tanggal 24 November 2021 adalah 258.164.425 kasus dengan 5.166.192 kematian (CFR 2,0%) di 204 Negara Terjangkit dan 151 Negara Transmisi Komunitas. Adapun Pemerintah Republik Indonesia telah melaporkan kasus konfirmasi COVID-19 di Indonesia adalah 4.254.443 orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan ada 143.766 kematian (CFR: 3,4%) terkait COVID-19 yang dilaporkan dan 4.102.700 pasien telah sembuh dari penyakit tersebut. (sumber : <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/>)

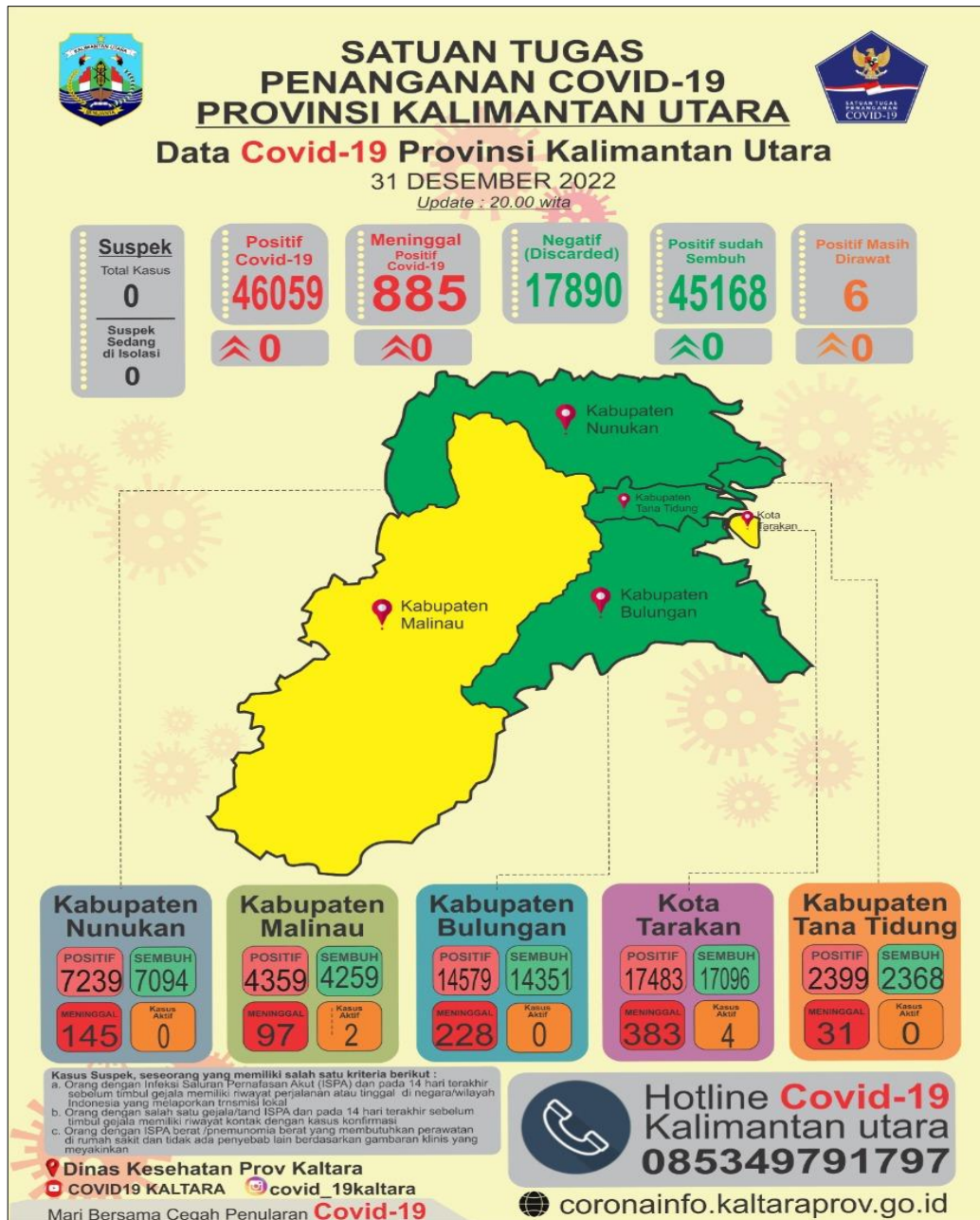
Kasus konfirmasi Covid-19 di Provinsi Kalimantan Utara cenderung mengalami peningkatan, Total kasus konfirmasi di Kalimantan Utara sejak awal ditemukan kasus pertama di Kalimantan Utara tanggal 27 Maret 2020 hingga tanggal 1 April 2022 ; kasus positif Covid-19 sebanyak 45.115 Kasus, meninggal 859 Kasus, kasus sembuh 44.009. (Sumber : <https://coronainfo.kaltaraprov.go.id/>).

Bagaimanapun, pandemi Covid-19 memeberikan dampak sosio-kultural yang signifikan. Masyarakat menjadi lebih memperhatikan protokol kebersihan seperti mencuci tangan, menjaga jarak fisik, dan menghindari kerumunan besar. Di bawah ini adalah infografis persebaran pandemi Covid-19 di Kalimantan Utara hingga 31 Desember 2023:





Gambar 4.3 Infografis Data Covid-19 Provinsi Kalimantan Utara  
31 Desember 2022 update 20.00 WITA



Sumber : <https://coronainfo.kaltaraprov.go.id/>

## B. Pendidikan

Keberhasilan Program pembangunan Pendidikan digambarkan dalam Misi 5 K yaitu Ketersediaan layanan pendidikan, Keterjangkauan layanan pendidikan, meningkatkan Kualitas mutu pendidikan, mewujudkan Kesetaraan untuk pendidikan dan misi yang terakhir adalah menjamin Kepastian mendapatkan layanan pendidikan atau pemerataan dalam layanan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah indikator untuk menilai keberhasilan program wajib belajar serta mengukur jumlah siswa yang mengikuti pendidikan formal dalam suatu populasi atau masyarakat.



APS mengukur proporsi atau persentase siswa yang mengikuti pendidikan dibandingkan dengan jumlah populasi siswa yang seharusnya berada dalam usia sekolah tersebut.

APS yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar siswa dalam usia sekolah tersebut mengikuti pendidikan secara teratur. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran dan komitmen yang tinggi terhadap pentingnya pendidikan, dan memiliki akses yang memadai terhadap layanan pendidikan. Sebaliknya, APS yang rendah adalah indikasi adanya masalah dalam pendidikan di suatu masyarakat, seperti akses yang terbatas, kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan, atau faktor-faktor sosial ekonomi yang membatasi partisipasi siswa dalam pendidikan. Oleh karena itu, meningkatkan APS menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan sistem pendidikan di Indonesia.

Angka partisipasi sekolah dapat dibagi dua, yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK adalah indikator statistik yang mengukur persentase jumlah siswa yang terdaftar dalam pendidikan formal di suatu tingkat pendidikan tertentu, dibandingkan dengan total populasi usia yang sesuai. APK mengukur partisipasi siswa dalam suatu tingkat pendidikan tertentu, tanpa memperhitungkan tingkat kemajuan siswa atau faktor lain seperti angka putus sekolah atau tingkat kelulusan.

$$\text{Rumus : } \text{APK } a = (\text{Siswa } a : \text{Penduduk usia } a) \times 100$$

APK yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar siswa dalam usia sekolah tersebut mengikuti pendidikan secara teratur, namun tidak mengindikasikan tingkat kemajuan atau prestasi siswa dalam pendidikan tersebut. APK dapat digunakan sebagai indikator awal untuk mengevaluasi aksesibilitas dan ketersediaan layanan pendidikan di suatu masyarakat. Namun, APK juga memiliki kelemahan karena tidak memperhitungkan faktor-faktor lain seperti faktor kualitas pendidikan atau angka putus sekolah. Sehingga, untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan akurat tentang partisipasi dan kemajuan pendidikan di suatu masyarakat, APK dapat digabungkan dengan indikator kedua, yaitu Angka Partisipasi Murni (APM).

APM mengukur proporsi siswa yang benar-benar mengikuti pendidikan pada tingkat pendidikan yang sesuai dengan usianya, tanpa memperhitungkan siswa yang sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan pada tingkat tersebut, seperti siswa yang usianya terlambat masuk sekolah jenjang tertentu, atau siswa yang duduk di kelas yang tidak sesuai dengan usianya.

APM dihitung dengan membagi jumlah siswa yang terdaftar pada tingkat pendidikan tertentu dengan jumlah populasi usia yang sebenarnya memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan pada tingkat tersebut, kemudian dikalikan dengan 100. APM dapat dihitung untuk tingkat pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi.



APM yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar siswa yang seharusnya mengikuti pendidikan pada tingkat tersebut, benar-benar terdaftar dalam program pendidikan tersebut. Namun, APM juga memiliki kelemahan karena tidak memperhitungkan faktor-faktor lain seperti angka putus sekolah atau keterlambatan masuk sekolah, yang dapat mempengaruhi partisipasi siswa dalam pendidikan.

Seperti halnya APK, APM juga sebagai indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik daripada APK, karena APM menunjukkan partisipasi yang sesuai dengan standar pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar kelompok umurnya.

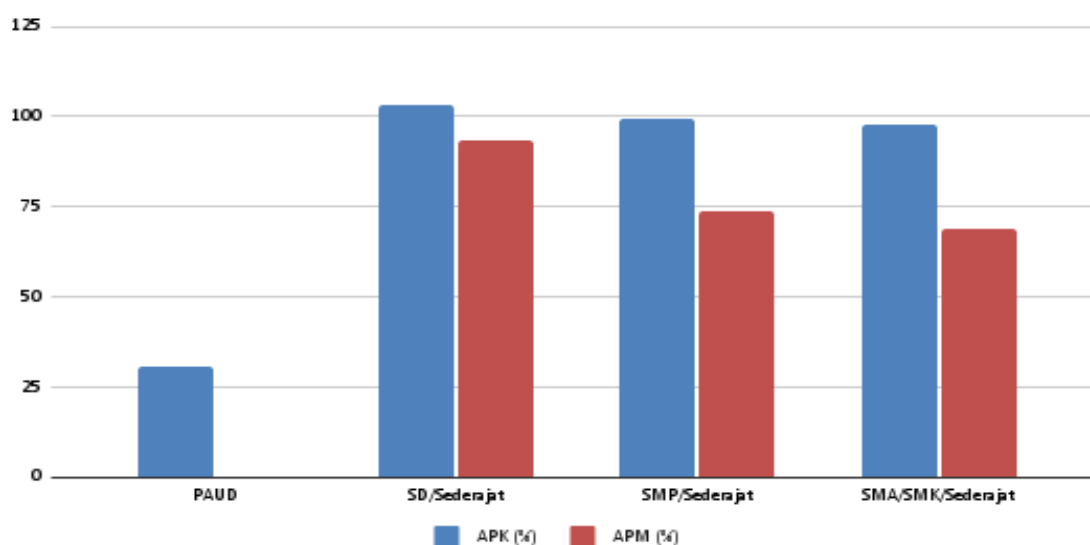
Berikut ini adalah Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021/2022 serta rincian per jenjang PAUD Sederajat, SD Sederajat, SMP Sederajat dan SMA Sederajat:

**Tabel 4.3 Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022**

NO	JENJANG PENDIDIKAN	APK (%)	APM (%)	Jumlah (Jiwa)
1	PAUD / TK 4-6 Tahun	30,55	-	41.770
2	SD / SEDERAJAT 7-12 Tahun	103,32	93,15	87.311
3	SMP / SEDERAJAT 13-15 Tahun	99,23	73,82	42.739
4	SMA / SMK / SEDERAJAT 16-18 Tahun	97,67	68,64	32.264

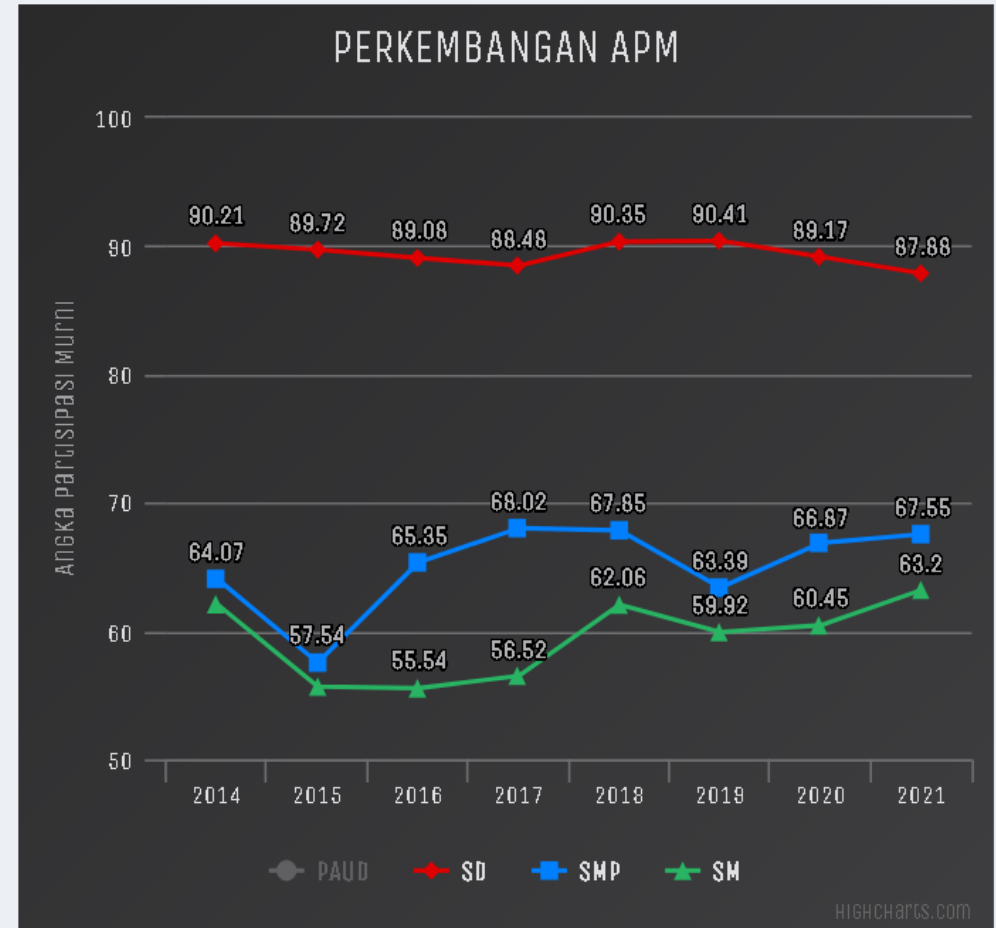
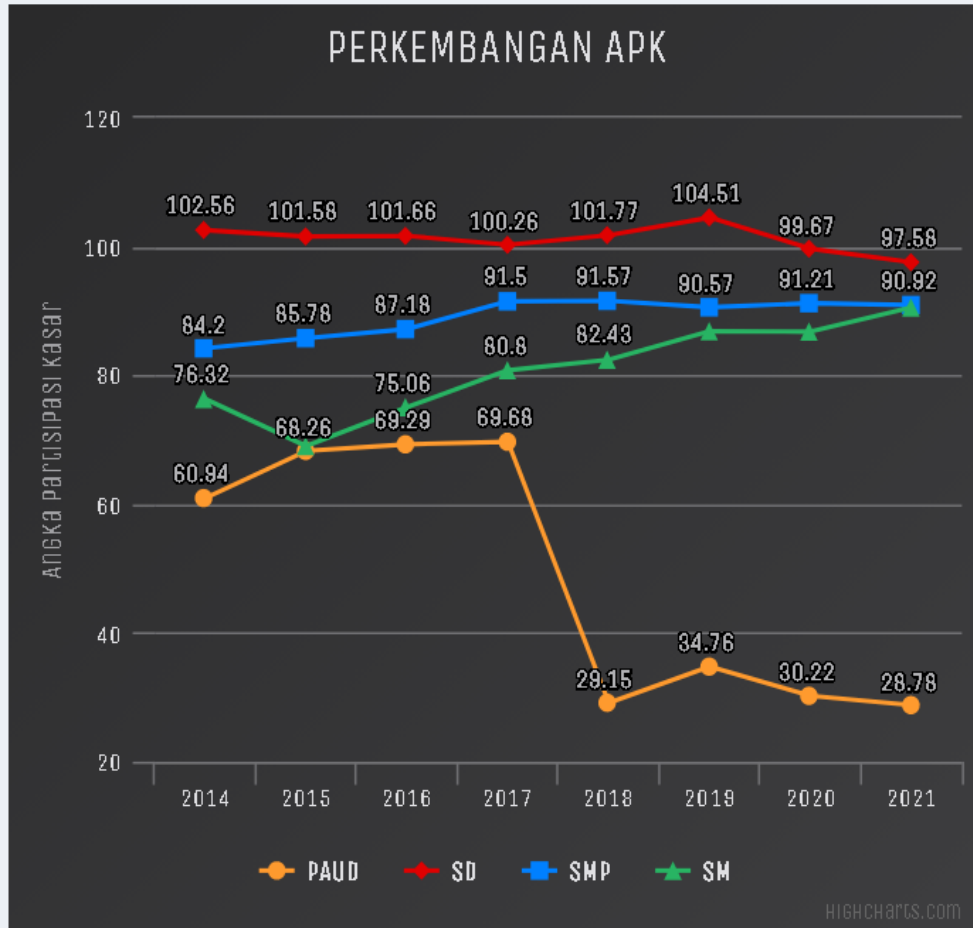
Sumber : <https://apkpm.data.kemdikbud.go.id> dan DKB 2 2022 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

**Gambar 4.4 Angka Partisipasi Kasar & Angka Partisipasi Murni Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022**



Sumber : <https://apkpm.data.kemdikbud.go.id>

Gambar 4.5 Grafik Perkembangan Angka Partisipasi Kasar & Angka Partisipasi Murni Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014-2021



Sumber : <https://apkpm.data.kemdikbud.go.id>

Tabel di atas menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) di provinsi Kalimantan Utara tertinggi pada jenjang pendidikan SD/Sederajat yaitu sebesar 103,32% diikuti SMP/Sederajat 99,23% dan SMA/Sederajat 97,67%. Capaian angka ini menunjukkan bahwa penduduk usia sekolah SD, SMP dan SMA di Provinsi Kalimantan Utara sedang/masih bersekolah. Dengan kata lain bahwa partisipasi penduduk Provinsi Kalimantan Utara dari SD/Sederajat sampai dengan SMP/Sederajat sudah baik. Lebih rendahnya APK SMA/SMK sederajat dibanding dengan APK SD/Sederajat dan APK SMP/Sederajat menandakan bahwa mungkin saja penduduk usia sekolah SMA/SMK/Sederajat setelah tamat sekolah SMP/Sederajat tidak lagi melanjutkan sekolah ke SMA/SMK/Sederajat.

Informasi APM ini menggambarkan bahwa belum semua penduduk usia sekolah (usia SD, SMP, SMA) yang bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya, terutama SMA/SMK/Sederajat hanya 23.196 orang siswa usia sekolah umur 16-18 tahun dari jumlah penduduk 36.700 penduduk usia 16-18 tahun yang menempuh pendidikan SMA/SMK/Sederajat. Gambaran di atas menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan semakin rendah tingkat APM nya. Dengan demikian proporsi murid yang mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi juga semakin kecil. Jika diperhatikan lebih teliti ketidakmampuan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi diduga sebagian besar karena ketidakmampuan ekonomi dan / atau karena murid yang sudah terjun ke dunia kerja, sehingga minat untuk melanjutkan sekolah menjadi rendah. Dan yang juga menjadi salah satu alasan adalah faktor geografis sebagian kecamatan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara yang terletak di pedalaman dikarenakan belum adanya sarana sekolah, serta belum adanya transportasi umum yang memadai untuk menempuh sekolah yang berjarak relatif cukup jauh dari permukiman masyarakat pedesaan (khususnya SMA/SMK) membuat murid enggan melanjutkan kesekolah yang lebih tinggi.

## C. Perekonomian

### 1. Proporsi Jenis Pekerjaan

Data penduduk di Provinsi Kalimantan Utara yang mempunyai jenis pekerjaan sesuai dengan Data Konsolidasi Bersih (DKB) semester II Tahun 2022 yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.4 Rekapitulasi Data Kependudukan Per Jenis Pekerjaan dan Jenis Kelamin Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022**

JENIS PEKERJAAN	JENIS KELAMIN (JIWA)		JUMLAH PENDUDUK	(% )
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
BELUM/TIDAK BEKERJA	124.986	108.034	23.3020	32,05
APARATUR/PEJABAT NEGARA	23.600	13.349	36.949	5,08
TENAGA PENGAJAR	1.426	2.481	3.907	0,54
WIRASWASTA	82.969	15.817	98.786	13,59

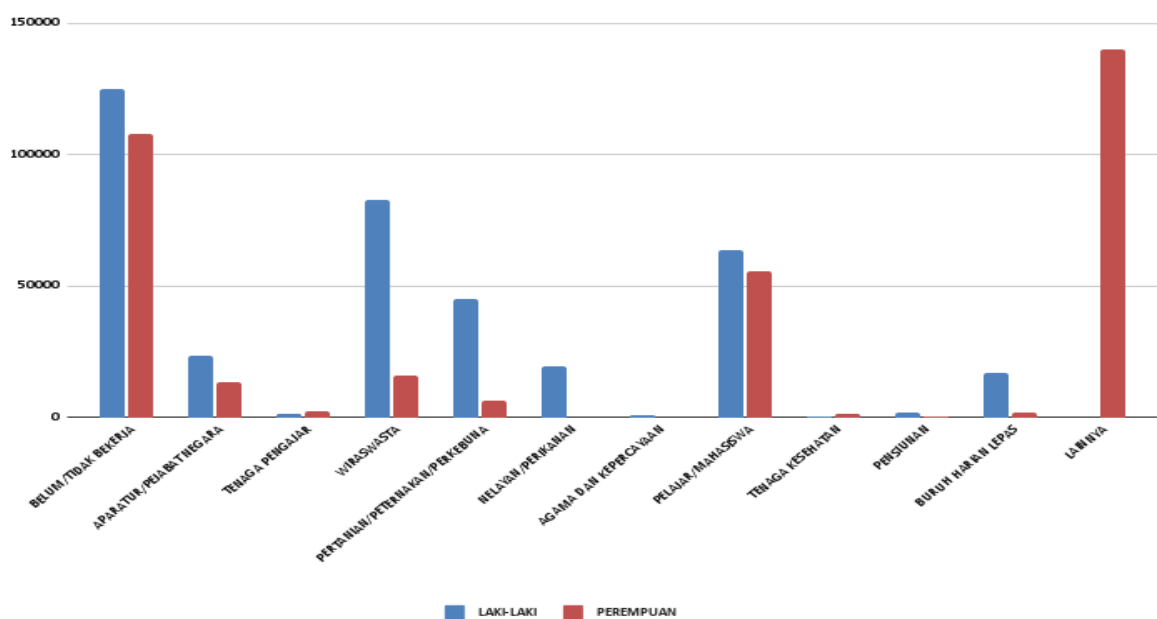


JENIS PEKERJAAN	JENIS KELAMIN (JIWA)		JUMLAH PENDUDUK	(% )
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
PERTANIAN/PETERNAKAN/PERKEBUNAN	45.117	6.616	51.733	7,12
NELAYAN/PERIKANAN	19.533	48	19.581	2,69
AGAMA DAN KEPERCAYAAN	702	69	771	0,11
PELAJAR/MAHASISWA	63.528	55.651	119.179	16,39
TENAGA KESEHATAN	472	1.317	1.789	0,25
PENSIUNAN	1.910	375	2.285	0,31
BURUH HARIAN LEPAS	17.095	1.692	18.787	2,58
LAINNYA	29	140.173	140.202	19,29
<b>TOTAL</b>	<b>381.367</b>	<b>345.622</b>	<b>726989</b>	<b>100</b>

Sumber : DKB 2 2022 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Tabel di atas menunjukkan penduduk yang bekerja berdasarkan jenis pekerjaan yang dilakukan dan tercatat di data base kependudukan. Dari tabel tersebut terlihat 5 besar pekerjaan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara adalah wiraswasta sebanyak 98.786 jiwa (13,59%), Pertanian/Peternakan sebanyak 51.733 jiwa (7,12%), Aparatur/Pejabat Negara 36.949 jiwa (5,08%), Nelayan sebanyak 19.581 jiwa (2,69%) dan Buruh Harian Lepas sebanyak 18.787 jiwa (2,58%).

Merujuk tabel di atas, terlihat bahwa sektor wiraswasta banyak memberikan lapangan kerja bagi penduduk, dan secara signifikan ikut menggerakkan roda ekonomi. Sektor lain juga menyediakan peluang lapangan pekerjaan yang luas, misalnya sektor perkebunan, pertanian, kehutanan, perikanan, perdagangan, peternakan, pariwisata dan lain-lain. Selain itu angka Pelajar / Mahasiswa yang mencapai 119.179 jiwa (16,39%) merupakan potensi SDM yang besar bagi Pemprov Kalimantan Utara untuk dimanfaatkan sebagai tenaga kerja terampil dan terdidik dalam perencanaan pembangunan jangka panjang.



Gambar 4.6 Grafik Rekapitulasi Data Kependudukan Per Jenis Pekerjaan & Jenis Kelamin Provinsi Kalimantan Utara 2022  
Sumber : (DKB 2 2022 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI)

## 2. Angka Pengangguran (Tingkat Pengangguran)

Pengangguran adalah kondisi ketika seorang individu yang mencari pekerjaan tidak dapat menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman mereka, sehingga mereka tidak memiliki penghasilan yang stabil. Pengangguran juga dapat terjadi ketika seseorang telah kehilangan pekerjaannya karena beberapa alasan seperti perusahaan tutup, PHK, pandemi penyakit, atau alasan lainnya.

Tingkat pengangguran sering digunakan sebagai indikator penting dalam mengukur kesehatan ekonomi suatu negara. Semakin tinggi tingkat pengangguran, semakin buruk perekonomian negara tersebut, karena hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pasokan tenaga kerja dan permintaan pekerjaan di pasar kerja.

Berikut ini disajikan data perkiraan pengangguran berdasarkan hitungan selisih penduduk Belum / Tidak Bekerja dengan penduduk prasekolah 0-6 tahun, penduduk usia 7 tahun keatas dianggap memiliki pekerjaan atau berstatus sebagai Pelajar/ Mahasiswa. Hasil estimasi angka pengangguran adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.5 Angka Pengangguran di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022**

(Sumber : DKB 2 2022 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI)

URAIAN	KABUPATEN / KOTA						%
	BULUNGAN	MALINAU	NUNUKAN	TANA TIDUNG	TARAKAN	KALIMANTAN UTARA	
Belum/Tidak Bekerja	59.193	21.749	62.983	7.783	81,312	233.030	32,05
Usia Pra Sekolah <6th 6 tahun	17.058	8.742	20.301	3.271	26.268	75.640	10,40
Selisih (Angka Pengangguran)	42.135	13.007	42.682	4.512	55.044	157.390	21,65

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang belum/tidak bekerja di provinsi Kalimantan Utara adalah 233.030 jiwa atau sebesar 32,05%. Jumlah tertinggi berada di Kota Tarakan sebesar 81.312 jiwa, sedangkan terendah adalah di Kabupaten Tana Tidung sebesar 3.271 jiwa. Jika angka-angka tersebut dikurangi dengan jumlah usia pra sekolah < 6 tahun maka jumlah angka perkiraan pengangguran di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 157.390 jiwa atau 21,65%. Artinya, terjadi kenaikan 0,32% dari tahun 2021.

Pengangguran adalah persoalan yang kompleks, karena dapat dikaitkan dengan beberapa indikator. Salah satu indikator ekonomi yang mempengaruhi pengangguran adalah pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Apabila pertumbuhan ekonomi suatu negara naik, maka jumlah pengangguran akan turun. Begitu juga sebaliknya, apabila pertumbuhan ekonomi turun, maka angka pengangguran akan naik.



Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus berusaha menekan tingkat pengangguran, mulai dari meluncurkan program-program penanggulangan Pengangguran, antara lain:

1. Program Kartu Prakerja. Program ini bertujuan untuk memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada para pencari kerja yang ingin meningkatkan keterampilan mereka agar lebih siap dan terampil dalam mencari pekerjaan. Program ini juga memberikan bantuan biaya pelatihan dan insentif bagi para peserta yang telah berhasil menyelesaikan pelatihan dan mendapatkan sertifikasi.
2. Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga. Program ini bertujuan untuk membantu keluarga miskin dan rentan untuk menjadi mandiri secara ekonomi melalui pelatihan keterampilan, modal usaha, dan bantuan teknis lainnya.
3. Program Padat Karya Tunai. Program ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk bekerja sambil memperoleh upah, terutama bagi masyarakat di daerah yang sulit mencari pekerjaan. Program ini juga membantu pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah.
4. Program Transmigrasi. Program ini memberikan kesempatan bagi penduduk yang tinggal di daerah yang padat penduduk untuk bermigrasi ke daerah yang masih jarang penduduknya untuk mengembangkan pertanian dan perkebunan.
5. Program Kredit Usaha Rakyat. Program ini memberikan pinjaman modal usaha dengan bunga rendah bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang kesulitan mendapatkan akses ke modal usaha dari bank komersial.
6. Program Tenaga Kerja Sukarela. Program ini mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan wilayah melalui kegiatan-kegiatan sosial dan pembangunan bersama.
7. Program Pendampingan dan Penempatan Kerja. Program ini memberikan bantuan dan dukungan bagi para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan minat mereka. Program ini juga memberikan bantuan bagi perusahaan untuk mencari karyawan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Selain program-program di atas, di level legislasi, pemerintah juga berupaya mendorong ekspor dan investasi, menciptakan sistem hubungan kerja yang harmonis antara pemberi kerja dan pekerja, dan lain sebagainya. Jika angka pengangguran ini tidak ditangani dengan baik, dikhawatirkan akan terjadi efek domino seperti meningkatnya angka kemiskinan dan kriminalitas, dan masalah sosial lainnya. Angka pengangguran yang tinggi juga berdampak pada besarnya bantuan sosial yang





harus dikeluarkan oleh pemerintah. Tinggi rendahnya angka pengangguran adalah tolak ukur penting bagi keberhasilan pembangunan.

### 3. Tenaga Kerja Orang Asing

Untuk Warga Negara Asing (WNA) surat keterangan domisili diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, Imigrasi / Disnakertrans memberikan informasi apakah WNA tersebut memiliki Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) jika memiliki maka Disdukcapil memberikan KK dan KTP WNA dan jika memiliki Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) maka Disdukcapil memberikan Surat Domisili.

Penggunaan tenaga kerja orang asing di Kalimantan Utara dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian daerah tersebut. Berikut beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan:

1. Kontribusi pada pertumbuhan ekonomi: Dengan adanya tenaga kerja orang asing yang memiliki keahlian khusus, mereka dapat membantu mengisi kekurangan tenaga kerja lokal dalam sektor-sektor tertentu. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Utara. Misalnya, tenaga kerja asing yang memiliki keahlian di industri pertambangan atau perkebunan dapat membantu meningkatkan produksi dan ekspor komoditas yang menjadi sumber pendapatan utama daerah tersebut.
2. Transfer pengetahuan dan teknologi: Kehadiran tenaga kerja asing yang terampil dapat membawa pengetahuan dan teknologi baru ke Kalimantan Utara. Mereka dapat memperkenalkan praktik terbaik dan metodologi kerja yang lebih efisien, yang dapat meningkatkan kemampuan tenaga kerja lokal dan daya saing industri di daerah tersebut.
3. Peningkatan investasi: Keberadaan tenaga kerja asing yang berkualitas juga dapat meningkatkan minat investasi di Kalimantan Utara. Investor mungkin merasa lebih yakin untuk menanamkan modalnya jika ada akses ke tenaga kerja terampil dan ahli yang diperlukan untuk menjalankan operasi bisnis mereka.

**Tabel 4.6 Data Tenaga Kerja Asing Penempatan Provinsi Kalimantan Utara**  
**Berdasarkan Lokasi Penempatan Per 1 Juni 2022 s/d 16 Juni 2023**

Kode Wilayah	Prov / Kab / Kota	Lokasi Tunggal	Lokasi Ganda	Jumlah Penerbitan NIK OA
6501	Bulungan	48	84	75
6502	Malinau	1	17	1
6503	Nunukan	10	24	5
6504	Tana Tidung	3	12	12
6571	Tarakan	132	129	44
	DKI Jakarta (5 Kota)	1	1	-
<b>Total</b>		<b>195</b>	<b>267</b>	<b>137</b>



Sumber : Disnakertrans Prov. Kaltara & Aplikasi PDAK Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Namun, perlu diingat bahwa penggunaan tenaga kerja asing juga dapat menimbulkan beberapa dampak negatif, seperti:

1. Persaingan dengan tenaga kerja lokal: Kehadiran tenaga kerja asing dapat menciptakan persaingan dalam pasar tenaga kerja lokal. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat mengakibatkan pengangguran atau penurunan upah bagi tenaga kerja lokal yang mungkin tidak memiliki kualifikasi yang sama dengan tenaga kerja asing.
2. Ketergantungan pada tenaga kerja asing: Jika terlalu banyak mengandalkan tenaga kerja asing, ada risiko terjadinya ketergantungan yang berlebihan. Hal ini dapat membuat daerah tersebut rentan terhadap fluktuasi ekonomi global, perubahan kebijakan pemerintah terkait tenaga kerja asing, atau kejadian yang menghalangi masuknya tenaga kerja asing.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk mempertimbangkan secara cermat penggunaan tenaga kerja asing, dengan memastikan bahwa kehadiran mereka memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian Kalimantan Utara sambil melindungi kepentingan dan kesejahteraan tenaga kerja lokal.

## **D. Sosial**

### **1. Angka Penyandang Disabilitas**

Penyandang disabilitas adalah orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, atau sensorik yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sehari-hari. Saat merencanakan pembangunan sarana dan prasarana, penting untuk mempertimbangkan kebutuhan mereka agar bisa mengakses fasilitas dan layanan yang disediakan.

Beberapa hal yang dapat dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan sarana dan prasarana untuk disabilitas antara lain:

1. Aksesibilitas: Pastikan bahwa sarana dan prasarana mudah diakses oleh orang dengan berbagai jenis kedisabilitas. Ini mungkin melibatkan penggunaan ramp (jalur landai tanpa anak tangga), atau pengaturan ketinggian kursi dan meja, serta pintu dan koridor yang cukup lebar untuk kursi roda.
2. Fasilitas yang disesuaikan: Berikan fasilitas yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan orang dengan berbagai jenis kedisabilitas termasuk pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan dan fasilitas layanan umum lainnya termasuk menyelenggarakan pelatihan keterampilan. Misalnya, kamar mandi yang dilengkapi dengan pegangan dan wastafel yang mudah dijangkau, serta lampu yang cukup terang untuk membantu orang dengan kebutuhan penglihatan yang rendah.



3. Pelatihan staf: Pastikan staf yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan sarana dan prasarana juga mendapat pelatihan untuk memberikan pelayanan yang sesuai bagi disabilitas.
4. Informasi dan komunikasi yang mudah dimengerti: Sediakan informasi yang mudah dimengerti untuk memudahkan orang dengan berbagai jenis kedisabilitas dalam mengakses dan menggunakan sarana dan prasarana yang disediakan.
5. Konsultasi dengan komunitas disabilitas: Penting untuk melibatkan komunitas disabilitas dalam proses perencanaan dan pengembangan sarana dan prasarana, sehingga kebutuhan mereka dapat dipahami dan dipenuhi.

Informasi tentang banyaknya penduduk disabilitas dan jenis kedisabilitasnya diperlukan pemerintah daerah dalam memberikan program, infrastruktur atau sarana dan prasarana pelayanan publik yang ramah disabilitas, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dan memperkuat inklusi sosial, data disabilitas Provinsi Kalimantan Utara :

**Tabel 4.7**

**DATA AGREGAT DISABILITAS DI KALIMANTAN UTARA 2022**

NO	KABUPATEN/KOTA	Dis. Fisik			Dis. Fisik & Mental			Dis. Netra/Buta			Dis. Mental			Dis. Rungu/Wicara			Dis. Lainnya		
		Lk	Pr	Jml	Lk	Pr	Jml	Lk	Pr	Jml	Lk	Pr	Jml	Lk	Pr	Jml	Lk	Pr	Jml
1	KAB. BULUNGAN	61	25	86	15	6	21	30	17	47	69	38	107	55	29	84	28	25	53
2	KAB. MALINAU	21	15	36	3	0	3	16	13	29	49	15	64	17	11	28	15	9	24
3	KAB. NUNUKAN	25	25	50	9	6	15	20	19	39	58	32	90	21	14	35	55	41	96
4	KAB. TANA TIDUNG	11	8	19	3	2	5	4	7	11	21	12	33	8	3	11	2	3	5
5	KOTA TARAKAN	36	25	61	13	5	18	15	15	30	126	78	204	56	44	100	22	15	37
<b>TOTAL</b>		<b>154</b>	<b>98</b>	<b>252</b>	<b>43</b>	<b>19</b>	<b>62</b>	<b>85</b>	<b>71</b>	<b>156</b>	<b>323</b>	<b>175</b>	<b>498</b>	<b>157</b>	<b>101</b>	<b>258</b>	<b>122</b>	<b>93</b>	<b>215</b>

sumber : DKB 2 2022 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Jumlah disabilitas di Provinsi Kalimantan Utara penduduk tahun 2022 tercatat 1441 jiwa atau 0,20 % meningkat 0,8% dari tahun 2021. Jika dilihat dari penyebarannya maka Kabupaten Bulungan memiliki penduduk disabilitas sebanyak 398 jiwa, Kota Tarakan sebanyak 450 jiwa, Kabupaten Nunukan 325 jiwa, Kabupaten Malinau 184 jiwa dan Kabupaten Tana Tidung 84 jiwa. Tabel di bawah menunjukkan presentase jumlah disabilitas kabupaten/kota di Kalimantan Utara dibandingkan dengan jumlah penduduknya:

**Tabel 4.8 Jumlah Penyandang Disabilitas di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022**

Kode Wilayah	KABUPATEN/KOTA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JML	Jml Disabilitas	%
6501	KAB. BULUNGAN	85,113	76,460	161,573	398	0.25
6502	KAB. MALINAU	43,566	39,063	82,629	184	0.22
6503	KAB. NUNUKAN	111,673	98,792	210,465	325	0.15
6504	KAB. TANA TIDUNG	14,446	13,107	27,553	84	0.30
6571	KOTA TARAKAN	126,569	118,200	244,769	450	0.18
<b>TOTAL</b>		<b>381,367</b>	<b>345,622</b>	<b>726,989</b>	<b>1,441</b>	<b>0.20</b>

sumber : DKB 2 2022 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI



## BAB V

### KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Dokumen kependudukan adalah kunci akses terhadap pelayanan publik yang disediakan pemerintah bagi seluruh warga negara. Sebagai warga negara kita wajib memiliki dokumen kependudukan seperti KTP Elektronik, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, dan Akta Perceraian.

Dokumen kependudukan ini berkekuatan hukum mengikat secara perdata bagi pemiliknya. Misalnya akta kelahiran, menunjukkan hubungan perdata dari pemilik akta dengan orang tuanya, akta kematian juga menunjukkan hubungan perdata dengan ahli waris, demikian pula akta-akta yang lain.

Bagi pemerintah, kepemilikan dokumen kependudukan bermanfaat dalam melakukan kegiatan pengadministrasian penduduk berdasarkan hak legalnya serta memperkuat *database* kependudukan bagi peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik.

Tabel dan gambar di bab ini bersumber dari Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 2 Tahun 2022 Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI dan dari OPD terkait.

#### A. Kartu Keluarga

Kartu Keluarga merupakan salah satu dari beberapa dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh keluarga. Kartu keluarga menunjukkan hubungan kekerabatan antara kepala keluarga dengan anggota keluarganya. Untuk menghindari kepala keluarga ganda, maka perempuan bisa menjadi kepala keluarga karena status perkawinannya janda maupun karena menjadi istri kedua, ketiga maupun keempat dari seorang laki-laki, sedangkan suaminya menjadi kepala keluarga hanya di salah satu istri, sesuai kesepakatan di dalam keluarga tersebut.

Seorang kepala keluarga bertanggung jawab terhadap anggota keluarga. Kartu Keluarga (KK) merupakan kartu identitas yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga seperti nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, jenis pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dengan kepala keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua, terhitung sejak SIAK versi 7 terdapat penambahan golongan darah dan status perkawinan tercatat atau belum tercatat. Pada tabel berikut ini dapat dilihat jumlah persentase kepemilikan kartu keluarga di Provinsi Kalimantan Utara :<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI, Data Konsolidasi Bersih (DKB) Per Desember Tahun 2022



Tabel 5.1: Jumlah Kartu Keluarga di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022

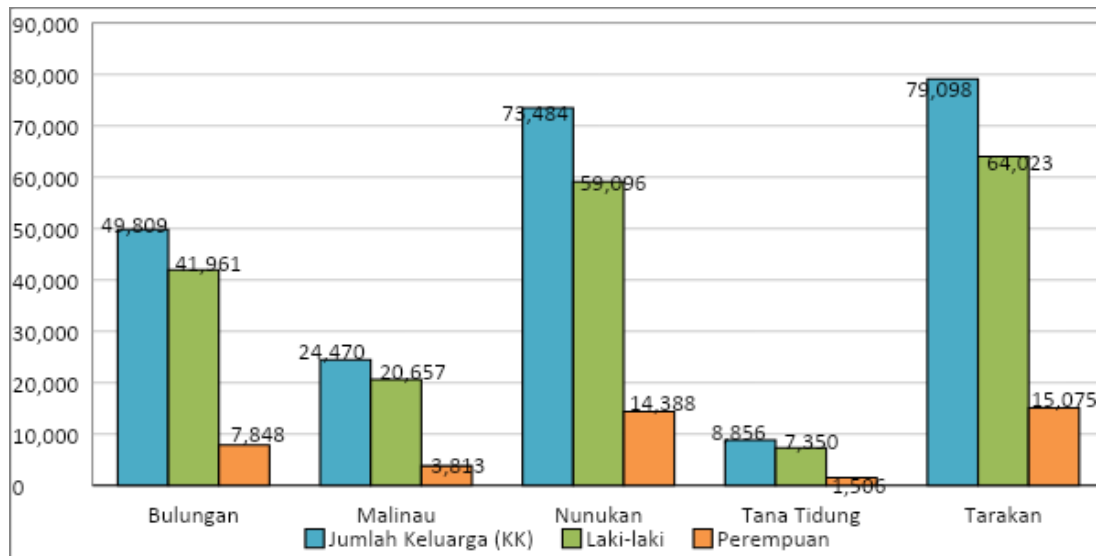
Kode Wilayah	Kab/Kota	Jumlah Keluarga (KK)	Kepala Keluarga			
			Laki-laki		Perempuan	
			(KK)	(%)	(KK)	(%)
6501	Bulungan	49.809	41.961	84,24	7.848	15,76
6502	Malinau	24.470	20.657	84,42	3.813	15,58
6503	Nunukan	73.484	59.096	80,42	14.388	19,58
6504	Tana Tidung	8.856	7.350	82,99	1.506	17,01
6571	Tarakan	79.098	64.023	80,94	15.075	19,06
<b>Total</b>		<b>235.717</b>	<b>193.087</b>	<b>81,91</b>	<b>42.630</b>	<b>18,09</b>

Sumber : DKB Semester 2 Tahun 2022 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Tabel 5.1 menunjukkan jumlah Kepala Keluarga di Provinsi Kalimantan Utara yaitu 235.717 keluarga naik 15.404 dari tahun 2021 220.313 keluarga, dengan rincian laki-laki sebagai kepala keluarga adalah sebanyak 193.087 keluarga atau 81,91%, sedangkan sisanya 42.630 keluarga yang perempuan atau sebesar 18,09%. Seperti jumlah penduduk jumlah keluarga terbanyak ada di Kota Tarakan disusul Nunukan, Bulungan, Malinau dan Tana Tidung.

Berikut adalah Grafik jumlah Kartu Keluarga :

Gambar 5.1 Grafik Kartu Keluarga di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022



Sumber : DKB Semester 2 Tahun 2022 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

## B. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI)



Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) merupakan salah satu identitas legal bagi penduduk yang menjadi bukti bahwa orang tersebut diakui sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi di Indonesia. Berdasarkan pasal 63 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 tahun atau telah / pernah menikah wajib memiliki KTP-EI.

Dengan memiliki KTP-EI penduduk dapat dengan mudah mengurus semua yang berkaitan dengan legalitas serta memperoleh pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi dan lainnya, misalnya untuk pengurusan BPJS, perbankan, sertifikat tanah, pernikahan, sekolah, pekerjaan dan lainnya.

Jumlah dan persentase penduduk menurut perekaman KTP-EI pada seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 5.2 Jumlah Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kabupaten/Kota  
Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022**

Kode Wilayah	Kab/Kota	Penduduk (Jiwa)	Wajib KTP (Jiwa)	Sudah Rekam KTP-EI (Jiwa)	Belum Rekam KTP-EI (Jiwa)	Persentase Perekaman KTP-EI (%)
6501	Bulungan	161.573	108.795	108.026	769	99,29
6502	Malinau	82.629	56.064	54.836	1.228	97,81
6503	Nunukan	210.465	137.956	136.546	1.410	98,98
6504	Tana Tidung	27.553	18.097	17.949	148	99,18
6571	Tarakan	244.769	166.340	164.833	1.507	99,09
<b>Total</b>		<b>726.989</b>	<b>487.252</b>	<b>482.190</b>	<b>5.062</b>	<b>98,96</b>

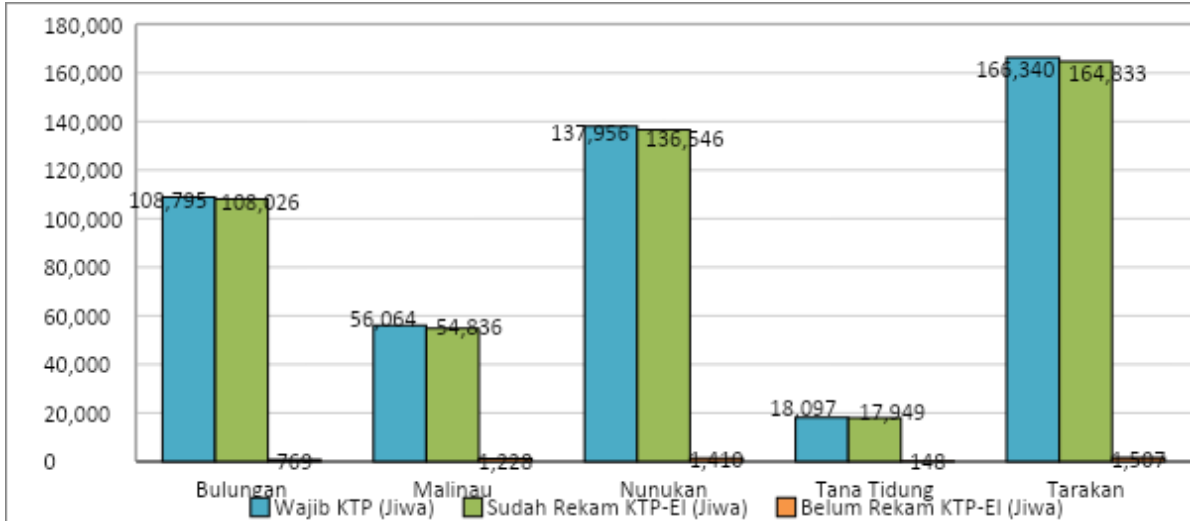
Sumber : DKB Semester 2 Tahun 2022 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Tabel di atas menampilkan penduduk Wajib KTP Provinsi Kalimantan Utara yang telah melaksanakan perekaman KTP-EI, sebanyak 482.190 jiwa telah melakukan perekaman atau sebesar 98,96% dari total 487.252 jiwa wajib KTP (naik 14.592 jiwa dari tahun 2021 472.660 jiwa wajib KTP), perekaman KTP-EI naik 17.609 jiwa dari tahun 2021 464.581 jiwa atau 98,29%.

Sejalan dengan pelaksanaan program pemerintah, penduduk yang masih mempunyai KTP non Elektronik dirubah menjadi KTP Elektronik. Proses perekaman dan pencetakan KTP Elektronik ini terkadang terkendala oleh gangguan jaringan dan distribusi alat dan bahan seperti blangko, *ribbon*, *film* yang terbatas.

Grafik jumlah perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik ditampilkan sebagai berikut :<sup>2</sup>

**Gambar 5.2: Grafik Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022**



Sumber : DKB Semester 2 Tahun 2022 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

### C. Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Kemajuan teknologi informasi memungkinkan setiap penduduk memiliki identitas kependudukan digital. Identitas digital ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 72 tahun 2022 tentang standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, dan blanko KTP-EI, serta penyelenggaraan identitas kependudukan digital. Permendagri tersebut menjelaskan identitas kependudukan digital adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui ponsel pintar yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan. Dengan identitas kependudukan digital, masyarakat tidak perlu lagi menyimpan kartu tanda pengenal dalam bentuk fisik. Cukup hanya menunjukkan quick response (QR) code yang ada dalam aplikasi Identitas Kependudukan Digital untuk keperluan administrasi.

Dirjen Dukcapil Kemendagri, mengatakan “NIK sangat penting, karena digunakan sebagai dasar untuk mengakses berbagai pelayanan publik dasar, seperti mendaftar sekolah, berobat, membuka rekening bank, pajak dan lain sebagainya.”. Dukcapil terus melakukan digitalisasi KTP-el yang sudah dilakukan di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Syarat untuk mendapatkan

<sup>2</sup> *Ibid.*



identitas kependudukan digital seperti yang tertera pada Bab 2 Pasal 18 Ayat (2) Permendagri no 72 tahun 2022 adalah :

1. Memiliki ponsel pintar
2. Telah memiliki KTP-el fisik atau belum pernah memiliki KTP-el fisik tetapi sudah melakukan perekaman
3. Memiliki e-mail dan nomor ponsel yang aktif

Dalam segi keamanan, aplikasi Identitas Kependudukan Digital dilengkapi dengan fitur pencegahan tangkap layar (screenshot), sehingga meminimalkan penyalahgunaan informasi. Selain itu, kode QR yang dibagikan pun selalu berubah-ubah dan hanya berlaku selama 90 detik. KTP Digital merupakan pemindahan KTP-el yang saat ini digunakan oleh penduduk Indonesia ke ponsel pintar berupa foto dan QR Code. KTP Digital bisa diakses melalui ponsel pintar di aplikasi khusus yang disediakan oleh Dukcapil yaitu Identitas Kependudukan Digital (IKD). KTP-El perlu dicetak oleh Dinas Dukcapil setelah diajukan oleh penduduk dan merekam identitas dirinya. Sementara KTP Digital tidak perlu dicetak, karena sudah terdapat di ponsel pintar masing-masing penduduk. Namun tentunya penduduk harus merekam identitas dirinya terlebih dahulu. Kelebihan IKD ini diantaranya :

1. Penggunaan lebih simpel dan pembuatan lebih cepat
2. Tidak perlu dicetak menggunakan blangko
3. Tidak perlu disimpan di dalam dompet cukup disimpan di dalam ponsel pintar
4. Tidak perlu ada fotokopi KTP untuk mengakses layanan publik
5. Lebih aman dari pemalsuan data penduduk
6. Tidak ada lagi masalah KTP hilang
7. penghematan anggaran yang besar karena tidak ada pencetakan KTP.

**Tabel 5.3 Jumlah Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Se-Provinsi Kalimantan Utara**

Kode Wilayah	Kab/Kota	Target IKD (Jiwa)	Total Aktivasi IKD (Jiwa)	Persentase Aktivasi IKD(%)
6501	Bulungan	28.248	2.189	7.75
6502	Malinau	14.257	1.372	9.62





6503	Nunukan	37.189	633	1.70
6504	Tana Tidung	4.650	578	12.43
6571	Tarakan	42.498	2.500	5.88
<b>Total</b>		<b>126.841</b>	<b>7.272</b>	<b>5.73</b>

Sumber : Laporan Disdukcapil Kabupaten / Kota Per 09 Juni 2023

#### D. Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan salah satu identitas legal bagi penduduk anak-anak berusia 0-16 tahun atau belum menikah sebagai bukti perhatian pemerintah untuk memberikan dokumen kependudukan bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa mengenal usia.

Tabel berikut adalah data kepemilikan KIA se-Provinsi Kalimantan Utara.<sup>3</sup>

Kode Wilayah	Kab/Kota	Anak 0-16 (Jiwa)	Anak Memiliki KIA (Jiwa)	Anak Belum Memiliki KIA (Jiwa)	Persentase Kepemilikan KIA (%)
6501	Bulungan	48.581	29.539	19.042	60,80
6502	Malinau	25.587	14.350	11.237	56,08
6503	Nunukan	61.673	32.652	29.021	52,94
6504	Tana Tidung	8.954	7.236	1.718	80,81
6571	Tarakan	74.777	33.164	41.613	44,35
<b>Total</b>		<b>219.572</b>	<b>116.941</b>	<b>102.631</b>	<b>53,26</b>

Tabel 5.4 Jumlah Kartu Identitas Anak di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara

2022 Sumber : DKB Semester 2 Tahun 2022 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

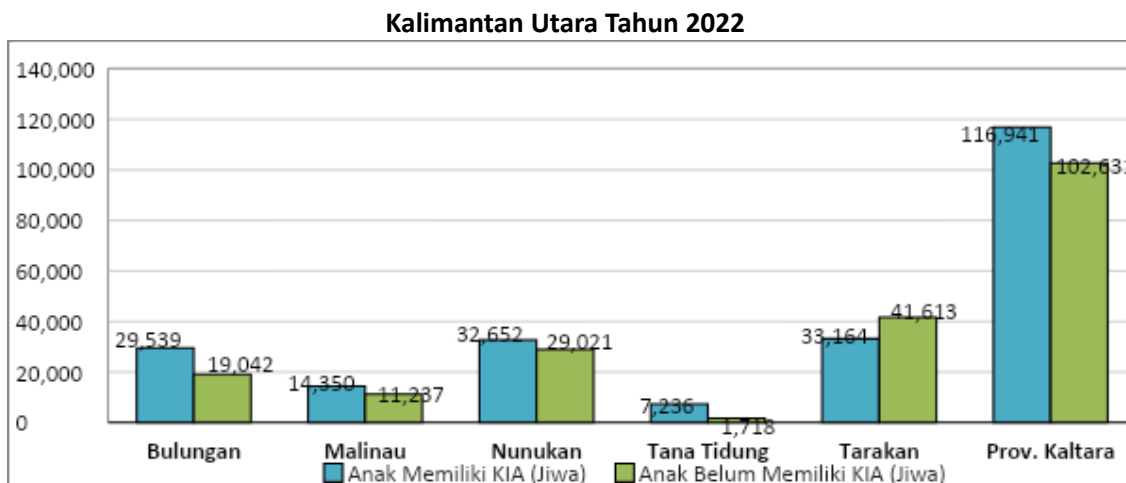
Dari tabel kepemilikan KIA diatas Kabupaten Tana Tidung memiliki persentase terbesar yaitu 80,81% naik 6,32% dari tahun 2021 74,49%, disusul Kabupaten Bulungan sebesar 60,80% turun 1,64% dari tahun 2021 62,44%, Kabupaten Malinau 56,08% naik 0,78% dari tahun 2021 55,30%,

<sup>3</sup> Ibid.

Kabupaten Nunukan 52,94% turun 4,36% dari tahun 2021 57,30%, dan yang terendah adalah Kota Tarakan 44,35% turun 13,01% dari tahun 2021 57,36%.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini :

**Gambar 5.3 Grafik Jumlah Kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kabupaten/Kota Se-Provinsi**



Sumber : DKB Semester 2 Tahun 2022 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

## E. Kepemilikan Akta

Akta merupakan dokumen kependudukan yang sangat penting dan wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia. Akta merupakan pengakuan negara atas status keperdataan seseorang baik dalam hubungan kekeluargaan maupun dalam hubungannya dengan pelayanan legal.

### 1. Kepemilikan Akta Kelahiran

Akta kelahiran merupakan bukti legal hubungan perdata antara seorang anak dengan ayah dan ibunya. Dalam akta tersebut dijelaskan tentang siapa nama orang tua baik ayah maupun ibunya.

Saat ini untuk mempermudah masyarakat memiliki atau membuat Akta Kelahiran jika masyarakat tidak memiliki dokumen pendukung (surat kelahiran, dll) dapat mengisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk mendapatkannya.

Akta kelahiran penting untuk dimiliki oleh seorang anak karena digunakan pada saat mengurus pendidikan atau mengurus dokumen lainnya, data kepemilikan akta kelahiran disajikan sebagai berikut :<sup>4</sup>

#### **Tabel 5.5 Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022**

Sumber : DKB Semester 2 Tahun 2022 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

<sup>4</sup> Ibid.

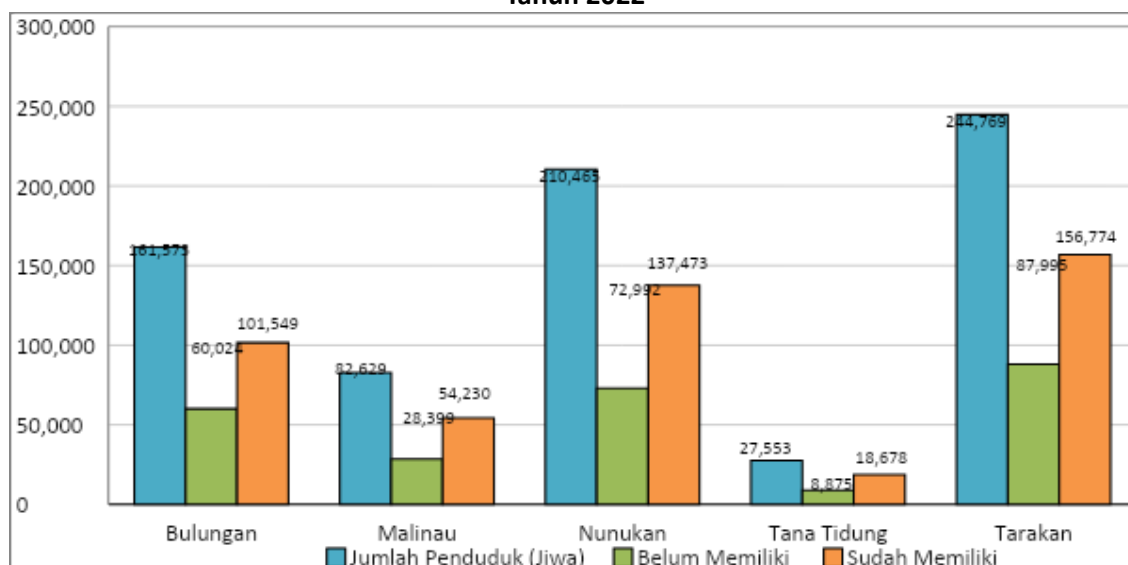


Kode Wilayah	Kab/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepemilikan Akta Kelahiran			
			Belum Memiliki		Sudah Memiliki	
			(Jiwa)	(%)	(Jiwa)	(%)
6501	Bulungan	161.573	60.024	37	101.549	62,85
6502	Malinau	82.629	28.399	34	54.230	65,63
6503	Nunukan	210.465	72.992	35	137.473	65,32
6504	Tana Tidung	27.553	8.875	32	18.678	67,79
6571	Tarakan	244.769	87.995	36	156.774	64,05
<b>TOTAL</b>		<b>726.989</b>	<b>258.285</b>	<b>36</b>	<b>468.704</b>	<b>64,47</b>

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 726.989 jiwa penduduk provinsi Kalimantan Utara 64,47% atau sebanyak 468.704 jiwa penduduk sudah memiliki akta kelahiran naik 3,47% atau 43.740 jiwa dari tahun 2021 yang hanya 61% atau 424.964 jiwa, sedangkan yang belum memiliki akta kelahiran sebanyak 36% atau 258.285 jiwa turun 3% atau 14.754 jiwa dari tahun 2021 39% atau sebanyak 273.039 jiwa.

Bila dilihat berdasarkan wilayah maka kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Tana Tidung adalah wilayah yang memiliki persentase kepemilikan akta kelahiran tertinggi, yaitu 67,79% naik 2,79% dari tahun 2021 sebesar 65%, disusul Malinau, Nunukan Tarakan dan Bulungan. Pada grafik berikut ini dapat dilihat jumlah kepemilikan akta kelahiran di setiap kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara :

**Gambar 5.4 Grafik Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022**





Sumber : DKB Semester 2 Tahun 2022 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Untuk data kepemilikan akta kelahiran anak umur 0-18 tahun yang menjadi salah satu prioritas kepemilikan dokumen kependudukan seperti disajikan tabel berikut: <sup>5</sup>

**Tabel 5.6 Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Umur 0-17 Tahun di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022** Sumber : DKB Semester 2 Tahun 2022 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Kode Wilayah	Kab/Kota	Jumlah Penduduk 0-17 (Jiwa)			Kepemilikan Akta Kelahiran 0-17			
		Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Total (Jiwa)	Sudah Memiliki (Jiwa)	(%)	Belum Memiliki (Jiwa)	(%)
6501	Bulungan	27.841	25.617	53.458	49.801	96,54	1.785	3,34
6502	Malinau	14.709	13.617	28.326	26.148	95,96	1.102	3,89
6503	Nunukan	34.781	32.511	67.292	63.687	97,07	1.919	2,85
6504	Tana Tidung	4.973	4.712	9.685	9.105	96,81	300	3,10
6571	Tarakan	42.288	39.651	81.939	75.496	95,18	3.824	4,67
<b>TOTAL</b>		<b>124.592</b>	<b>116.108</b>	<b>240.700</b>	<b>224.237</b>	<b>96,31</b>	<b>8.930</b>	<b>3,57</b>

Berdasarkan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 bahwa Target tahun 2024 Indikator Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-17 tahun adalah 100% maka dari tabel di atas untuk Provinsi Kalimantan Utara baru berada pada angka 96,31% naik 6,31% atau 224.237 jiwa naik 16.074 jiwa dari tahun 2021 90% atau 208.163 jiwa.

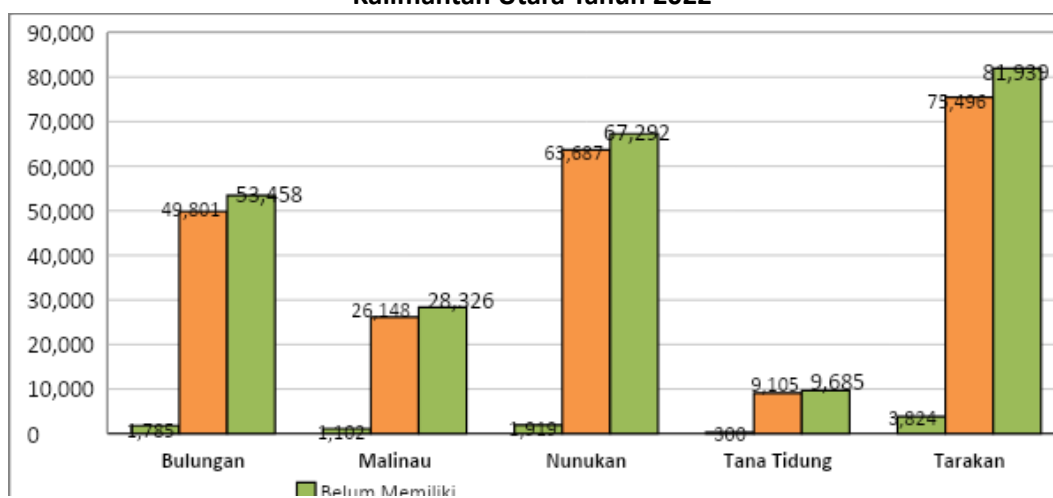
Perlu upaya-upaya atau terobosan untuk meningkatkan pencapaian ini, salah satunya adalah dengan pemutakhiran atau peginputan data akta kelahiran bagi penduduk yang sudah memiliki namun belum terinput dalam database serta kemudahan-kemudahan bagi penduduk yang akan mengurus akta kelahiran.

<sup>5</sup> *Ibid.*

Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki wilayah perbatasan dan pedalaman yang sulit dijangkau, perlu peningkatan pelayanan jemput bola<sup>6</sup> untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan oleh pemerintah daerah.

Grafik jumlah kepemilikan akta kelahiran anak umur 0-18 disampaikan sebagai berikut :

**Gambar 5.5 Grafik Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Umur 0-17 Per Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022**



Sumber : DKB Semester 2 Tahun 2022 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

## 2. Kepemilikan Akta Perkawinan

Akta perkawinan / pernikahan merupakan identitas atas penduduk yang berstatus kawin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta perkawinan memberikan kekuatan hukum atas ikatan antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk keluarga dengan seluruh hak dan kewajiban yang melekat didalamnya. Akta ini terdiri dari Kawin Tercatat dan Kawin Belum Tercatat yaitu kawin yang belum dilaporkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) (bagi muslim) atau Pemuka Agama (non muslim) mis : nikah agama atau nikah siri atau nikah adat. Tabel berikut ini menyajikan kepemilikan akta perkawinan :<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Pada tahun 2019 Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan untuk Wilayah Pedalaman dan Perbatasan (Sipelandukilat) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara berhasil masuk Top 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik dan tahun 2021 berhasil masuk Top 5 Pemenang Outstanding Achievement of Public Service Innovation Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)RI

<sup>7</sup> Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI, *Op.cit.*



**Tabel 5.7 Jumlah Kepemilikan Akta Perkawinan di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022**

Kode Wilayah	Kab/Kota	Jumlah Penduduk Kawin			Jumlah Kepemilikan Akta Kawin					
		Laki-Laki	Perempuan	Total	Memiliki Laki-laki	Memiliki Perempuan	Total Memiliki		Total Belum Memiliki	
		(Jiwa)	(Jiwa)	(Jiwa)	(Jiwa)	(Jiwa)	(Jiwa)	(%)	(Jiwa)	(%)
6501	Bulungan	36.169	35.817	71.986	27.638	27.057	54.695	75,98	17.291	24,02
6502	Malinau	17.831	17.765	35.596	12.387	12.336	24.723	69,45	10.873	30,55
6503	Nunukan	46.844	45.435	92.279	27.613	26.255	53.868	58,38	38.411	41,62
6504	Tana Tidung	6.162	6.075	12.237	4.909	4.845	9.754	79,71	2.483	20,29
6571	Tarakan	52.321	52.121	104.442	36.609	35.390	71.999	68,94	32.443	31,06
<b>TOTAL</b>		<b>159.327</b>	<b>157.213</b>	<b>316.540</b>	<b>109.156</b>	<b>105.883</b>	<b>215.039</b>	<b>67,93</b>	<b>101.501</b>	<b>32,07</b>

Sumber : DKB Semester 2 Tahun 2022 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Tabel diatas menyajikan perbandingan penduduk berstatus kawin terhadap kepemilikan akta perkawinan. Jumlah penduduk provinsi Kalimantan Utara yang berstatus kawin adalah sebanyak 316.540 jiwa naik 10.179 jiwa dari tahun 2021 306.361 jiwa, dimana terdapat 215.039 jiwa (67,93%) yang memiliki akta perkawinan naik 13.287 jiwa (1,93%) dari tahun 2021 201.752 jiwa (66%) dan 101.501 (32,07%) jiwa yang belum memiliki akta perkawinan turun 3.108 jiwa (1,93%) dari tahun 2021 104.609 jiwa (34%).

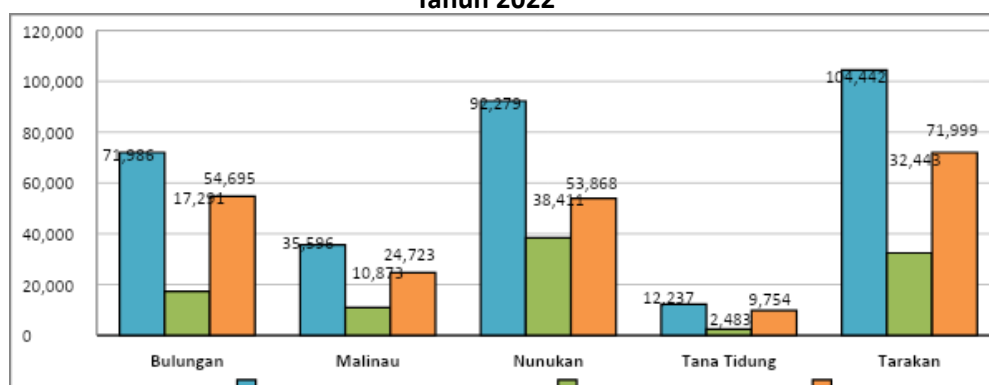
Masih banyaknya pasangan yang belum memiliki akta pernikahan terjadi karena banyak penduduk yang melakukan perkawinan secara agama atau adat saja tetapi tidak tercatat secara administrasi kependudukan, sehingga perkawinan ini belum diakui secara hukum negara.<sup>8</sup>

Jika dilihat berdasarkan persentase per wilayah, Tana Tidung menjadi kabupaten dengan tingkat persentase kepemilikan akta perkawinan sebesar 79,71% naik 3,71% dari tahun 2021 76%, disusul oleh Kabupaten Bulungan dengan persentase kepemilikan sebesar 75,98% naik 1,98% dari tahun 2021 74%, Kota Tarakan sebesar 68,94% naik 2,94% dari tahun 2021 66%, kemudian Kabupaten Malinau 69,45% naik 4,45% dari tahun 2021 65% dan Kabupaten Nunukan 58,38% naik 0,38% dari tahun 2021 58%, angka ini utamanya disebabkan karena wilayah pusat

<sup>8</sup> Terjadi kenaikan kepemilikan akta perkawinan dibandingkan periode sebelumnya, yaitu dari tahun 2017 44% menjadi 55% ditahun 2018, 60% ditahun 2019, 63% di 2020, 66% di 2021 dan menjadi 67,93% di 2022.

pemerintahan yang sulit dijangkau dan jauh di pedalaman sehingga penduduk banyak belum mencatatkan perkawinannya baik pernikahan secara agama atau adat. Penduduk berstatus kawin namun tidak memiliki akta perkawinan diatas dapat disebabkan kurang lengkapnya pengisian formulir biodata penduduk atau tidak melampirkan akta perkawinan yang dimiliki sehingga tidak diinput pada saat pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Grafik jumlah kepemilikan akta perkawinan disampaikan sebagai berikut :

**Gambar 5.6 Grafik Kepemilikan Akta Perkawinan di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022**



Sumber : DKB Semester 2 Tahun 2022 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

### 3. Kepemilikan Akta Perceraian

Pasangan yang telah berpisah dan berstatus cerai hidup wajib memiliki akta perceraian. Tabel berikut ini menggambarkan jumlah dan persentase penduduk berstatus cerai hidup yang memiliki akta cerai di setiap Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Utara :<sup>9</sup>

**Tabel 5.8 Jumlah Kepemilikan Akta Perceraian di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022**

Kode Wilayah	Kab/Kota	Jumlah Penduduk Cerai			Jumlah Kepemilikan Akta Perceraian					
		Laki-Laki	Perempuan	Total	Memiliki Laki-laki	Memiliki Perempuan	Total Memiliki	Total Belum Memiliki		
		(Jiwa)	(Jiwa)	(Jiwa)	(Jiwa)	(Jiwa)	(Jiwa)	(%)	(Jiwa)	(%)
6501	Bulungan	1.209	1.359	2.568	909	932	1.841	71,69	727	28,31
6502	Malinau	281	373	654	184	219	403	61,62	251	38,38
6503	Nunukan	1.021	1.472	2.493	563	781	1.344	53,91	1.149	46,09

<sup>9</sup> Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI, *Op.cit.*



Tana										
6504	Tidung	146	174	320	95	105	200	62,50	120	37,50
6571	Tarakan	2.388	3.072	5.460	1.913	2.170	4.083	74,78	1.377	25,22
<b>TOTAL</b>		<b>5.045</b>	<b>6.450</b>	<b>11.495</b>	<b>3.664</b>	<b>4.207</b>	<b>7.871</b>	<b>68,47</b>	<b>3.624</b>	<b>31,53</b>

Sumber : DKB Semester 2 Tahun 2022 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Tabel diatas menunjukkan bahwa penduduk berstatus cerai hidup yang memiliki akta perceraian sebesar 7.871 jiwa atau naik 1.526 jiwa dari tahun 2021 6.345 jiwa atau sebesar 68,47% naik 3,47% dari tahun 2021 65% dari total 11.495 jiwa naik 1.707 jiwa dari tahun 2021 9.788 jiwa yang berstatus cerai hidup, sementara yang belum memiliki akta perceraian sebanyak 3.624 jiwa turun 247 jiwa atau 31,53% turun 3,47% dari tahun 2021 3.377 jiwa atau sebesar 35%.

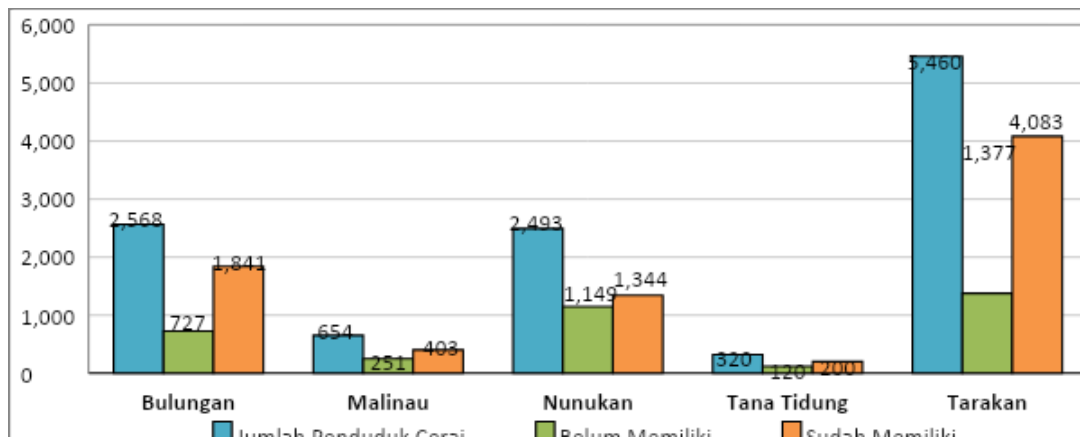
Persentase penduduk cerai hidup yang tidak memiliki akta perceraian masih sangat tinggi. Hal ini dapat disebabkan oleh masyarakat yang belum melaporkan perceraian.

Ini perlu menjadi perhatian pemerintah kabupaten/kota dalam merencanakan suatu program kegiatan untuk sosialisasi dan penyuluhan akan pentingnya akta perceraian maupun dokumen kependudukan lainnya.

Berdasarkan Jumlah persentase kepemilikan akta perceraian per wilayah, Kota Tarakan adalah wilayah dengan kepemilikan akta perceraian tertinggi yaitu sebesar 74,78% naik 4,78% dari 2021 70%, disusul oleh Kabupaten Bulungan sebesar 71,69% naik 2,69% dari tahun 2021 69%, Kabupaten Tana Tidung 62,5% naik 8,5% dari tahun 2021 54%, Kabupaten Malinau 61,62% turun 0,38% dari tahun 2021 62%, dan yang terendah Kabupaten Nunukan dengan persentase sebesar 53,91% turun 2,91% dari tahun 2021 51%.

Apabila data di atas disajikan dalam bentuk grafik, maka akan nampak seperti berikut :

**Gambar 5.7 Grafik Kepemilikan Akta Perceraian di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022**







umber : DKB Semester 2 Tahun 2022 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

#### 4. Kepemilikan Akta Kematian

Administrasi kependudukan bukan saja dibutuhkan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing(WNA) yang masih hidup, namun juga berlaku untuk yang telah meninggal dunia. Fungsi dari tertib administrasi untuk mengurus akta kematian, sama pentingnya dengan kepengurusan akta kelahiran.

Masyarakat perlu segera membiasakan diri untuk melakukan kepengurusan akta kematian. Jika pelaporan kematian ini tidak berjalan dengan benar, maka biodata penduduk tersebut akan tetap terdaftar dalam database kependudukan, sehingga akan selalu muncul masalah mengenai jumlah penduduk yang tidak sesuai antara *defacto* dengan *dejure*.

Kondisi yang ada saat ini, kesadaran masyarakat untuk membuat akta kematian masih kurang, maka dirasa perlu untuk dilakukan sosialisasi secara berlanjut oleh aparatur dan petugas administrasi kependudukan, salah satunya melalui program terbaru sesuai instruksi dari Ditjen Dukcapil Kemendagri RI yaitu Disdukcapil Menyapa Masyarakat (DMM). Selain akta kematian mempunyai banyak fungsi dengan kaitan persoalan penentuan hukum privat maupun publik, kepemilikan akta kematian jika dikaitkan dengan pelaporan kematian akan mendukung pendataan penduduk yang lebih akurat dari sisi jumlah penduduk. Manfaat dari akta kematian adalah :

- Sebagai syarat untuk melaksanakan pernikahan kembali bagi yang berstatus Janda atau Duda;
- Persyaratan pengurusan pembagian waris;
- Persyaratan pengurusan pensiun;
- Persyaratan pengurusan uang duka, tunjangan kecelakaan, TASPEN, asuransi, perbankan dan lain sebagainya;
- Tertib administrasi kependudukan.

Berikut ini data jumlah kepemilikan akta kematian di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara :<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Laporan Pelayanan Disdukcapil Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Per Desember 2022.



Tabel 5.9 Jumlah Kepemilikan Akta Kematian di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022

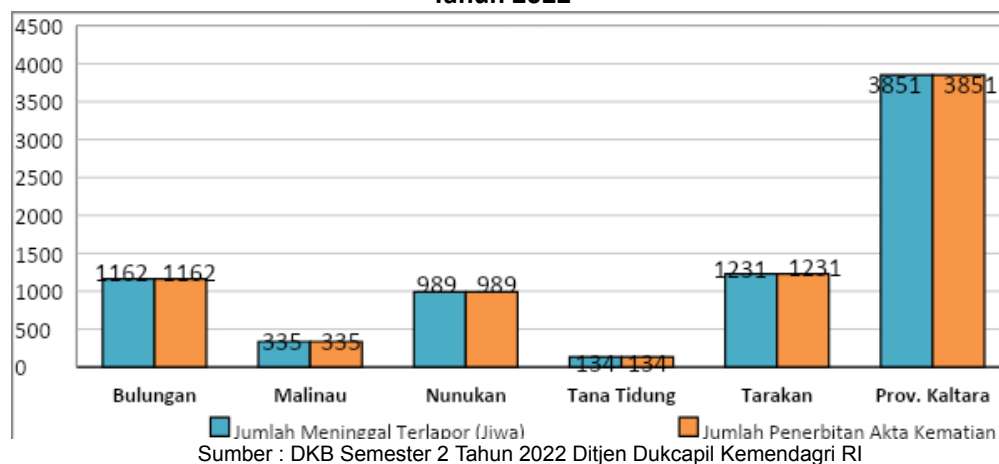
Kode Wilayah	Kab/Kota	Jumlah Meninggal Terlapor (Jiwa)	Jumlah Penerbitan Akta Kematian	Persentase
6501	Bulungan	1,162	1,162	100,00
6502	Malinau	335	335	100,00
6503	Nunukan	989	989	100,00
6504	Tana Tidung	134	134	100,00
6571	Tarakan	1.231	1.231	100,00
	<b>Prov. Kaltara</b>	<b>3.851</b>	<b>3.851</b>	<b>100,00</b>

Sumber : DKB Semester 2 Tahun 2022 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa pada Tahun 2022 terdapat kematian yang dilaporkan 3.851 jiwa naik 864 jiwa dari tahun 2021 2.987 penerbitan akta kematian.

Sejak tahun 2022 Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI menerapkan Buku Pokok Pemakaman di setiap tempat pemakaman umum atau swasta atau pribadi di setiap kecamatan / kelurahan / desa diseluruh Indonesia untuk meningkatkan akurasi pendataan Akta Kematian.

Gambar 5.8 Grafik Kepemilikan Akta Kematian di Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022





## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 ini memuat data kependudukan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 yang bersumber dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Buku ini kami harapkan dapat digunakan oleh instansi pemerintah dan/atau swasta maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan serta bermanfaat sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara.

Untuk mendukung penyusunan dan penyajian Profil Perkembangan Kependudukan tahun berikutnya, diperlukan usaha dan dukungan *stake holder* yang terkait khususnya perbaikan data atau pemutakhiran data kependudukan setiap periode sehingga penyajian tahun yang akan datang lebih baik dan akurat.

Akurasi dan validitas data ini juga dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat dalam mengurus dan melaporkan peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, disamping peran aktif aparaturnya atau petugas dan masyarakat dalam melakukan peran stelsel aktif untuk pelayanan publik.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna sehingga kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di kemudian hari sangat dibutuhkan, baik dari pengguna data maupun pemerhati masalah kependudukan. Demikian dan terimakasih.



## DAFTAR PUSTAKA

- Saribun, Daud S, *Pengaruh Jenis Penggunaan Lahan dan Kelas Lereng Terhadap Bobot Isi, Porositas Total, dan Kadar Air Tanah Pada Sub-Das Cikabpudung Hulu*, Laporan Penelitian, Universitas Padjajaran, 2007
- Maulana, Deden Rusdian, *Mekanika Tanah II*, Makalah, Universitas Muhammadiyah Tangerang, 2014
- Tim, *Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021*, Tanjung Selor : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara, 2022
- Bank Indonesia, *Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Kalimantan Utara*, Februari 2019
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang pembentukan Provinsi Kalimantan Utara
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara
- Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga
- Imamia, Tsumma Lazuardini, *Hubungan Tingkat Pendidikan Dengan Pemberantasan Kemiskinan di Indonesia*, Universitas Brawijaya
- Presentasi Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty yang diwakili oleh Dr. Abidinsyah Siregar, DHSM, M.Kes Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi BKKBN Pusat pada Rapat Kerja Nasional Kesehatan 2016 gelombang II, Jakarta 5 April 2016
- LIPi, *Jurnal Kependudukan Indonesia* Vol. 13 1 Juni 2018
- BAPPEDA & Litbang Provinsi Kalimantan Utara, *RPJMD Kalimantan Utara 2016-2021*, 2016
- Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI, *Data Konsolidasi Bersih (DKB) Per Desember Tahun 2022*
- Biro Pengelola Perbatasan Negara Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara, *Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka 2020*, Tanjung Selor, 2020
- Ranwal RPJMD Kaltara 2021-2026
- Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) Kalimantan Utara
- RTRW Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037



Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau tanggal 9 November 2022

<https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/geomorfologi/jenis-jenis-longsor>

<https://www.geologinesia.com/2018/05/mengenal-ciri-ciri-iklim-tropis.html>

<http://news.detik.com/opini/d-1367204/negeri-patron-klien-bernama-indonesia> diakses 5 Maret 2020  
11.00 WITA

<https://www.bappenas.go.id/files/rpjmn/Narasi%20Rancangan%20RPJMN%202020-2024.pdf> diakses  
6 Maret 2020 pukul 11.28 WITA

[https://id.wikipedia.org/wiki/Golongan\\_darah](https://id.wikipedia.org/wiki/Golongan_darah) diakses 7 Maret 2020 pukul 16:37 WITA

<https://apkapm.data.kemdikbud.go.id/>

**LAMPIRAN**

**Lampiran Metadata Variabel**  
**Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022**  
**Tahun Anggaran 2023**

- 1 Nama Variabel : Penduduk  
Alias : -  
Konsep : Total jumlah WNI dan WNA di Indonesia  
Definisi : Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia  
Referensi Pemilihan : UU RI No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 6 huruf d  
Referensi Waktu : Tahunan  
Tipe Data : Integer  
Klasifikasi Isian : Jenis Kelamin, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelompok Umur
- 2 Nama Variabel : Penduduk Miskin  
Alias : -  
Konsep : Penduduk Miskin  
Definisi : Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita sebulan di bawah garis kemiskinan  
Referensi Pemilihan : <https://indah.bps.go.id/standar-data-statistik-nasional> ; Kode SDS K01156  
Referensi Waktu : Tahunan  
Tipe Data : Integer  
Klasifikasi Isian : Kabupaten /kota , Pedesaan dan Perkotaan
- 3 Nama Variabel : Penduduk Usia Kerja  
Alias : -  
Konsep : Penduduk Usia Kerja  
Definisi : Penduduk Usia Kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun keatas atau di sebut juga Tenaga Kerja  
Referensi Pemilihan : Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.2050/MEN/XII/2008 Tentang Klasifikasi dan Karakteristik Data dan Jenis Informasi Ketenagakerjaan  
Referensi Waktu : Tahunan  
Tipe Data : Integer  
Klasifikasi Isian : Jenis Kelamin, Kabupaten/Kota
- 4 Nama Variabel : Angkatan Kerja  
Alias : -  
Konsep : Angkatan Kerja  
Definisi : Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (berumur 15 tahun ke atas) yang selama seminggu sebelum pencacahan, bekerja atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, dan mereka yang tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan  
Referensi Pemilihan : <https://indah.bps.go.id/standar-data-statistik-nasional> Kode SDS : K00099  
Referensi Waktu : Tahunan  
Tipe Data : Integer  
Klasifikasi Isian : Jenis Kelamin, Daerah (Perkotaan, Pedesaan), Jenis Kegiatan (Bekerja, Pengangguran)
- 5 Nama Variabel : Bukan Angkatan Kerja  
Alias : -  
Konsep : Bukan Angkatan Kerja

Definisi	: Mereka yang berumur 10 tahun ke atas dan selama seminggu yang lalu hanya bersekolah, mengurus rumah tangga atau lainnya, serta tidak melakukan suatu kegiatan yang dapat dimasukkan dalam kategori bekerja, sementara tidak bekerja, atau mencari pekerjaan
Referensi Pemilihan	:
Referensi Waktu	: Tahunan
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: Jenis Kelamin, Daerah (Perkotaan, Pedesaan), Jenis Kegiatan (Sekolah, Mengurus Rumah Tangga, Lainnya)
6 Nama Variabel	: Pengangguran Terbuka
Alias	: -
Konsep	: Pengangguran Terbuka
Definisi	: Merupakan angkatan kerja yang tidak bekerja
Referensi Pemilihan	: <a href="https://sirusa.web.bps.go.id/metadata/varianbel/7765">https://sirusa.web.bps.go.id/metadata/varianbel/7765</a>
Referensi Waktu	: Tahunan
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: Jenis Kelamin
7 Nama Variabel	: Penduduk Usia Produktif
Alias	: -
Konsep	: Penduduk Usia Produktif
Definisi	: Penduduk dengan usia 15 – 64 tahun
Referensi Pemilihan	: <a href="https://sirusa.web.bps.go.id/metadata/varianbel/4587">https://sirusa.web.bps.go.id/metadata/varianbel/4587</a>
Referensi Waktu	: Tahunan
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: Jenis Kelamin
8 Nama Variabel	: Perempuan Usia 15-49 Tahun
Alias	: -
Konsep	: Perempuan Usia 15-49 Tahun
Definisi	: Perempuan Usia 15-49 Tahun
Referensi Pemilihan	: Kompilasi Produk Administrasi Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023
Referensi Waktu	: Tahunan
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: Kabupaten /kota
9 Nama Variabel	: Penduduk Usia 0-4
Alias	: -
Konsep	: Penduduk Usia 0-4
Definisi	: Penduduk sebelum mencapai usia genap 5 tahun. Kelompok umur ini sering disebut balita (bawah lima tahun)
Referensi Pemilihan	: Kompilasi Produk Administrasi Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024
Referensi Waktu	: Tahunan
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: Kabupaten /kota
10 Nama Variabel	: Kepala Keluarga
Alias	: -
Konsep	: Kepala Keluarga
Definisi	: Seorang yang bertanggung jawab di keluarga tersebut dan tertera sebagai kepala keluarga dalam kartu keluarga



Referensi Pemilihan	: 1. <a href="https://indah.bps.go.id/standar-data-statistik-nasional">https://indah.bps.go.id/standar-data-statistik-nasional</a> , Kode SDSN : SP00245.00.00 2. Peraturan : UU RI No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 6 huruf d
Referensi Waktu	: Tahunan
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: Jenis Kelamin, Kabupaten/Kota
11 Nama Variabel	: Wajib KTP
Alias	: -
Konsep	: Wajib KTP
Definisi	: Penduduk wajib KTP adalah warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Tetap dan telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah menikah secara sah
Referensi Pemilihan	: 1. Peraturan : UU RI No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 6 huruf d
Referensi Waktu	: Tahunan
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: Kabupaten/Kota
12 Nama Variabel	: Kelahiran Hidup
Alias	: -
Konsep	: Kelahiran Hidup
Definisi	: anak yang pada waktu dilahirkan menunjukkan tanda-tanda kehidupan, walaupun mungkin hanya beberapa saat, seperti jantung berdenyut, bernafas, dan menangis.
Referensi Pemilihan	: <a href="https://indah.bps.go.id/standar-data-statistik-nasional">https://indah.bps.go.id/standar-data-statistik-nasional</a>
Referensi Waktu	: Tahunan
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: Kabupaten/Kota
13 Nama Variabel	: Disabilitas
Alias	: -
Konsep	: Status Disabilitas
Definisi	: Kategori yang menggambarkan kondisi seseorang secara fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama sehingga dapat mengakibatkan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan, atau mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Gangguan/keterbatasan fungsi antara lain kesulitan melihat (seeing difficulty), kesulitan mendengar (hearing difficulty), berbicara tidak lancar (cannot speak fluently), kesulitan memahami/hilang ingatan/gangguan jiwa (difficult understand), lambat dalam belajar/memahami pelajaran (slow learning), keterbatasan berjalan (walking limitations), keterbatasan bergerak (limited movements), kesulitan mengambil barang kecil menggunakan jari (difficulty in picking up small objects).
Referensi Pemilihan	: <a href="https://indah.bps.go.id/standar-data-statistik-nasional">https://indah.bps.go.id/standar-data-statistik-nasional</a> ; Kode SDS 10620001
Referensi Waktu	: Tahunan
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: Jenis Disabilitas, Jenis Kelamin, Kabupaten/Kota
14 Nama Variabel	: Kepemilikan Kartu Keluarga
Alias	: -
Konsep	: Kepemilikan Kartu Keluarga
Definisi	: Jumlah keluarga yang memiliki Kartu Keluarga
Referensi Pemilihan	: <a href="https://sirusa.web.bps.go.id/metadata/variabel/147591">https://sirusa.web.bps.go.id/metadata/variabel/147591</a>
Referensi Waktu	: Tahunan

Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: Jenis Kelamin, Kabupaten/Kota
15 Nama Variabel	: Perekaman KTP-EI
Alias	: -
Konsep	: Perekaman KTP-EI
Definisi	: Penduduk yang sudah melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)
Referensi Pemilihan	: <a href="https://sirusa.web.bps.go.id/metadata/variabel/149623">https://sirusa.web.bps.go.id/metadata/variabel/149623</a>
Referensi Waktu	: Tahunan
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: Jenis Kelamin, Kabupaten/Kota
16 Nama Variabel	: Identitas Kependudukan Digital (IKD)
Alias	: -
Konsep	: Identitas Kependudukan Digital (IKD)
Definisi	: identitas kependudukan digital adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui ponsel pintar yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan. Dengan identitas kependudukan digital, masyarakat tidak perlu lagi menyimpan kartu tanda pengenal dalam bentuk fisik. Cukup hanya menunjukkan quick response (QR) code yang ada dalam aplikasi Identitas Kependudukan Digital untuk keperluan administrasi
Referensi Pemilihan	: <a href="#">Permendagri No. 72 Tahun 2022</a>
Referensi Waktu	: Tahunan
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: Jenis Kelamin, Kabupaten/Kota
17 Nama Variabel	: Kartu Identitas Anak (KIA)
Alias	: -
Konsep	: Kartu Identitas Anak (KIA)
Definisi	: Kartu Identitas Anak (KIA) adalah Kartu yang diterbitkan Pemerintah untuk melakukan pendataan, memberikan perlindungan, dan pemenuhan hak konstitusional anak-anak yang ada di Indonesia.
Referensi Pemilihan	: <a href="https://sirusa.web.bps.go.id/metadata/variabel/1505">https://sirusa.web.bps.go.id/metadata/variabel/1505</a>
Referensi Waktu	: Tahunan
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: Jenis Kelamin, Kabupaten/Kota
18 Nama Variabel	: Akta Kelahiran
Alias	: -
Konsep	: Akta Kelahiran
Definisi	: Surat tanda bukti kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan kantor catatan sipil tiap daerah atau kantor yang menyediakan layanan kependudukan yang terafiliasi dengan Dinas Kependudukan dan kantor catatan sipil Kementerian Dalam Negeri, bukan surat keterangan lahir dari rumah sakit/dokter/bidan/k elurahan. Akta kelahiran merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara bagi individu yang baru lahir.
Referensi Pemilihan	: <a href="indah.bps.go.id">indah.bps.go.id</a> ; Kode SDS : K00058
Referensi Waktu	: Tahunan
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: Jenis Kelamin, Kabupaten/Kota
19 Nama Variabel	: Akte Perkawinan
Alias	: -
Konsep	: Akte Perkawinan

Definisi	: Akta perkawinan / pernikahan merupakan identitas atas penduduk yang berstatus kawin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta perkawinan memberikan kekuatan hukum atas ikatan antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk keluarga dengan seluruh hak dan kewajiban yang melekat didalamnya. Akta ini terdiri dari Kawin Tercatat dan Kawin Belum Tercatat yaitu kawin yang belum dilaporkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) (bagi muslim) atau Pemuka Agama (non muslim) mis : nikah agama atau nikah siri atau nikah adat
Referensi Pemilihan	: Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Referensi Waktu	: Tahunan
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: Jenis Kelamin, Kabupaten/Kota
20 Nama Variabel	: Akte Perceraian
Alias	: -
Konsep	: Akte Perceraian
Definisi	: dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah pasangan suami dan istri memperoleh salinan putusan penetapan perceraian dari pengadilan negeri.
Referensi Pemilihan	: Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Referensi Waktu	: Tahunan
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: Jenis Kelamin, Kabupaten/Kota
21 Nama Variabel	: Akta Kematian
Alias	: -
Konsep	: Akta Kematian
Definisi	: Dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik perihal peristiwa kematian seseorang
Referensi Pemilihan	: indah.bps.go.id ; Kode SDS : K00059
Referensi Waktu	: Tahunan
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: Jenis Kelamin, Kabupaten/Kota

**Lampiran Metadata Indikator**  
**Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022**  
**Tahun Anggaran 2023**

1 Nama Variabel	: Pertumbuhan Penduduk
Alias	: -
Konsep	: Pertumbuhan Penduduk
Definisi	: Angka yang menunjukkan tingkat penambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar.
Interpretasi	: Pertumbuhan penduduk Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun ... sebesar ...%
Metode/Rumus Penghitungan	: $\text{Pertumbuhan penduduk} = \frac{(\text{Jumlah Penduduk Thn ke } (n) - \text{Jumlah Penduduk Thn ke } (n-1))}{\text{Jumlah Penduduk Thn ke } (n)} \times 100\%$
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi Penyajian	: Provinsi
2 Nama Variabel	: Persentase Penduduk Usia Kerja (PUK)
Alias	: -
Konsep	: Penduduk usia 15 tahun ke atas
Definisi	: Penduduk Usia Kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun keatas
Interpretasi	: Semakin tinggi nilai persentase penduduk usia kerja berarti semakin banyak jumlah penduduk usia kerja
Metode/Rumus Penghitungan	: $\text{Persentase Penduduk Usia Kerja} = \frac{(\text{Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas Tahun ke } (n))}{\text{Jumlah Penduduk Tahun ke } (n)} \times 100\%$
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi Penyajian	: Jenis Kelamin, Daerah (Perkotaan dan Perdesaan)
3 Nama Variabel	: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Alias	: -
Konsep	: Angkatan Kerja
Definisi	: Persentase jumlah angkatan kerja (bekerja dan Pengangguran) terhadap penduduk usia kerja
Interpretasi	: Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.
Metode/Rumus Penghitungan	: $\text{TPAK} = \frac{\text{Angkatan Kerja}}{\text{Penduduk Usia Kerja}} \times 100\%$
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi Penyajian	: Jenis Kelamin, Klasifikasi Daerah (Perkotaan dan Perdesaan)
4 Nama Variabel	: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Alias	: -
Konsep	: Angkatan Kerja; Pengangguran
Definisi	: Bagian dari angkatan kerja yang tergolong ke dalam penganggur atau tidak memiliki pekerjaan, yang dihitung melalui persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.
Interpretasi	: Nilai 6,26 persen artinya dari total angkatan kerja, 6,26 persen diantaranya merupakan pengangguran
Metode/Rumus Penghitungan	: Tingkat pengangguran terbuka diperoleh dengan cara membagi penduduk yang termasuk dalam kategori pengangguran dengan jumlah angkatan kerja dikali dengan 100 persen.  $\text{TPT} = \frac{\text{Pengangguran}}{\text{Angkatan Kerja}} \times 100\%$
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi Penyajian	: Jenis Kelamin, Kabupaten/Kota, Klasifikasi Daerah (Perkotaan dan Perdesaan)
5 Nama Variabel	: Angka Pengangguran
Alias	: -
Konsep	: Pengangguran
Definisi	: Pengangguran adalah kondisi ketika individu yang mencari pekerjaan tidak dapat menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman mereka, sehingga mereka tidak memiliki penghasilan yang stabil
Interpretasi	: jumlah angka perkiraan pengangguran sebesar 57.390 jiwa
Metode/Rumus Penghitungan	: $\text{Angka Pengangguran} = \text{Penduduk Belum/ Tidak Bekerja} - \text{Penduduk Usia Pra Sekolah} < 6 \text{ Tahun}$
Satuan	: Orang

Klasifikasi Penyajian	:	Kabupaten Kota
6 Nama Variabel	:	Persentase Penduduk Usia Kerja Menurut Lapangan Usaha
Alias	:	-
Konsep	:	Penduduk Usia Kerja
Definisi	:	Penduduk Usia Kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun keatas di klasifikasikan menurut lapangan usaha
Interpretasi	:	Persentase penduduk usia kerja menurut lapangan usaha, pertanian....%, dll Persentase Penduduk Usia Kerja Menurut Lapangan Usaha = (Jumlah Penduduk menurut lapangan usaha (n)/jumlah total penduduk ) x 100%
Metode/Rumus Penghitungan	:	
		n=jenis lapangan usaha
Satuan	:	Persen (%)
		Jenis Lapangan Usaha :
		a. Pertanian;
		b. Pertambangan dan Penggalian
		c. Industri Pengolahan
		d.e Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air
		f. Konstruksi
		g. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi;
		h. Transportasi dan Pergudangan;
Klasifikasi Penyajian	:	i. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;
		j. Informasi dan Komunikasi;
		k.l Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat
		m.n Jasa perusahaan
		o. Administrasi Pemerintahan;
		p. Jasa Pendidikan;
		q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
		r.s.t.u Jasa Lainnya
7 Nama Variabel	:	Persentase Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama
Alias	:	-
Konsep	:	Penduduk Usia Kerja
Definisi	:	Penduduk Usia Kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun keatas di klasifikasikan menurut status pekerjaan utama
Interpretasi	:	Persentase penduduk usia kerja menurut status pekerjaan utama, buruh/karyawan....%, dll Persentase Penduduk Usia Kerja Menurut status pekerjaan utama = (Jumlah Penduduk usia kerja yang bekerja menurut status pekerjaan utama (n)/jumlah total penduduk usia kerja yang bekerja ) x 100%
Metode/Rumus Penghitungan	:	
		n=status pekerjaan utama
Satuan	:	Persen (%)
		a. Buruh/Karyawan /Pegawai
		b. Berusaha Sendiri
		c. Pekerja Keluarga/Tidak Dibayar
Klasifikasi Penyajian	:	d. Berusaha dibantu Pekerja tidak tetap/dibayar
		e. Berusaha dibantu Pekerja tetap dan dibayar
		f. Pekerja Bebas di Pertanian
		g. Pekerja Bebas di Non Pertanian
8 Nama Variabel	:	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Alias	:	-
Konsep	:	Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin
Definisi	:	Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia berdasarkan laki- laki dan perempuan (jenis kelamin)
Interpretasi	:	Jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun ... sebanyak .....orang
Metode/Rumus Penghitungan	:	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin = Jumlah Penduduk Laki-Laki + Jumlah Penduduk Perempuan
Satuan	:	Orang
Klasifikasi Penyajian	:	Provinsi
9 Nama Variabel	:	Rasio Kepadatan Penduduk
Alias	:	-

Konsep	:	Kepadatan Penduduk
Definisi	:	banyaknya jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah
Interpretasi	:	Kepadatan penduduk pada tahun ... sebesar ... jiwa/km <sup>2</sup>
Metode/Rumus Penghitungan	:	Kepadatan penduduk = Jumlah penduduk (jiwa) / luas wilayah
Satuan	:	Jiwa/km <sup>2</sup>
Klasifikasi Penyajian	:	Provinsi, Kabupaten/Kota
10 Nama Variabel	:	Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur
Alias	:	-
Konsep	:	Penduduk Kelompok Umur
Definisi	:	Semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.
Interpretasi	:	Penduduk umur 0-4 tahun ada ...%, dst Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur = (Jumlah Penduduk menurut kelompok Umur (n)/jumlah total penduduk) x 100%
Metode/Rumus Penghitungan	:	n= kelompok umur
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi Penyajian	:	Kelompok Umur ( >75, 70-74, 65-69, 60-64, 55-59, 50-54, 45-49, 40-44,35-39, 30-34,25-29, 20-24, 15-19, 10-14, 5-9, 0-4)
11 Nama Variabel	:	Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio)
Alias	:	-
Konsep	:	Penduduk
Definisi	:	Rasio Jenis Kelamin adalah perbandingan antara jumlah penduduk pria dan jumlah penduduk wanita pada suatu daerah pada suatu waktu tertentu, yang di nyatakan dalam berapa banyak penduduk pria berbanding 100 orang wanita. berapa banyak penduduk pria berbanding 100 orang wanita, jika sex ratio diatas 100
Interpretasi	:	menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak di banding perempuan, sedangkan bila sex ratio nya kurang dari 100 berarti jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki
Metode/Rumus Penghitungan	:	Rasio Penduduk Menurut Jenis Kelamin = (jumlah penduduk berjenis kelamin (n)/ jumlah total penduduk)x 100%
Satuan	:	-
Klasifikasi Penyajian	:	Kabupaten/Kota, Provinsi, Jenis Kelamin
12 Nama Variabel	:	Persentase Penduduk Menurut Status Perkawinan
Alias	:	-
Konsep	:	Penduduk
Definisi	:	Semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.
Interpretasi	:	penduduk dengan status belum kawin ada...% dst Persentase Penduduk Menurut Status Perkawinan = (Jumlah Penduduk menurut status perkawinan (n)/jumlah total penduduk) x 100%
Metode/Rumus Penghitungan	:	n= status perkawinan
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi Penyajian	:	Jenis Kelamin, Status Perkawinan ( Belum Kawin, Kawin, Cerai Hidup, Cerai Mati), Kabupaten/Kota
13 Nama Variabel	:	Persentase Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Terakhir
Alias	:	-
Konsep	:	Penduduk
Definisi	:	Semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.
Interpretasi	:	Penduduk dengan pendidikan terakhir ada...% dst Persentase Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Terakhir = (Jumlah Penduduk menurut tingkat pendidikan terakhir (n)/jumlah total penduduk) x 100%
Metode/Rumus Penghitungan	:	n= tingkat pendidikan terakhir
Satuan	:	Persen (%)

Klasifikasi Penyajian	: Tingkat Pendidikan Terakhir (Tidak/Belum Sekolah, Belum Tamat SD/Sederajat, Tamat SD/Sederajat, SLTP/Sederajat, SLTA/Sederajat, Diploma I/II, Akedemi / D-III/S.Muda, Diploma IV/ Strata I, Strata II, Strata III), Jenis Kelamin, Kabupaten/Kota
14 Nama Variabel	: Persentase Penduduk Menurut Agama
Alias	: -
Konsep	: Penduduk
Definisi	: Semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.
Interpretasi	: penduduk yang beragama islam ada sebanyak ...% dst
Metode/Rumus Penghitungan	: $\text{Persentase Penduduk Menurut Agama} = \frac{\text{Jumlah Penduduk menurut agama (n)}}{\text{jumlah total penduduk}} \times 100\%$
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi Penyajian	: Jenis Kelamin , Agama ( Islam, Kritek, Khatolik, Hindu, Budha, Konghuchu, dan Kepercayaan), Kabupaten/Kota
15 Nama Variabel	: Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio)
Alias	: -
Konsep	: -
Definisi	: Rasio ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif ( umur 15-64 tahun) dan usia non-produktif (umur 0-14 tahun di tambah umur 65 tahun ke atas)
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus di tanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk non-produktif. Sebaliknya semakin rendah rasio ketergantungan, maka semakin rendah pula beban kelompok produktif untuk menanggung penduduk usia belum produktif atau tidak produktif
Metode/Rumus Penghitungan	: $\text{DR} = \frac{\text{Jumlah usia non produktif}}{\text{jumlah usia produktif}} \times 100\%$
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi Penyajian	: Jenis Kelamin dan Kelompok Umur ( 65>, 15-64, <14), Kabupaten/ Kota
16 Nama Variabel	: Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga
Alias	: -
Konsep	: Keluarga
Definisi	: Rata-Rata Jumlah anggota keluarga adalah indikator demografis untuk menggambarkan perkiraan jumlah anggota keluarga yang dimiliki setiap keluarga. Ratajumlah anggota keluarga biasantta digunakan untuk melihat perubahan paradigma dari keluarga luas menjadi keluarga kecil
Interpretasi	: Semakin kecil jumlah anggota keluarga biasanya akan semakin baik tingkat kesejahteraanya
Metode/Rumus Penghitungan	: $\text{Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga} = \frac{\text{Jumlah penduduk}}{\text{jumlah keluarga}}$
Satuan	: Orang / Keluarga
Klasifikasi Penyajian	: Kabupaten/Kota, Provinsi
17 Nama Variabel	: Persentase Penduduk Menurut Status Hubungan dengan Kepala Keluarga
Alias	: -
Konsep	: Keluarga
Definisi	: Status Hubungan dengan kepala keluarga yang menunjukkan hubungan kekerapan=batan maupun tidak, seperti suami, istri, anak, menantu, cucu, orang tua, mertua famili lain , termasuk adanya orang lain yang tinggal bersama seperti pembantu rumah tangga dan lain sebagainya
Interpretasi	: Kepala keluarga yang berjenis kelamin perempuan ada ...% dst
Metode/Rumus Penghitungan	: $\text{Rumus} = \frac{\text{Jumlah penduduk menurut status hubungan dengan kepala keluarga ke (n)}}{\text{jumlah penduduk}} \times 100\%$
Satuan	: Persen (%)

	Jenis Kelamin , Kabupaten Kota, Status Hubungan dengan Kepala Keluarga :
	a. Kepala Keluarga
	b. Suami
	c. Istri
	d. Anak
Klasifikasi Penyajian	: e. Menantu
	f. Cucu
	g. Orang Tua
	h. Mertua
	i. Famili Lain
	l. Lainnya
18 Nama Variabel	: Persentase Penduduk Menurut Golongan Darah
Alias	: -
Konsep	: Penduduk Golongan Darah
Definisi	: Golongan Darah ialah ilmu pengklasifikasian darah dari suatu kelompok berdasarkan ada atau tidaknya zat antigen warisan pada permukaan membran sel darah merah.
Interpretasi	: Penduduk dengan golongan darah A ada...% dst
Metode/Rumus Penghitungan	: Rumus = Jumlah penduduk menurut golongan darah (n) / jumlah penduduk x 100% n= golongan darah
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi Penyajian	: Kabupaten / Kota , Golongan Darah (A, B, AB, O, A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+, O-, Tidak Tahu
19 Nama Variabel	: Angka Kelahiran ASFR ( Age Specific Fertility Rate)
Alias	: -
Konsep	: Angka Kelahiran Banyaknya jumlah kelahiran pada suatu tahun dari perempuan dengan kelompok umur tertentu per 1000 perempuan dalam kelompok umur yang sama di pertengahan tahun tersebut. Batasan kelompok umur perempuan (dalam 5 tahunan) adalah selama perempuan dalam masa subur (15-49 tahun).
Definisi	: ASFR di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 100,04 artinya dari 1.000 penduduk perempuan usia 15-49 Tahun terjadi kelahiran 100-101 jiwa
Interpretasi	: ASFR dihitung dengan menggunakan metode tidak langsung (indirect method) yaitu metode Own-Children.
Metode/Rumus Penghitungan	: Kelahiran per 1.000
Satuan	: Kelahiran per 1.000
Klasifikasi Penyajian	: Kabupaten/Kota, Provinsi
20 Nama Variabel	: Rasio Anak dan Perempuan (Child Woman Ratio)
Alias	: -
Konsep	: Rasio Anak dan Perempuan (Child Woman Ratio) Rasio Anak dan Perempuan (Child Woman Ratio) adalah rasio antara jumlah anak berusia di bawah 5 (lima) tahun di suatu daerah dengan jumlah penduduk perempuan usia produktif (15-49 tahun) pada kurun waktu tertentu. Rasio anak dan perempuan secara umum dapat digunakan untuk melihat angka kelahiran yang terjadi selama 5 tahun ke belakang.
Definisi	: Misal Rasio Anak dan Perempuan (CWR) sebesar 14,6 yang bermakna bahwa terdapat sebanyak 14 anak di bawah usia 5 tahun (0-4 tahun) dari setiap 100 penduduk perempuan usia 15-49 tahun, atau sekira 1 orang anak usia 0-4 tahun pada setiap 7 orang perempuan usia 15-49 tahun.
Interpretasi	: CWR = Jumlah Penduduk (0-4) Tahun / Jumlah Penduduk Perempuan (15-49) Tahun x 100
Metode/Rumus Penghitungan	: Anak per 100 perempuan usia 15-49 tahun
Satuan	: Kabupaten Kota
Klasifikasi Penyajian	: Kabupaten Kota
21 Nama Variabel	: Angka Partisipasi Kasar
Alias	: -
Konsep	: Angka Partisipasi Kasar Rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu
Definisi	: Rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu



Interpretasi	:	APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan $APK (n) = \frac{\text{Jumlah Siswa Jenjang Pendidikan } (n)}{\text{Jumlah Penduduk Usia Jenjang Pendidikan } (n)} \times 100\%$
Metode/Rumus Penghitungan	:	$n = \text{PAUD/TK (4-6 Tahun), SD/Sederajat (7-12 Tahun), SMP/Sederajat (13-15 Tahun), SMA/SMK/Sederajat (16-18 Tahun)}$
Satuan	:	Persen (%) Jenjang Pendidikan a. PAUD/TK (4-6 Tahun)
Klasifikasi Penyajian	:	b. SD/Sederajat (7-12 Tahun) c. SMP/Sederajat (13-15 Tahun) d. SMA/SMK/Sederajat (16-18 Tahun)
22 Nama Variabel	:	Angka Partisipasi Murni
Alias	:	-
Konsep	:	Angka Partisipasi Murni Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, Paket C) turut diperhitungkan
Definisi	:	Nilai APM berkisar antara 0-100. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen. Secara umum, APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan Contoh: APM SMP Provinsi XTahun 2013 sebesar 64,71 persen, artinya sekitar 65 persen penduduk di Provinsi X yang berusia 13-15 tahun bersekolah tepat waktu dijenjang SMP/ sederajat
Interpretasi	:	Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian
Metode/Rumus Penghitungan	:	$APM (n) = \frac{\text{Jumlah anak usia Sekolah yang bersekolah pada jenjang } (n)}{\text{Jumlah Penduduk Usia Jenjang Pendidikan } (n)} \times 100\%$
Satuan	:	$n = \text{PAUD/TK (4-6 Tahun), SD/Sederajat (7-12 Tahun), SMP/Sederajat (13-15 Tahun), SMA/SMK/Sederajat (16-18 Tahun)}$ Persen (%) Jenjang Pendidikan a. PAUD/TK (4-6 Tahun)
Klasifikasi Penyajian	:	b. SD/Sederajat (7-12 Tahun) c. SMP/Sederajat (13-15 Tahun) d. SMA/SMK/Sederajat (16-18 Tahun)
23 Nama Variabel	:	Persentase Penyandang Disabilitas
Alias	:	-
Konsep	:	Penyandang Disabilitas Penyandang Disabilitas adalah orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental atau sensorik yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sehari-hari
Definisi	:	Pada tahun 2022 di bulungan terdapat penyandang disabilitas sebesar 0, 25% atau sebanyak 398 orang
Interpretasi	:	
Metode/Rumus Penghitungan	:	Rumus = Jumlah Penyandang Disabilitas / Jumlah Penduduk x 100%
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi Penyajian	:	Kabupaten/Kota, Provinsi
24 Nama Variabel	:	Persentase Perekaman KTP-El
Alias	:	-
Konsep	:	Perekaman KTP-el

Definisi	:	Persentase penduduk yang melakukan perekaman KTP elektronik adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang melakukan perekaman KTP elektronik terhadap jumlah penduduk wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP Elektronik, dalam satuan persen. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) adalah kartu tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
Interpretasi	:	Semakin tinggi nilai perekaman KTP-El berarti semakin banyak penduduk yang sudah memiliki KTP el
Metode/Rumus Penghitungan	:	Rumus = Jumlah Penduduk yang melakukan perekaman KTP el / Jumlah Penduduk usia diatas 17 tahun x 100%
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi Penyajian	:	Kabupaten/Kota, Provinsi
25 Nama Variabel	:	Persentase Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)
Alias	:	-
Konsep	:	IKD
Definisi	:	identitas kependudukan digital adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui ponsel pintar yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan. Dengan identitas kependudukan digital, masyarakat tidak perlu lagi menyimpan kartu tanda pengenal dalam bentuk fisik. Cukup hanya menunjukkan quick response (QR) code yang ada dalam aplikasi Identitas Kependudukan Digital untuk keperluan administrasi
Interpretasi	:	Semakin tinggi nilai aktivasi IKD berarti semakin banyak penduduk yang sudah mengaktifasi IKD nya
Metode/Rumus Penghitungan	:	Rumus = Target IKD/ Total Aktivasi IKD x 100%
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi Penyajian	:	Kabupaten/Kota, Provinsi
26 Nama Variabel	:	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)
Alias	:	-
Konsep	:	KIA
Definisi	:	Kartu Identitas Anak adalah salah satu identitas legal bagi penduduk anak-anak usia 0-16 tahun atau belum menikah sebagai bukti perhatian pemerintah untuk memberikan dokumen kependudukan bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa mengenal usia
Interpretasi	:	Pada tahun 2022 di Provinsi Kalimantan Utara anak (0-16 tahun) atau setara 102.631 anak sudah memiliki KIA
Metode/Rumus Penghitungan	:	Rumus = Jumlah Anak (0-16) tahun yang mempunyai KIA / Jumlah Anak (0-16 tahun) x 100%
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi Penyajian	:	Kabupaten/Kota, Provinsi
27 Nama Variabel	:	Persentase Penduduk Memiliki Akte Kelahiran
Alias	:	-
Konsep	:	Akte Kelahiran
Definisi	:	Akte kelahiran merupakan bukti legal hubungan perdata antara seorang anak dengan ayah dan ibunya. Dalam akte tersebut dijelaskan tentang siapa nama orang tua baik ayah maupun ibunya
Interpretasi	:	Semakin tinggi nilai kepemilikan akte kelahiran berarti semakin banyak penduduk yang memiliki akte kelahiran
Metode/Rumus Penghitungan	:	Rumus = Jumlah penduduk yang memiliki akte kelahiran / Jumlah Penduduk x 100%
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi Penyajian	:	Kabupaten/Kota, Provinsi
28 Nama Variabel	:	Persentase Penduduk Belum Memiliki Akte Kelahiran
Alias	:	-
Konsep	:	Akte Kelahiran
Definisi	:	Akte kelahiran merupakan bukti legal hubungan perdata antara seorang anak dengan ayah dan ibunya. Dalam akte tersebut dijelaskan tentang siapa nama orang tua baik ayah maupun ibunya
Interpretasi	:	Semakin tinggi nilai berarti semakin banyak penduduk yang belum memiliki akte kelahiran

Metode/Rumus Penghitungan	:	Rumus = Jumlah penduduk yang belum memiliki akte kelahiran / Jumlah Penduduk x 100%
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi Penyajian	:	Kabupaten/Kota, Provinsi
29 Nama Variabel	:	Persentase Anak Usia 0-17 Tahun yang Memiliki Akte Kelahiran
Alias	:	-
Konsep	:	Akte Kelahiran
Definisi	:	Akte kelahiran merupakan bukti legal hubungan perdata antara seorang anak dengan ayah dan ibunya. Dalam akte tersebut dijelaskan tentang siapa nama orang tua baik ayah maupun ibunya
Interpretasi	:	Semakin tinggi nilai berarti semakin banyak anak yang memiliki akte kelahiran
Metode/Rumus Penghitungan	:	Rumus = Jumlah anak (0-17 tahun) yang memiliki akte kelahiran / Jumlah anak (0-17 tahun) x 100%
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi Penyajian	:	Kabupaten/Kota, Provinsi
30 Nama Variabel	:	Persentase Anak Usia 0-17 Tahun yang Belum Memiliki Akte Kelahiran
Alias	:	-
Konsep	:	Akte Kelahiran
Definisi	:	Akte kelahiran merupakan bukti legal hubungan perdata antara seorang anak dengan ayah dan ibunya. Dalam akte tersebut dijelaskan tentang siapa nama orang tua baik ayah maupun ibunya
Interpretasi	:	Semakin tinggi nilai berarti semakin banyak anak yang belum memiliki akte kelahiran
Metode/Rumus Penghitungan	:	Rumus = Jumlah anak (0-17 tahun) yang belum memiliki akte kelahiran / Jumlah anak (0-17 tahun) x 100%
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi Penyajian	:	Kabupaten/Kota, Provinsi
31 Nama Variabel	:	Persentase Penduduk Memiliki Akte Perkawinan
Alias	:	-
Konsep	:	Akte Pernikahan
Definisi	:	Akte perkawinan / pernikahan merupakan identitas atas penduduk yang berstatus kawin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akte perkawinan memberikan kekuatan hukum atas ikatan antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk keluarga dengan seluruh hak dan kewajiban yang melekat didalamnya. Akte ini terdiri dari Kawin Tercatat dan Kawin Belum Tercatat yaitu kawin yang belum dilaporkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) (bagi muslim) atau Pemuka Agama (non muslim) mis : nikah agama atau nikah siri atau nikah adat. Tabel berikut ini menyajikan kepemilikan akte perkawinan
Interpretasi	:	Semakin tinggi nilai berarti semakin banyak penduduk yang memiliki akte perkawinan
Metode/Rumus Penghitungan	:	Rumus = Jumlah penduduk kawin yang memiliki akte perkawinan / Jumlah Penduduk kawin x 100%
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi Penyajian	:	Kabupaten/Kota, Provinsi
32 Nama Variabel	:	Persentase Penduduk Belum Memiliki Akte Perkawinan
Alias	:	-
Konsep	:	Akte Pernikahan
Definisi	:	Akte perkawinan / pernikahan merupakan identitas atas penduduk yang berstatus kawin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akte perkawinan memberikan kekuatan hukum atas ikatan antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk keluarga dengan seluruh hak dan kewajiban yang melekat didalamnya. Akte ini terdiri dari Kawin Tercatat dan Kawin Belum Tercatat yaitu kawin yang belum dilaporkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) (bagi muslim) atau Pemuka Agama (non muslim) mis : nikah agama atau nikah siri atau nikah adat. Tabel berikut ini menyajikan kepemilikan akte perkawinan
Interpretasi	:	Semakin tinggi nilai berarti semakin banyak penduduk yang belum memiliki akte perkawinan
Metode/Rumus Penghitungan	:	Rumus = Jumlah penduduk kawin yang belum memiliki akte perkawinan / Jumlah Penduduk kawin x 100%

Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi Penyajian	: Kabupaten/Kota, Provinsi
<b>33 Nama Variabel</b>	: <b>Persentase Penduduk Memiliki Akte Perceraian</b>
Alias	: -
Konsep	: Akte Perceraian
Definisi	: dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah pasangan suami dan istri memperoleh salinan putusan penetapan perceraian dari pengadilan negeri. Persentase kepemilikan akte perceraian menurut status perceraian
Interpretasi	: perbandingan kepemilikan akte perceraian menurut status perceraian
Metode/Rumus Penghitungan	: Rumus = Jumlah penduduk kawin yang memiliki akte perceraian / Jumlah Penduduk cerai x 100%
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi Penyajian	: Kabupaten/Kota, Provinsi
<b>34 Nama Variabel</b>	: <b>Persentase Penduduk Belum Memiliki Akte Perceraian</b>
Alias	: -
Konsep	: Akte Perceraian
Definisi	: dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah pasangan suami dan istri memperoleh salinan putusan penetapan perceraian dari pengadilan negeri. Persentase penduduk yang belum memiliki akte perceraian menurut status perceraian
Interpretasi	: perbandingan kepemilikan akte perceraian menurut status perceraian
Metode/Rumus Penghitungan	: Rumus = Jumlah penduduk kawin yang belum memiliki akte perceraian / Jumlah Penduduk cerai x 100%
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi Penyajian	: Kabupaten/Kota, Provinsi
<b>35 Nama Variabel</b>	: <b>Persentase Kepemilikan Akte Kematian</b>
Alias	: -
Konsep	: Akte Kematian
Definisi	: suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang
Interpretasi	: perbandingan akte kematian yang diterbitkan terhadap total kematian penduduk
Metode/Rumus Penghitungan	: Rumus = Jumlah akte kematian yang diterbitkan / Jumlah kematian Penduduk x 100%
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi Penyajian	: Kabupaten/Kota, Provinsi



**disdukcapil**  
**PROVINSI KALIMANTAN UTARA**



# #GISA

**GERAKAN INDONESIA SADAR  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

 **Disdukcapil Kaltara**

 **Disdukcapil Kaltara**

 **[disdukcapil.kaltaraprov.go.id](http://disdukcapil.kaltaraprov.go.id)**

 **Disdukcapil Kaltara**